



UNIVERSITAS INDONESIA

**DILEMA ALIANSI: PENINGKATAN KAPABILITAS
MILITER JEPANG**

TESIS

**EPICA MUSTIKA PUTRO
1006797111**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DILEMA ALIANSI: PENINGKATAN KAPABILITAS
MILITER JEPANG**

TESIS

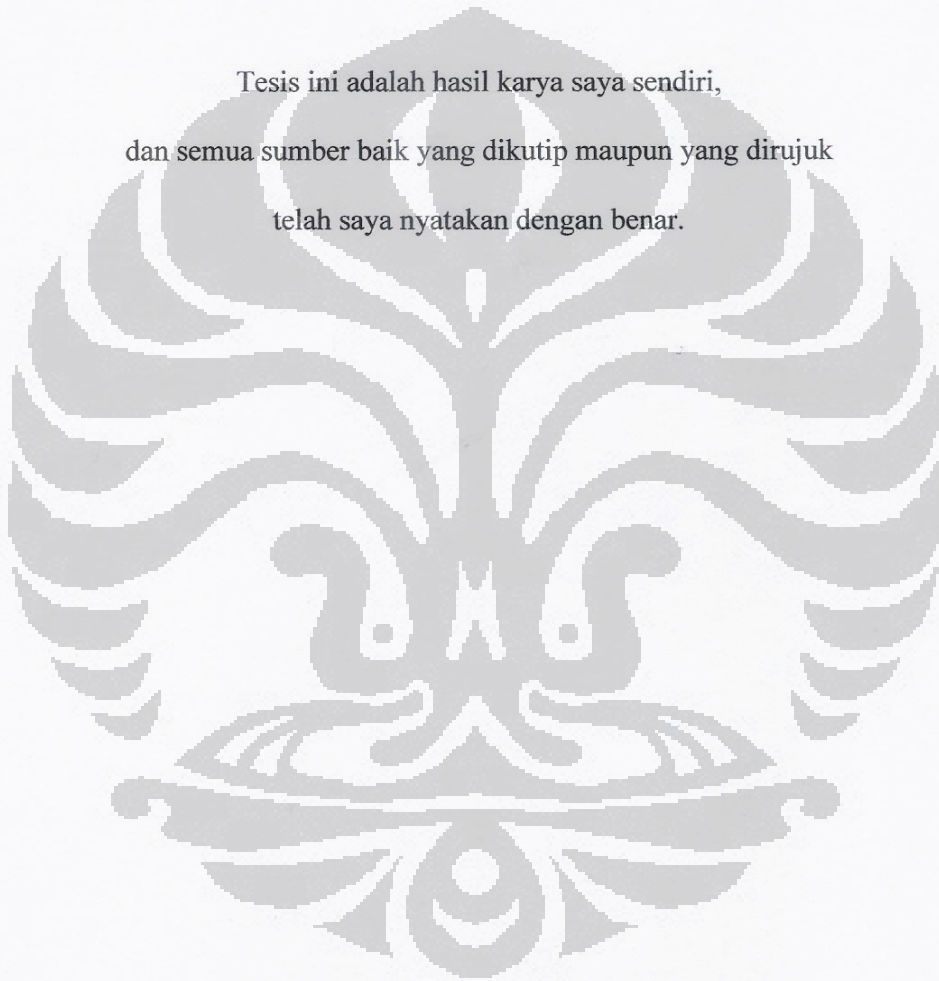
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**EPICA MUSTIKA PUTRO
1006797111**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Epica Mustika Putro

NPM : 1006797111

Tanda Tangan : 

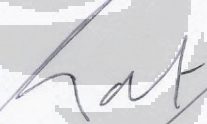
Tanggal : 13 Juni 2012

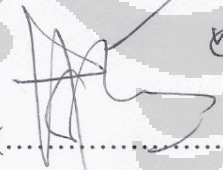
HALAMAN PENGESAHAN

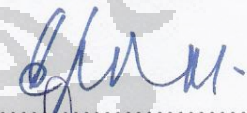
Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Epica Mustika Putro
NPM : 1006797111
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

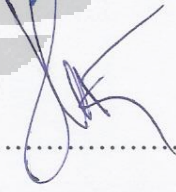
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D (.....) 

Sekretaris : Asra Virgianita, MA (.....) 

Pembimbing : Edy Prasetyono, Ph.D. (.....) 

Penguji Ahli : Andi Widjajanto, MSc, MS (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epica Mustika Putro
NPM : 1006797111
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

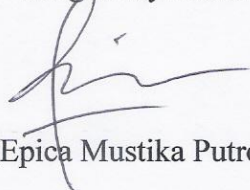
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan



(Epica Mustika Putro)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Edy Prasetyono Ph.D., atau yang sering saya panggil dengan sebutan Mas Edy, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, serta menjadikan waktu bimbingan sangat menarik dengan berbagai cerita tambahan yang menambah pengetahuan saya; Mas Andi Widjanto sebagai penguji ahli, Pak Makmur Keliat sebagai ketua sidang, serta Mbak Asra sebagai sekretaris sidang;
2. Kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah sangat sabar menghadapi dan mendukung saya. Kakak dan adik-adik tersayang, Mbak Ery, Ison dan Ewang, serta keponakanku tersayang Rizza, dan keluarga lainnya;
3. Staf dosen pengajar S2 HI yang telah banyak membantu dan berbagi ilmunya;
4. Agustina Artalia Putri, yang telah sabar menghadapi dan mendukung saya selama penulisan ini;
5. Sahabat saya yang membantu saya dalam waktu senang dan susah bersama, Meita, Gara, Akbar, Archel, Edit, Coki, Yusa, Deska, Adina, Poeti, Yolis, Ivo, Sally, Adie, Donny, Mas Luthfi, Murad, Mbak Nuri, Virgie, Mr. Kim, Mas Heri, Mbak Rinda, dan teman-teman S2 HI dan Kajian Terorisme lainnya yang dengan tidak mengurangi hormat saya tidak sempat disebutkan di sini. Esti yang telah membantu saya dalam mendapatkan buku penting dalam penulisan tesis ini. Uswah, Christine, Ade, yang juga turut membantu melewati masa perkuliahan;

6. Anak-anak kosan yang menghibur dengan pelantikan antara mereka dan 笑ってはいけない-nya, Himmi, Akita, Andi, Ufi, Tata, Edo serta sahabat baik saya Yanu;
7. Pak Udin yang telah membantu selama masa perkuliahan, Mbak Iche di Sekre, dan Mas Roni yang membantu dalam peminjaman buku-buku di UPDHI;
8. Perpustakaan PSJ UI yang telah meminjamkan buku-buku dan memberikan tempat yang nyaman untuk mengerjakan tesis ini;
9. Pihak-pihak lainnya yang juga turut membantu dan tidak sempat disebutkan dalam halaman ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 13 Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

Epica Mustika Putro
1006797111

Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai peningkatan kapabilitas militer Jepang di tengah berbagai pembatasan yang diberlakukan melalui konstitusi pasca perang Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang disebabkan oleh dilema dalam aliansi yang menyebabkan Jepang berada dalam posisi takut ditinggalkan karena ketergantungannya yang besar dalam aliansi. Peningkatan kapabilitas militer ditujukan untuk memenuhi kewajiban Jepang dalam aliansi dalam kerangka kerja sama.

Kata kunci:

Jepang, kapabilitas militer, dilema aliansi

THE UNIVERSITY OF INDONESIA
THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
POSTGRADUATE PROGRAM

Epica Mustika Putro
1006797111

Alliance Dilemma: The Increasing of Japan's Military Capability

ABSTRACT

This thesis will focus about the increasing of Japan's military capability despite its pacifis stance under Japan's pre-war constitution. It is a quantitative study using literature and library research method. The findings show that the increasing of Japan's military capability is caused by the high dependency of Japan upon its ally that caused the fear of the abandonment. The increment is aiming to fulfill Japan's responsibility in the alliance through cooperation.

Key words:

Japan, military capability, alliance dilemma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Signifikansi Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Kerangka Teori.....	19
1.7 Metode Penelitian	26
1.8 Sistematika Penelitian	28
2. PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG	29
2.1 Sejarah Perkembangan Pertahanan Jepang	29
2.1.1 Pasca Perang	29
2.1.2 Pasca Perang Dingin	34
2.1.3 Pasca 9/11	39
2.2 Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang.....	44
2.2.1 Jumlah Kekuatan	45
2.2.2 Teknologi	53
2.2.3 Penggunaan Kekuatan	70

3. DILEMA ALIANSI YANG DIALAMI JEPANG DALAM ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AS	75
3.1 Dilema Aliansi.....	75
3.2 Dilema Aliansi Dilihat Dari Tingkat Ketergantungan Jepang	77
3.2.1 Perbandingan Dengan Kekuatan Musuh	77
3.2.2 Kekuatan partner	88
3.2.3 Tingkat Konflik	92
3.2.4 Pilihan untuk Re-aliansi	95
3.2.5 Kepentingan Strategis	97
4. ANALISA HUBUNGAN ANTARA PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DENGAN DILEMA ALIANSI	101
4.1 Kecenderungan Pilihan Kerjasama Dalam Aliansi	101
4.2 Pilihan Kerjasama Dalam Aliansi Terkait Dengan Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang	111
5 KESIMPULAN	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN GRAFIK

Gambar

Gambar 1.1	Perluasan Misi SDF	12
Gambar 1.2	Dilema Aliansi	24
Gambar 1.3	Model Analisa	26
Gambar 2.1	Sistem Pembayaran Ditangguhkan	53
Gambar 2.2	MBT Tipe-10	55
Gambar 2.3	AH-64D <i>Longbow Apache</i>	56
Gambar 2.4	Sistem Pertahanan Misil Tipe-03 <i>Chu-SAM</i>	57
Gambar 2.5	ATD-X <i>Shinshin</i>	60
Gambar 2.6	16DDH <i>Hyuga</i>	63
Gambar 2.7	Perbandingan 22DDH dengan <i>aircraft carrier</i> negara lain	64
Gambar 3.1	Jangkauan Misil Balistik Korea Utara	81
Gambar 3.2	Jangkauan Misil Balistik Cina	83
Gambar 3.3	Aktivitas terkait keamanan di wilayah sekitar Jepang ...	95
Gambar 3.4	Dilema Aliansi: Kerjasama	100

Tabel

Tabel 2.1	Alutsista Jepang	45
Tabel 2.2	Sepuluh Negara Teratas Anggaran Pertahanan Dunia...	50
Tabel 3.1	Kepemilikan Misil Balistik oleh Korea Utara	80
Tabel 3.2	Misil Balistik Cina Dengan Muatan Nuklir	82
Tabel 3.3	Perbandingan Jumlah Kekuatan Jepang, Korea Utara, dan Cina	87
Tabel 3.4	Perbandingan Jumlah Kekuatan Jepang dan AS	89

Grafik

Grafik 2.1	Jumlah Pasukan Darat Jepang	46
Grafik 2.2	Jumlah Alutsista Jepang 2001-2010	47
Grafik 2.3	Anggaran Pertahanan Jepang 1992-2010	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Program Pengadaan Alutsista Jepang 2009-2012
Lampiran 2	Anggaran Pertahanan Jepang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara yang kekuatannya diperhitungkan di dalam percaturan politik kawasan maupun dunia internasional. Setelah sukses dengan modernisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Meiji, Jepang keluar sebagai satu-satunya negara Asia yang berhasil menantang kekuatan Barat pada masa itu, dimana menjelang akhir abad ke-19 Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Kemudian setelah itu, Jepang mulai memperluas sikap ekspansionisnya, yang dimulai dengan pengambil-alihan Semenanjung Korea, China, hingga negara-negara Asia lainnya.

Sosok Jepang kemudian mulai menonjol ketika turun dalam Perang Dunia II, sampai pada insiden yang memukul Amerika Serikat, yaitu insiden *Pearl Harbor* pada tahun 1941. Insiden tersebut kemudian mendorong AS bersama Sekutu melakukan penyerangan terhadap Jepang yang diakhiri dengan dijatuhkannya bom atom oleh AS dengan kode "*Little Boy*" di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus, yang diperkirakan menyebabkan tewasnya 90.000 orang, baik secara langsung ataupun tidak lama setelah serangan tersebut dijatuhkan, dan banyak korban lainnya jatuh dalam tahun-tahun berikutnya akibat dampak dari bom tersebut. Bom kedua dengan kode "*Fat Man*" kemudian dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, yang menyebabkan korban jiwa mencapai 50.000 orang, dan lebih dari 30.000 orang tewas di tahun-tahun berikutnya.¹

Serangan tersebut berhasil membawa penyerahan diri Jepang atas Sekutu yang juga turut menandai berakhirnya Perang Dunia II. Tidak hanya itu, serangan tersebut menjadi sebuah trauma tersendiri bagi Jepang sebagai satu-satunya negara yang secara langsung mengalami dampak mengerikan dari bom atom, bahkan hingga muncul istilah "alergi nuklir"² bagi publik Jepang, yang juga turut menyumbang sikap anti-perang yang cukup kuat.

¹ Kenneth G. Henshall, *A History of Japan: From Stone Age to Super Power*, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 134

² *Nuclear allergy* atau alergi nuklir adalah sebuah metafora yang mulai banyak digunakan pada tahun 1960-an atas penolakan publik Jepang terhadap senjata nuklir

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II oleh pasukan Sekutu yang dipimpin oleh AS, membawa pada pendudukan Jepang pada tahun 1945 sampai Jepang memperoleh kembali kedaulatannya pada tahun 1952, dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai San Francisco. Pasukan pendudukan berusaha untuk melumpuhkan kekuatan Jepang dengan melakukan demiliterisasi, yaitu penghapusan kekuatan militer Jepang. Salah satu perwujudan usaha tersebut tertuang dalam konstitusi baru Jepang pasca perang yang dirancang oleh pihak pendudukan dan diadopsi oleh badan legislatif Jepang pada tahun 1947, khususnya melalui pasal 9 terutama dalam pasal pasifis yang terkenal, seperti terkuip berikut ini:³

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognised.

(Dengan menjunjung tinggi perdamaian internasional yang berdasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai sebuah hak berdaulat dari bangsa dan penggunaan ancaman atau kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta potensi kekuatan perang lainnya tidak dimiliki. Selain itu hak negara untuk berperang tidak akan diakui.)

Konstitusi yang dibuat ditujukan agar Jepang tidak lagi mempunyai potensi untuk dapat memulai perang dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata Jepang baik darat, laut dan udara serta potensi perang lainnya yang ada pasca perang, dan untuk mencegah penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian/konflik internasional.

Sebagai gantinya AS akan memberikan jaminan perlindungan dan juga payung keamanan terhadap Jepang dari serangan luar yang datang dan akan

³ *Ibid.*, hlm. 142

mengerahkan kekuatannya untuk menyerang balik, hal tersebut tertuang dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960, yang merupakan revisi dari Perjanjian *Mutual Security Assistance Pact* yang ditandatangani pada tahun 1952, dimana Jepang memperbolehkan AS untuk membuat pangkalan dan menempatkan pasukannya di dalam wilayah Jepang.⁴ Akan tetapi, tidak seperti perjanjian pertahanan lainnya, perjanjian yang dibuat tidak bersifat seimbang yang menempatkan Jepang pada posisi yang lebih pasif, dimana Jepang tidak berbuat sebaliknya jika AS diserang oleh kekuatan lain. Tidak seimbang juga jika dilihat pada kenyataan bahwa pemerintah Jepang hanya memiliki sedikit campur tangan terhadap apa yang dilakukan militer AS di pangkalan-pangkalan di dalam wilayah Jepang, dan juga tidak memiliki kontrol terhadap pengiriman pasukan yang ditempatkan di wilayah Jepang ke wilayah lain.⁵

Perjanjian keamanan antara Jepang – AS telah menjadi sumber ketegangan maupun kekuatan dalam hubungan bilateral kedua negara. Permasalahan yang terjadi di sekitar pangkalan-pangkalan militer AS, seperti permasalahan keamanan, sosial dan juga lingkungan, permasalahan dana yang harus dikucurkan oleh pemerintah Jepang untuk mendukung kegiatan pangkalan militer AS di Jepang yang disebut sebagai *omoiyari yosan* (*sympathy budget*), dan permasalahan lainnya menjadi batu ganjalan dalam hubungan kedua negara. Di sisi lain, kehadiran pasukan militer AS di Jepang sangat penting bagi pihak-pihak yang takut akan kembalinya Jepang seperti pada masa lalunya yang kelam, dan juga bagi Jepang sendiri yang keamanannya masih bergantung pada AS.⁶

Ironi terjadi ketika Perang Korea pecah pada tahun 1950, dimana pihak AS yang sebelumnya berusaha melakukan demiliterisasi terhadap Jepang setelah Perang Dunia II, mendorong Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pertahanan wilayahnya. Hal tersebut dilakukan setelah melihat kondisi yang ada

⁴ Congressional Research Service, "Japan's Nuclear Future: Policy Debate, Prospects, and U.S. Interests. Washington", DC: Emma C.A., & Mary Beth Nikitin, 2009, hlm. 1

⁵ Congressional Research Service, "The U.S.-Japan Alliance", Washington DC: Emma Chanlett Avery, 2011, hlm. 2

⁶ Jeffrey Kingston, *Japan in Transformation 1953-2000* (Edinburg Gate: Pearson Education Limited, 2001), hlm. 58

pada saat itu, dimana konsentrasi kekuatan AS tertuju pada Perang Korea, yang kemudian membuat AS mendorong Jepang untuk mengurangi beban yang ditanggungnya dalam menjaga wilayahnya sendiri. Pada saat itu, Jepang hanya menanggapi dengan mendirikan kekuatan kecil, yaitu *National Police Reserve* (NPR), yang pada perkembangannya berubah menjadi *Japan Self-Defense Force* (JSDF) pada tahun 1954, karena kekhawatirannya akan terbawa pada konflik yang sedang terjadi, dan juga karena adanya penolakan yang kuat dari tingkat domestik terhadap remiliterisasi.

JSDF, selanjutnya memiliki tiga kekuatan utama yaitu GSDF (*Ground Self Defense Force*), MSDF (*Maritime Self Defense Force*), dan ASDF (*Air Self Defense Force*). Interpretasi konstitusional terhadap pasal 9 memberikan Jepang hak untuk mempertahankan diri dengan mempunyai kekuatan bersenjata minimum untuk dapat memenuhi hak tersebut. Dengan demikian Jepang hanya dapat memiliki kapabilitas militer dalam konteks pertahanan minimum untuk menghadapi ancaman.⁷

Kebijakan pertahanan dan kapabilitas militer Jepang telah mengalami perkembangan dan pergeseran yang cukup signifikan semenjak pasca perang hingga saat ini, dan sering kali dengan melewati, yang kemudian memperluas, interpretasi terhadap konstitusi pasca perang Jepang, terutama pasal 9.

Kebijakan politik Jepang pasca-perang lebih banyak diwarnai oleh kebijakan pasifis yang sering disebut dengan "*Yoshida Doctrine*", yang diambil dari nama sang pencetus PM Yoshida Shigeru, dimana Jepang akan lebih memfokuskan diri pada perkembangan ekonomi ketimbang masalah pertahanan dan politik internasional yang sebagian besar diserahkan kepada AS. Berkat kebijakan tersebut Jepang dapat keluar sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia. Empat kebijakan penting yang merupakan hasil dari *Yoshida doctrine* ini antara lain: Jepang tidak akan mengirimkan SDF ke luar wilayahnya untuk menjadi bagian dalam skema pertahanan kolektif (*collective defense*); tiga kebijakan non-nuklir (Jepang tidak akan memiliki, membuat, dan memperkenalkan senjata nuklir ke wilayahnya); Jepang tidak akan mengekspor

⁷ Lihat "Ministry of Defense", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jda.htm> diakses pada 2 januari 2012, pukul 13.30

senjata, dan Jepang akan membatasi anggaran pertahanannya di bawah 1% dari GDP-nya.⁸ Walaupun pada perkembangannya kebijakan-kebijakan tersebut sempat dilewati, seperti pelanggaran kebijakan ekspor senjata kepada AS, masuknya senjata nuklir AS ke wilayah Jepang, sampai ditembusnya pembatasan anggaran pertahanan 1% terhadap GDP pada masa PM Nakasone.

Kebijakan pertahanan Jepang mulai mengalami pergeseran menjadi lebih aktif semenjak berakhirnya Perang Dingin. Jepang mulai memperluas misi SDF dengan melakukan pengiriman ke luar wilayahnya untuk operasi-operasi di bawah PBB seperti misi kemanusiaan, bantuan bencana, sampai PKO. Dan dalam satu dekade terakhir pengiriman misi ke luar wilayah Jepang bukan di bawah PBB pun dilakukan, misalnya dengan melakukan pengiriman untuk membantu AS di Irak, sampai pada pengiriman untuk misi anti-bajak laut. Misi dan peran SDF juga meluas sampai pada dukungan terhadap AS jika terdapat situasi darurat di sekitar wilayah Jepang yang tercantum dalam *US-Japan Guidelines for Defense Cooperation* pada tahun 1997, hingga perubahan pada konsep pertahanan Jepang yang tertuang dalam NDPG (*National Defense Program Guidelines*). Lalu bagaimana dengan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Jepang?

Kapabilitas militer merupakan hal yang penting bagi sebuah negara terutama dalam penggunaannya untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya, baik yang berasal dari luar ataupun domestik, serta dapat digunakan dalam mengejar kepentingan negara. Kapabilitas militer adalah kemampuan sebuah kekuatan militer untuk dapat menjalankan bermacam operasi menghadapi musuh-musuh negara.⁹ Untuk dapat melihat dan mengukur kapabilitas militer sebuah negara, terdapat banyak cara serta indikator yang digunakan, akan tetapi indikator yang umum digunakan adalah dengan melihat jumlah kekuatan

⁸ John H. Miller, "Changing Japanese Attitudes Toward Security", dalam Satu P. Limaye & Yasuhiro Matsuda (Ed.), *Domestic Determinants and Security Policy-Making in East Asia* (National Institute for Defense Studies and the Asia-Pacific Center for Security Studies, 2000), hlm. 14

⁹ Ashley J.T., & Janice Bially, *Measuring National Power in the Postindustrial Age* (New York:Rand, 2000), hlm. 133

kuantitatif (*numerical preponderance*), teknologi, serta penggunaan kekuatan (*force employment*).¹⁰

Jumlah kekuatan (kuantitatif) yang sering digunakan untuk melihat kapabilitas militer suatu negara adalah melalui jumlah pasukan, jumlah alutsista, dan besar anggaran militer yang dikeluarkan negara tersebut.

Jika melihat jumlah pasukan dan jumlah alutsista yang dimiliki oleh Jepang secara umum, maka cenderung mengalami penurunan. Peningkatan secara kuantitatif terjadi pada masa program pembangunan pertahanan melalui *Basic Policy for National Defense* (BPND) yang dikeluarkan pada tahun 1957, sampai dikeluarkannya NDPG pada tahun 1976, yang merupakan doktrin pertahanan nasional Jepang yang pertama pasca perang. Semenjak NDPG 1976, Jepang lebih menekankan pada pengembangan pertahanan secara kualitatif dibandingkan kuantitatif. Secara kuantitatif, penurunan terjadi khususnya pada kekuatan darat (GSDF) dengan pemotongan yang terjadi pada MBT dan artileri yang dimilikinya, dan peningkatan lebih berfokus pada kekuatan laut, dengan rencana penambahan jumlah kapal selam dan *destroyer*, begitu juga dengan skuadron peringatan dini, *destroyer* Aegis dan SAM.¹¹ Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, peningkatan secara kuantitas juga terjadi pada sistem persenjataan baru yang tidak dimiliki sebelumnya oleh Jepang, seperti sistem pertahanan satelit dan sistem pertahanan misil balistik (*BMD/Balistic Missile Defense*).

Dengan tetap diserahkannya sebagian besar masalah keamanan kepada AS, Jepang dapat berkonsentrasi membangun kekuatan ekonominya pasca perang, hingga akhirnya dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia. Untuk mengatasi ketakutan dan kecurigaan pihak lain akan kebangkitan militer Jepang, pemerintah Jepang membatasi alokasi untuk anggaran pertahanan hanya 1% dari GDP negara semenjak tahun 1967, dibandingkan dengan negara besar (*great power*) lainnya, yang dapat mencapai 1.3 – 4% dari GDP.¹²

¹⁰ Stephen Biddle, *Military Power: Explaining Victory and Defeat In Modern Battle* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), hlm. 14-17

¹¹ The International Institute for Strategis Studies, *Military Balance 2011* (London: Taylor&Francis, 2011), hlm. 211

¹² Lihat "Japan's About-Face", <http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/japans-about-face/data-global-military-expenditures/1220/> diakses 21 Januari 2012, pukul 19.45

Jika melihat dari data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, anggaran pertahanan Jepang dilihat dari dua puluh tahun belakangan ini (1992-2010) cenderung fluktuatif. Akan tetapi masih dalam kerangka pertumbuhan yang positif, dimana selama kurun waktu dua puluh tahun tersebut Jepang mengalami pertumbuhan rata-rata anggaran pertahanannya sebesar 2.8%, dan masih tetap berada di bawah pembatasan anggaran 1% dari GDP.

Yang kemudian menjadi perhatian adalah bahwa angka 1% dari GDP tidak memberikan gambaran bahwa Jepang memiliki kapabilitas pertahanan atau militer yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang memiliki jumlah persen dari GDP yang lebih besar. Negara dengan kemampuan ekonomi yang besar seperti Jepang, walaupun hanya mengalokasikan bagian kecil dari kekayaannya untuk pertahanan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan kekuatan militer. Sebaliknya negara dengan kekuatan ekonomi yang kecil, walaupun memberikan persentase yang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya hanya dapat memberikan bagian yang terbatas sesuai besaran kekayaan yang dimilikinya terhadap pembangunan kapabilitas militernya. Sehingga angka 1% yang dimiliki Jepang kadang membelokkan kenyataan bahwa Jepang dapat mengalokasikan dana yang besar terhadap pembangunan kekuatan bersenjata. Terlepas dari politik 1% tersebut, Jepang merupakan salah satu negara dengan anggaran belanja militer terbesar di dunia.

Selain itu, Jepang sebenarnya telah melakukan cara lain untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan belanja militernya di tengah kungkungan jumlah persen GDP. Yang pertama adalah Jepang tidak memasukkan pensiun militer dan anggaran Japan Coast Guard (JCG) ke dalam anggaran pertahanan. Jepang meningkatkan anggaran dan kekuatan yang ditujukan untuk membangun JCG, yang menurut pasal 25 dalam *JCG Law* menyatakan bahwa kesatuan tersebut tidak dilihat sebagai sebuah kesatuan militer. Akan tetapi JCG bersifat paramiliter, seperti yang dikemukakan dalam pasal 80, dimana pada saat mobilisasi JSDF, JCG dapat digerakkan di bawah perintah Menteri Pertahanan. JCG sendiri telah memiliki kapal patroli kelas Shikisima, yang lebih besar dari kapal *destroyer* Aegis kelas Kongo yang dimiliki MSDF, dapat membawa dua

helikopter, serta dilengkapi dengan dua meriam kembar 35 milimeter, dan senapan 20 milimeter M61. Selain itu, JCG juga memiliki 55 buah kapal lebih dari 1000 ton, yang setara dengan *destroyer* kelas Hatsuyuki yang dimiliki MSDF. JCG juga memiliki kuasi-pasukan khusus dalam bentuk *Special Security Team* (SST), dan memiliki kapal patroli dan peringatan dini jarak jauh.¹³

Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pembayaran ditangguhkan (*deferred payments*). Cara ini telah digunakan semenjak tahun 70-an, yaitu dengan menyebar/memecah pengeluaran untuk sistem persenjataan dalam beberapa tahun ke depan.¹⁴

Jika dilihat secara umum jumlah kuantitatif dari pertahanan Jepang cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan. Akan tetapi jika kita melihat lebih dekat lagi, Jepang masih melakukan penambahan pengadaan alutsistanya, baik peralatan baru atau pun untuk menggantikan peralatan lamanya. Dan dengan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang dapat mensiasati pembatasan secara kuantitatif yang diterapkan dalam anggaran belanja pertahanannya.

Indikator selanjutnya untuk melihat kapabilitas militer adalah melalui teknologi yang digunakan dan dikembangkan (kualitatif). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang melalui interpretasi terhadap konstitusi pasal 9, hanya diperbolehkan untuk memiliki kekuatan minimum sebatas untuk pembelaan diri. Oleh karenanya JSDF tidak diperkenankan memiliki senjata ofensif seperti *long range strategic bomber*, *aircraft carrier*, serta *Inter-Continental Ballistic Missile* (ICBM).

Dalam kekuatan darat, persenjataan utama GSDF masih tetap berkuat pada artileri; tank, seperti Type-74 MBT dan penerusnya Type-90 MBT; serta juga dilengkapi dengan helikopter serang AH-64D *Apache Longbow*.¹⁵ Selain memperkenalkan unit M-90 MBT dengan berat 50 ton, GSDF juga mengembangkan MBT yang lebih ringan dan canggih yaitu TK-X (Tipe-10) dengan berat 44 ton yang lebih mudah untuk dibawa dan dipindahkan.

¹³ Christopher W. Hughes, "Japan's Military Modernisation: A Quite Japan-China Arms Race and Global Power Projection", *Asia-Pacific Review*, Vol. 16, No.1, 2009, hlm. 84-99

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89

¹⁵ Richard Tanter, "About Face: Japan's Remilitarisation", *Austral Special Report 09-02S*, Nautilus Institute, 2009, hlm. 27 – 30

Dalam hal kekuatan udara, Jepang memiliki sistem pertahanan udara yang canggih dengan menggunakan kombinasi pesawat tempur, sistem radar pengintai udara, dan pesawat pendukung. Pada tahun 2005, ASDF memiliki 474 buah pesawat, 200 buah diantaranya adalah pesawat tempur F15J/JD; 60 buah pesawat tempur bomber F-2; 60 buah pesawat tempur F-4, termasuk versi pengintai RF-4E/EJ; serta pesawat dengan fungsi peringatan dini yang canggih, pesawat pengangkut, dan juga KC-767, pesawat pengisi bahan bakar di udara.¹⁶ ASDF masih terus melakukan peningkatan kapabilitas dan modernisasi terhadap pesawat-pesawat tempurnya.

ASDF berencana untuk menggantikan pesawat fighter bomber F-4J yang lama dengan pesawat tempur F-X. Ketertarikan Jepang sebenarnya lebih kepada pesawat tempur F-22A *Raptor* dari AS, akan tetapi masih terhalang akan larangan dari pemerintah AS dengan alasan isu kebocoran informasi teknologi sensitif. Pilihan lainnya adalah Eurofighter *Typhoon* dengan perbandingan harga yang lebih rendah serta memperoleh hak untuk produksi domestik. Untuk mengisi kekosongan sementara akan harapan mendapatkan pesawat F-22A dari AS, Jepang mulai mengembangkan penelitian mengenai prototipe pesawat tempur siluman *Advance Technology Demonstration-X (ATD-X)*.¹⁷

Terhitung pada tahun 2006, MSDF memiliki 16 kapal selam, 54 kapal perang utama (*destroyer* dan *frigate*), dan juga 109 buah pesawat tempur anti-kapal selam Lockheed Orion P-3C. Selain AS, tidak ada kekuatan laut di Asia Timur yang dapat menandingi kecanggihan teknologi kekuatan laut milik MSDF.¹⁸

MSDF mempunyai tiga kapal pengangkut kelas Osumi, dengan dek datar untuk membawa dan tempat pendaratan helicopter, dan dok untuk mengangkut *hovercraft* yang berguna untuk mendaratkan tank. Selain itu MSDF akan mempunyai dua kapal pengangkut DDH (Destroyer-Helicopter) kelas Hyuga, dengan berat 13.500 ton (20.000 ton jika dilengkapi dengan bahan bakar dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁷ Christopher W. Hughes, *Japan's Remilitarisation* (New York: Routledge, 2009), hlm. 42-45

¹⁸ Richard Tanter, *loc.cit.*, hlm. 30

persenjataan), dan dengan standar dapat membawa 4 unit helikopter (3 unit helikopter SH-60J dan 1 unit MCH-101).¹⁹

Selain perkembangan di ketiga kekuatan utama JSDF tersebut, Jepang juga mulai mengembangkan sistem pertahanan misil balistik (*Ballistic Missile Defense/BMD*) bersama AS, yang memakan anggaran pertahanan paling besar selama 2004-2009. Lebih jauh lagi MSDF ingin mengkombinasikan BMD dengan enam kapal destroyer kelas *Kongo* dan *Atago* yang dilengkapi dengan sistem Aegis.²⁰ Selain itu, Jepang juga mulai menggunakan wilayah angkasanya dalam hal pengumpulan informasi dan pengintaian melalui pengembangan *Intelligence-Gathering Satellites (IGSs)*.

Tren tentang pengadaan dan pengembangan alutsista dan teknologi pertahanan Jepang tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah digambarkan oleh Desmond Ball terhadap perkembangan tren pengadaan dan pengembangan alutsista negara-negara di kawasan Asia Timur, termasuk di dalamnya adalah Jepang, setelah berakhirnya Perang Dingin. Tema umum yang terlibat di antaranya adalah C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*), pesawat tempur multi-fungsi, UAVs (*Unmanned Aerial Vehicles*), pesawat pengintai maritim, misil anti-kapal, kapal tempur permukaan, kapal Selam, EW (*Electronic Warfare*), Pasukan Khusus, dan kemampuan IW (*Information Warfare*).²¹

Faktor teknologi, khususnya IT, memegang peranan yang penting dalam perkembangan pertahanan Jepang. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan jaringan dan kemampuan C4ISR, meningkatkan kecepatan dan keterhubungan antar angkatan, terutama dalam hal komando dan kontrol, meningkatkan efektifitas dan efisiensi perang, memperluas ruang lingkup operasional, meningkatkan perlindungan sistem informasi penting, memperluas interoperabilitas dengan pihak lain, khususnya AS.

Indikator yang terakhir adalah penggunaan kekuatan (*force employment*). Penggunaan kekuatan disini lebih mengarah kepada bagaimana kita menggunakan

¹⁹ Christopher W. Hughes, *Japan Remilitarisation, op.cit.*, hlm. 45-46

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46

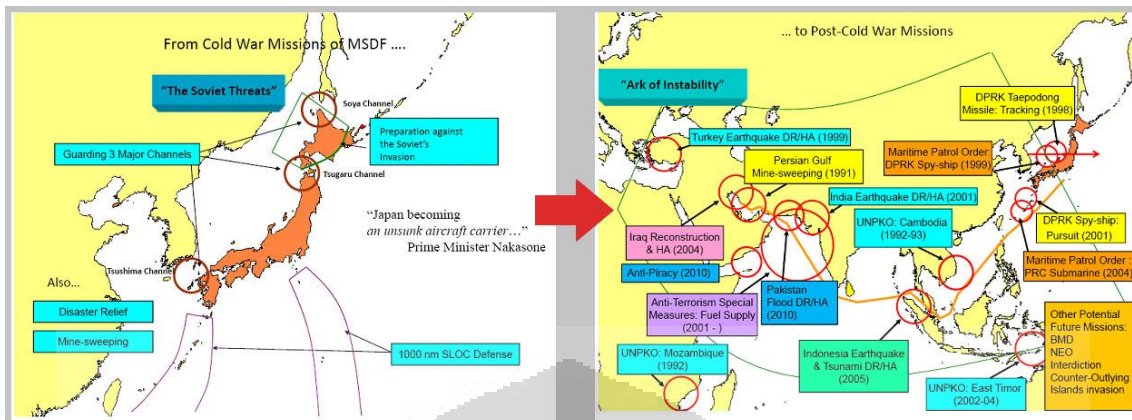
²¹ Desmond Ball, "Security Trends In The Asia-Pacific Region: An Emerging Complex Arms Race", *Working Paper* No. 380, Canberra: The Australian National University, Strategic and Defence Centre, 2003, hlm. 13

kekuatan dan sumber daya yang kita punya, bukan apakah kita punya atau tidak. Penggunaan kekuatan salah satunya dapat dilihat melalui doktrin pertahanan suatu negara, karena dalam doktrin tersebut akan dapat terlihat bagaimana negara ingin menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk kepentingan negara tersebut.

Jepang, sampai saat ini telah mengeluarkan empat NDPG yang berisikan doktrin nasional pertahanannya, yaitu NDPG tahun 1976, 1995, 2004, dan yang terakhir dan yang terbaru adalah NDPG tahun 2010. Terdapat pergeseran dan perkembangan penggunaan kekuatan yang tercantum di dalamnya. Dimulai perkembangan postur SDF melalui konsep pertahanan "*Basic Defense Force Concept*", yang menekankan pada pembangunan postur pertahanan pada level tertentu, yang lebih bersifat pasif untuk menciptakan daya tangkal, yang masih dipertahankan hingga NDPG tahun 2004, menjadi "*Dynamic Defense Force*" yang menuntut tindakan yang lebih aktif, yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer rutin berupa kegiatan intelijen, pengawasan dan pengintaian di dalam kondisi normal sekalipun.

Pergeseran ancaman juga ikut memperluas misi SDF, dimana ancaman tidak lagi dilihat hanya berupa ancaman keamanan tradisional, akan tetapi juga telah memasukkan ancaman non-tradisional ke dalamnya, seperti bencana alam, teroris, kemanusiaan, dan lainnya. Hal tersebut mencakup pengiriman SDF ke dalam misi bantuan kemanusiaan, bantuan bencana alam, PKO, hingga operasi anti-bajak laut.

Gambar 1.1. Perluasan Misi SDF



Sumber: Draft dalam *International Conference on Promoting Security Sector Reform in South Asia: Lessons from Japanese Experience* oleh Prof. Toshiya Hoshino.

Perkembangan penting lainnya yang dapat dilihat dalam NDPG adalah perluasan tanggung jawab pertahanan yang semakin diungkapkan secara eksplisit oleh Jepang. Jika dalam NDPG pertama Jepang hanya menitik beratkan pada pertahanan dalam negerinya untuk menciptakan efek tangkal terhadap invasi dalam skala kecil, dalam NDPG selanjutnya Jepang sudah mulai memasukkan wilayah “*surrounding region*” walaupun tidak didefinisikan secara jelas, dan pada NDPG 2004, Jepang memasukkan “*international security environment*”, hingga NDPG terbaru yang secara eksplisit mengungkapkan “*Asia-Pacific region*” dan “*global security environment*”. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kepercayaan diri Jepang yang semakin meningkat seiring berkembangnya peran dan tanggung jawabnya dalam dunia internasional.

Berdasarkan NDPG terbaru JSDF harus dapat mengembangkan kekuatan yang ‘multi fungsi, fleksibel, dan efektif’.²² Penekanan terhadap SDF yang ‘multi-fungsi, efisien, dan fleksibel’ menunjukkan bahwa pengejaran terhadap pengembangan kekuatan militer Jepang tidak harus mengejar kuantitas, akan tetapi lebih kepada kualitas kekuatan yang dimiliki, untuk menghadapi ancaman-ancaman baru. Selain itu, proyeksi kekuatan tidak lagi semata ke arah dalam (domestik) akan tetapi juga sudah mulai memperhatikan kestabilan keamanan

²² Lihat *Defense of Japan 2011*, hlm. 151, http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2011.html diakses pada 2 januari 2012, pukul 08.15

kawasan, dan juga peranannya dalam menjaga keamanan dunia internasional, khususnya dengan mempererat kerjasama aliansi keamanan AS-Jepang.

Dari ketiga indikator yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Jepang mengalami peningkatan kapabilitas militernya, walaupun tidak berfokus pada jumlah kuantitatifnya, akan tetapi lebih mengarah pada peningkatan kualitatif dan penggunaan kekuatannya.

Selain perkembangan tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan Jepang adalah kondisi politik dalam negeri yang juga mulai mengalami perubahan yang lebih memperhatikan mengenai isu keamanan. Tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, sekontroversial apapun itu, yang tidak melalui persetujuan Parlemen dan disahkan oleh Perundang-undangan. Dimulai dari pembentukan SDF, pengiriman pasukan ke luar wilayah Jepang, penggunaan pertahanan baru BMD, pengoperasian satelit pengintai, dan yang lainnya. Atau dalam hal lain ketika perdebatan mengenai kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang mulai marak dalam debat publik. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian dan kesadaran yang meningkat dari domestik Jepang terhadap permasalahan yang menyangkut mengenai keamanan Jepang.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang tersebut, paling tidak terdapat dua peristiwa penting yang turut mempengaruhi pengambilan kebijakan keamanan Jepang hingga pada saat ini, yaitu dampak perang dan serangan bom atom yang dijatuhkan oleh AS, serta pengadopsian konstitusi pasca perang, yang keduanya membentuk opini publik Jepang yang kuat mengenai anti-perang dan militerisasi. Hal tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan keamanan yang diambil oleh Jepang, yang memberi kesan pasifis untuk menghindari ketakutan berbagai pihak bahwa Jepang kembali pada masa lalunya sebagai negara ekspansionis, seperti penamaan angkatan bersenjata yang hanya digunakan untuk bela diri, prinsip non-nuklir, pembatasan anggaran belanja militer, dan lainnya.

Akan tetapi pada kenyataannya, terjadi pergeseran dan perkembangan dalam pengambilan kebijakan pertahanan Jepang, seperti yang terlihat dalam peningkatan kapabilitas militernya. Penelitian ini pada dasarnya akan diarahkan untuk melihat apa yang menyebabkan Jepang melakukan peningkatan kapabilitas pertahanannya, sehingga pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militernya?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis hubungan yang terjadi antara peningkatan kapabilitas militer Jepang dengan aliansi keamanan Jepang – AS. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menganalisa lebih jauh ke arah mana peningkatan kapabilitas militer Jepang akan mengarah dalam kerangka teori dilema aliansi.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerhati keamanan internasional dalam memahami peningkatan kapabilitas militer Jepang, dalam hubungannya dengan kerangka perjanjian keamanan antara Jepang-AS. Mengapa Jepang meningkatkan kapabilitas militernya, akan menjadi penting untuk dilihat dalam menanggapi isu remiliterisasi Jepang pasca perang di tengah adanya ketakutan akan kembalinya Jepang seperti pada masa lalunya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian serta kajian mengenai kekuatan militer Jepang maupun arah kebijakan pertahanan Jepang sudah cukup banyak dilakukan dalam konteks dan landasan yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jepang, sebagai salah satu negara besar, mempunyai pengaruh yang sangat penting di dalam stabilitas sistem internasional. Berbagai publikasi, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah telah dibuat untuk melihat perkembangan kekuatan militer Jepang dalam berbagai segi dan konteks. Tinjauan pustaka ini sendiri akan

melihat bagaimana sumber-sumber tersebut membahas mengenai kekuatan militer Jepang.

Sumber pustaka pertama adalah sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pasukan Bela Diri (*Self Defense Force*) Dan Masalah Pertahanan Jepang: Analisis Kebijakan Pertahanan Jepang.”²³ Secara garis besar, karya ilmiah ini hanya berupa pemaparan tentang kebijakan pertahanan Jepang secara umum serta faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya. Dimulai dengan pembahasan mengenai pertahanan Jepang yang dibangun di atas konstitusi pasifis yang diberlakukan setelah kalah dalam Perang Dunia II, serta sentimen anti militer yang kuat di dalam negeri, dan ketakutan akan kembalinya Jepang ke arah militerisme, karya ilmiah ini beranjak menuju sebuah kesimpulan dimana Jepang tetap dapat memiliki hak untuk dapat mempertahankan diri. Kebijakan pertahanan Jepang ditujukan pada pertahanan eksklusif, yaitu kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada serangan bersenjata, dan penggunaan kekuatan militer tersebut harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat agar sedapat mungkin tidak akan menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara lain dengan argumen bahwa kekuatan pertahanan yang dikembangkan hanya sebatas untuk mempertahankan diri.

Sumber pustaka selanjutnya adalah karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Persenjataan Di Asia Timur Antara China dan Jepang.”²⁴ Karya ilmiah ini ingin melihat bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur setelah terjadinya persaingan antara Jepang dan China melalui teori dinamika persenjataan oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan perhitungan matematis untuk melihat perbandingan kekuatan antara China dengan Jepang.

Dimulai dengan mengangkat modernisasi militer yang dilakukan oleh China yang lebih mengarah pada pengembangan senjata ofensif – walaupun China menyebutnya sebagai program *active defense* – membuat negara di kawasan,

²³ Oslan Amril, “Pasukan Bela Diri (Self Defense Force) Dan Masalah Pertahanan Jepang: Analisis Kebijakan Pertahanan Jepang”, Tesis Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia, 2006

²⁴ Mochamad Raga Saputra Pohan, “Dinamika Persenjataan Di Asia Timur Antara China dan Jepang”, Tesis program Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2010

dalam hal ini Jepang merasa terancam, sehingga juga melakukan peningkatan kapabilitas militer. Dalam perhitungan kekuatan, China jauh lebih unggul dibandingkan Jepang dengan perbandingan *force to force* 7:1, serta perbandingan senjata ofensif 2:1. Jika dilihat melalui *arms dynamics* yang dikemukakan oleh Barry Buzan, perkembangan kapabilitas militer China dikategorikan sebagai modernisasi militer, dengan pengembangan ke arah persenjataan ofensif. Sedangkan Jepang, dimana walaupun kewaspadaan terhadap China sangat tinggi, akan tetapi perbandingan persenjataan yang dimiliki oleh Jepang masih kalah jauh dari China, sehingga menempatkannya berada dalam kategori *arms maintenance*.

Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh faktor domestik China, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonominya yang pesat sehingga turut mempengaruhi perkembangan militernya. Jika dilihat melalui teori stabilitas sistem oleh Robert Gilpin, maka kondisi tersebut sedang berada dalam tahap *differential growth of power*, yang kemudian akan mengarah pada redistribusi kekuatan. Perubahan sebaran kekuatan tersebut, terlebih jika melihat perubahan kekuatan China yang lebih mengarah pada kekuatan ofensif membawa kawasan Asia Timur kepada tahap *disequilibrium of system*. Situasi tersebut terjadi karena peluang akan perlombaan senjata akan meningkat dan akan membuka peluang lebih besar akan terjadinya perang.

Sumber pustaka selanjutnya adalah karya ilmiah yang berjudul “The Right of State to Establish and Build Up Military Defence Capability: Japan As A Case Study.”²⁵ Karya ilmiah ini membahas mengenai apakah hukum internasional sebagai salah satu parameter yang digunakan dalam pembangunan kapabilitas pertahanan militer suatu negara dapat efektif membatasi suatu negara dalam menjalankan hak dasarnya untuk melakukan pembelaan diri yang diikuti dengan pembangunan kapabilitas militernya, dan mengambil Jepang sebagai contoh kasusnya.

Temuan yang dapat diambil dalam karya ilmiah tersebut antara lain, hukum internasional memang mempunyai peran dalam membatasi gerak negara dalam melakukan pembangunan militernya, permasalahannya adalah bahwa

²⁵ Hikmahanto Juwana, “The Right of State to Establish and Build Up Military Defence Capability: Japan As A Case Study”, Disertasi, University of Nottingham, 1997

hukum internasional tersebut tidaklah begitu efektif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu, masalah komitmen total dari seluruh anggota sistem internasional; keefektifan tergantung dari sensitifitas isu/permasalahan yang diangkat; mekanisme verifikasi yang ada; serta kebiasaan sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku.

Jepang merupakan salah satu dari sedikit contoh negara yang mematuhi batasan yang diterapkan oleh hukum internasional dalam membangun kapabilitas militer pertahanannya, seperti dalam hal kepemilikan senjata nuklir, atau penggunaan kekuatan militer untuk mengklaim wilayah sengketa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kasus Jepang tidak dapat dijadikan sebagai contoh kasus yang relevan, karena kepatuhan Jepang terhadap hukum internasional lebih dikarenakan sejarah Jepang melancarkan perang agresif, dan ingin menunjukkan bahwa Jepang tidak akan mengulang kesalahan yang sama.

Sumber pustaka lainnya adalah karya ilmiah yang berjudul “Missile Defense, U.S.-Japan Alliance and Sino-Japan Relations, 1983-2007.”²⁶ Disertasi ini membahas mengenai bagaimana perilaku Jepang mengalami perubahan dalam kurun waktu 1983-2007, dalam menanggapi program *Ballistic Missile Defense* (BMD).

Keikutsertaan Jepang dalam program *Strategic Defense Initiative* (SDI) pada tahun 80-an, lebih dikarenakan kepentingan ekonomi dan pertimbangan diplomatis, ketimbang karena faktor strategis semata. Pada tahun 90-an, setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak kejadian yang membuka mata Jepang mengenai betapa lemahnya posisi Jepang, baik dalam hal mempertahankan dirinya maupun dalam hal menopang sekutunya di dalam sebuah krisis keamanan. Hal tersebut dimulai ketika terjadinya Perang Teluk I dan juga krisis nuklir Korea pada awal 90-an, serta krisis Selat Taiwan. Hal tersebut ditambah dengan kecurigaan Jepang terhadap motif terselubung dibalik inisiatif yang diajukan oleh AS dalam penggunaan sistem pertahanan misilnya, terutama dalam hal kepentingan ekonomi teknologi, selain hal lain seperti masalah kontroversi

²⁶ Kaori Urayama, “Missile Defense, U.S.-Japan Alliance and Sino-Japan Relations, 1983-2007”, Disertasi, Boston University, 2008

batasan konstitusi, pertimbangan diplomatik (khususnya terhadap China), serta masalah anggaran, yang mewarnai perdebatan sekitar keikutsertaan Jepang dalam sistem pertahanan misil. Akan tetapi semua itu berubah dalam sekejap ketika terjadi tes misil oleh Korea Selatan pada tahun 1998, yang membawa Jepang secara bulat memutuskan untuk ikut serta dalam kerjasama penelitian sistem pertahanan misil bersama AS. Hal tersebut terus berlanjut dan berkembang setelah memasuki milenium baru, khususnya setelah terjadinya insiden 9/11, dan juga krisis nuklir Korea Utara dengan percobaan nuklir dan misilnya, membawa Jepang lebih gencar lagi dalam memperkuat kerjasama, khususnya dalam hal pertahanan misil dengan AS.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pemikiran keamanan, Jepang mengalami pergeseran ke arah yang lebih realis, dalam hal ini, jika dilihat dari perspektif mengenai sistem pertahanan misil. Sistem pertahanan misil balistik dilihat sebagai sebuah bentuk *hedging* terhadap kondisi keamanan di kawasan, khususnya dalam menghadapi ancaman Korea Utara dan kebangkitan China. Sistem pertahanan ini dianggap menarik karena dapat diklaim sebagai sebuah bentuk "*deensive defense*", selain memperkuat hubungan aliansi antara Jepang dan AS, sistem pertahanan misil balistik ini juga dilihat dapat meningkatkan peran dan kedudukan Jepang dalam aliansi tersebut. Dari penelitian tersebut, kemudian dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang berperan dan turut mempengaruhi Jepang dalam keikut-sertaannya dalam sistem pertahanan misil, diantaranya adalah perubahan politik domestik, industri pertahanan dalam negeri, hubungan dengan negara lain, perubahan situasi keamanan, serta hubungan aliansi antara Jepang dan AS.

Sudah cukup banyak tulisan, baik karya ilmiah, pasal ataupun buku yang menulis mengenai peningkatan pertahanan Jepang. Sebagian besar melihat ancaman yang dihadapi oleh Jepang di dalam kawasan, seperti kebangkitan China dan ancaman nuklir Korea Utara, sebagai hal penting yang menjadi salah satu pendorong Jepang meningkatkan kapabilitas pertahanannya, seperti melalui konsep *security dilemma* atau *arms dynamic*. Selain itu, ada juga yang melihat dari sudut pandang aliansi yang dijalin oleh Jepang dengan AS, walaupun belum banyak yang mengangkat secara detail bagaimana aliansi tersebut mempengaruhi

peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang. Oleh karenanya dalam tesis ini, penulis bermaksud untuk melihat fenomena peningkatan kapabilitas militer Jepang, yang akan difokuskan dari sudut pandang aliansi keamanan antara Jepang dan AS.

1.6. Kerangka Teori

Telah banyak sumber yang membahas mengenai peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang didorong oleh kondisi keamanan di dalam kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang cenderung tidak stabil dan memiliki potensi konflik yang tinggi antar negara di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari karakter kawasan yang diwarnai oleh dinamika pergeseran perimbangan kekuatan dalam kawasan, heterogenitas politik dan budaya, perebutan wilayah yang tersebar di dalam kawasan yang mengkombinasikan isu-isu sumber daya dengan nasionalisme post-kolonial, dan lainnya.²⁷

Beberapa isu keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur yang menjadi perhatian belakangan ini, khususnya bagi Jepang, diantaranya adalah isu nuklir Korea Utara, dan perkembangan serta peningkatan kapabilitas militer China. Korea Utara dianggap memiliki potensi bahaya langsung terhadap Jepang, yang diperkuat dengan perilaku aktor pemimpinnya yang sulit untuk diprediksi, yang ditunjukkan dengan melakukan provokasi-provokasi seperti tes misil balistik yang diarahkan ke wilayah Jepang pada tahun 1998, sampai pada tes misil jarak dekat-menengah serta tes nuklir pada tahun 2006. Sedangkan China dianggap menjadi ancaman yang lebih serius bagi Jepang dalam jangka waktu panjang. Buku putih pertahanan Jepang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dan peningkatan kapabilitas militer China, seperti kemajuan dalam teknologi misil jarak dekat dan menengah, kekuatan kapal selam, dan khususnya modernisasi teknologi persenjataan nuklir.²⁸

Teori Hubungan Internasional dapat memberikan sebuah kerangka berpikir yang berguna dalam memahami perkembangan dan perubahan yang

²⁷ Thomas J. Christensen, "China, The U.S.-Japan Alliance, and The Security Dilemma in East Asia", *International Security*, Vol. 23, No. 4, 1999, hlm. 49

²⁸ Emma C.A., & Mary B.N., *loc.cit.*, hlm. 3

terjadi di dalam kebijakan pertahanan Jepang pasca-perang. Salah satunya adalah realisme, paradigma yang sering digunakan dalam melihat perilaku negara dan kebijakan politik yang dijalankannya.

Pandangan realis awal seperti Thucydides melihat perang dan konflik adalah sebagai sebuah bagian dari politik internasional (hubungan antar negara) dan negara kecil sangat mungkin dikuasai oleh negara yang lebih besar yang akan terus menerus mencari kekuatan, seperti yang tergambar dalam “*The Melian Dialogue*”.²⁹ Realis klasik berpendapat bahwa negara, yang dianggap sama seperti manusia, mempunyai hasrat untuk mendominasi negara lain (karena sifat alamiah manusia)³⁰, yang mendorong mereka untuk berperilaku agresif yang tertuang dalam kebijakan luar negeri mereka dan percaya bahwa *balancing* melawan negara agresor merupakan sebuah elemen yang tak terelakkan dari hubungan internasional. Pemikir realis berpendapat bahwa kapasitas militer dan persekutuan merupakan dasar dari jaminan keamanan dan keduanya dapat digunakan baik untuk mengakibatkan ataupun mencegah konflik.³¹

Bagi para pemikir Neo-realis, seperti Waltz, mereka mengesampingkan sifat alamiah manusia dari teori mereka dan lebih menekankan pada sifat anarki dari sistem internasional dan pengaruhnya terhadap perilaku negara dalam kebijakan luar negerinya. Struktur dalam sistem internasional, di mana negara sebagai aktor utama dalam politik dunia, berada dalam sistem anarki dan setiap negara memiliki kedaulatan, sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi tingkatannya di atas negara. Dalam sistem yang anarki tidak ada kepastian bahwa negara yang satu tidak akan menyerang negara yang lain. Oleh karena timbul ketakutan dan ketidakpercayaan antar negara tersebut, negara akan memastikan dirinya mendapatkan kekuatan untuk dapat melindungi diri dari ancaman yang mungkin timbul dari negara lain untuk keberlangsungan negara itu sendiri.³² Glenn Snyder kemudian mengemukakan ide tentang dilema keamanan (*security*

²⁹ Viotti, P.R., & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory, 4th edition* (New York: Pearson Education, Inc., 2010), hlm. 78-89

³⁰ Ole R. Holsti, “Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and It’s Challenges”, dalam Charles W.Kengley (ed.), *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges* (New York: Saint Martin’s Press, 1995), hlm. 36

³¹ Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S., *International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2nd edition* (New York: Oxford University Press., 2010), hlm. 58-76

³² *Ibid.*, hlm. 77-94

dilemma). Negara berada di dalam sistem swa-bantu dikarenakan lingkungan internasional yang anarki, dan mereka harus memilih untuk mempersenjatai diri mereka sendiri untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka sendiri atau mencari cara lain untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembentukan aliansi.

Snyder menjelaskan, bahwa secara umum, pembahasan mengenai dilema keamanan digambarkan melalui persaingan persenjataan (*armaments game*) dimana perlombaan senjata dilihat sebagai sebuah hasil dari kompetisi untuk mendapatkan keamanan yang ilusif. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Jervis, yang mengamati struktur anarki dalam sistem internasional – bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari pada negara untuk dapat memediasi konflik yang terjadi antar negara, dan juga tendensi negara untuk memfokuskan pada kapabilitas militer yang dimiliki oleh negara lain, dapat mengarah kepada “*spirals of hostility*”.³³ Dilema keamanan dapat digambarkan sebagai situasi dimana ketika sebuah negara berusaha untuk meningkatkan keamanannya, akan menimbulkan ketidakamanan/ turunnya keamanan dari negara lain, karena merasa terancam oleh negara tersebut. Kondisi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tingkat keamanan itu sendiri.

Jervis berpendapat bahwa situasi dilema keamanan kemungkinan lebih besar terjadi jika berada dalam dua kondisi, yaitu ketika postur ofensif dan defensive tidak dapat dibedakan, serta ketika strategi ofensif lebih menguntungkan dibandingkan strategi (efektifitas strategi ofensif vs defensif). Kedua kondisi tersebut yang kemudian dijadikan Jervis sebagai variabel dalam teori dilema keamanan; *offense-defense differentiation* dan *offense-defense balance*.

Terkadang, secara implisit, dilema keamanan dilihat berjalan dalam konteks persaingan permusuhan (*adversary game*), yaitu kompetisi selain persenjataan, seperti yang dapat dilihat dalam persaingan antara AS dan Uni Soviet dalam Perang Dingin yang saling mengartikan aksi “defensif” masing-

³³ Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma”, *World Politics*, Vol. 30, No. 2, 1978, hlm. 167-214

masing pihak di Eropa sebagai tindakan yang “agresif”. Dan yang terakhir adalah dilema keamanan yang dilihat dari persaingan aliansi (*alliance game*).

Lebih jauh lagi Snyder menjelaskan bahwa dilema keamanan di dalam aliansi terbagi dalam dua fase, yaitu fase pertama yang muncul selama proses pembentukan aliansi, dan yang kedua adalah setelah aliansi terbentuk.

Di dalam fase pertama, setiap negara mempunyai dua pilihan yaitu membentuk aliansi atau abstain dari aliansi. Aliansi akan terbentuk antara lain karena dua alasan utama, yaitu: 1) sebagian negara mungkin tidak puas hanya dengan keamanan yang sekedarnya, dan mereka dapat meningkatkannya dengan beraliansi jika negara lain abstain, dan 2) sebagian negara di tengah ketakutan jika negara lain tidak akan mengambil jalan abstain, akan membentuk aliansi untuk menghindar dari pengucilan, atau untuk menghindarkan partner tersebut beraliansi melawan mereka.³⁴

Fase kedua adalah ketika aliansi telah terbentuk, dimana pertanyaannya tidak lagi berkutat pada apakah akan membentuk aliansi atau tidak, tetapi sudah bergeser menjadi seberapa jauh komitmen yang akan diberikan kepada partnernya, dan seberapa banyak dukungan yang akan diberikan kepada partner tersebut. Dalam penelitian ini, fase kedua dari *alliance game* inilah yang selanjutnya akan disebut dengan dilema aliansi.

Dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi sulit yang membingungkan.³⁵ Pilihan sebuah negara ketika berada di dalam sebuah aliansi adalah memilih untuk bekerja sama (*cooperate*) atau membelot (*defect*). Bekerjasama berarti memberikan komitmen yang kuat dan dukungan penuh terhadap partner aliansi dalam konflik dengan musuh. Sedangkan membelot berarti menunjukkan komitmen yang lemah dan tidak memberikan dukungan dalam konflik dengan musuh. Keduanya sama-sama akan menempatkan sebuah negara dalam pilihan yang sulit, dimana jika negara memberikan komitmen yang terlalu kuat terhadap partner, negara akan lebih besar

³⁴ Glen H. Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics”, *World Politics*, Vol. 36, No.4 (Juli 1984), hlm. 462

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

terkena resiko jeratan ke dalam konflik partner aliansinya (*entrapment*). Sedangkan jika memberikan komitmen yang samar dan lemah terhadap partner dalam aliansi maka akan terkena resiko ditinggalkan (*abandonment*).³⁶

Lalu apa yang menjadi faktor penentu pilihan dalam dilema aliansi tersebut, apakah memilih untuk bekerja sama ataukah untuk membelot, di tengah bayangan akan terjerat dalam konflik partner atau ditinggalkan oleh partner. Snyder mengatakan bahwa faktor penentu yang paling penting adalah ketergantungan (*dependence*) terhadap partner dalam aliansi tersebut – seberapa besar negara memerlukan bantuan satu sama lain – dan persepsi negara terhadap ketergantungan satu sama lain. Dimana semakin tergantung suatu negara, dan/atau semakin kurang tergantung partner, maka kemungkinan besar resiko ditinggalkan akan melebihi resiko terjerat, dan begitu pula sebaliknya.

Snyder kemudian membagi ketergantungan ini menjadi ketergantungan langsung, dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah kebutuhan negara terhadap bantuan partner, yang dapat dilihat dari 1) kebutuhan negara akan bantuan di dalam perang sebagai sebuah fungsi perpanjangan yang dikarenakan kapabilitas militernya jauh berada di bawah kapabilitas musuhnya, dengan kata lain perbandingan antara kapabilitas militer yang dimiliki negara dengan musuhnya, semakin besar jarak antara kekuatan keduanya, maka akan semakin besar ketergantungan negara terhadap bantuan partner dalam aliansi untuk membantunya jika terjadi konflik, dan sebaliknya; 2) kemampuan partner untuk memberikan bantuan, semakin besar kekuatan partner, maka semakin tergantung negara terhadapnya, sampai pada titik dimana kekuatan gabungannya dapat memberikan keamanan yang cukup; 3) tingkat tensi dan konflik negara dengan musuh, dimana semakin tinggi tensi dan konflik, maka semakin besar ketergantungan negara terhadap bantuan partnernya, 4) ada atau tidaknya alternatif lainnya untuk beraliansi ulang, dimana jika semakin banyak pilihan beraliansi maka akan semakin kurang tergantung negara dengan partnernya saat ini, dan sebaliknya.³⁷

³⁶ Glen H. Snyder, *loc.cit.*, hlm. 466-467

³⁷ *Ibid.*, hlm. 471-472

Sedangkan ketergantungan tak langsung adalah tingkat kepentingan strategis (*strategic interest*) yang dimiliki masing-masing pihak dalam mempertahankan satu sama lain. Dalam ruang lingkup aliansi, Snyder menjelaskan bahwa kepentingan strategis di sini adalah kepentingan untuk menjaga sumber daya kekuatan partner dari tangan musuh. Berbeda dari ketergantungan langsung yang mengacu pada kebutuhan akan bantuan dari partner jika negara diserang, kepentingan strategis dalam yang mempengaruhi ketergantungan tidak langsung ini mengacu pada kebutuhan untuk memblok peningkatan kekuatan musuh.³⁸

Gambar 1.2. Dilema Aliansi



Sumber: Diolah dari Glen H. Snyder, "The Security Dilemma In Alliance Politic", *World Politics*, Vol. 36, No. 4, 1984.

Dari keempat indikator tersebut kita dapat melihat bagaimana ketergantungan Jepang terhadap AS yang dapat mengerucutkan pada kemungkinan pilihan apa yang akan diambil oleh Jepang, apakah kerja sama atau pembelotan. Jika Suatu negara tidak begitu tergantung, atau memiliki tingkat ketergantungan yang kecil terhadap partnernya dalam aliansi maka resiko untuk terjat dalam peperangan yang dilakukan oleh partner akan lebih besar ketimbang resiko untuk ditinggalkan. Logikanya adalah jika resiko jeratan lebih besar, maka negara akan cenderung memilih strategi membelot, entah dengan memperlemah komitmen, mencari aliansi baru, dan seterusnya, dengan asumsi negara sebisa

³⁸ *Ibid.*, hlm. 472

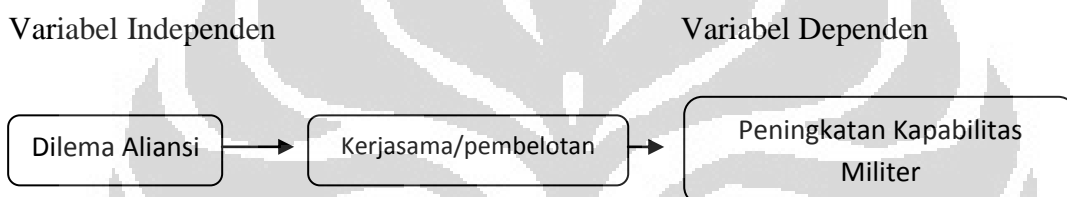
mungkin tidak ingin ikut terjerat dalam konflik partner, seperti yang dikatakan Snyder, bahwa negara akan cenderung memilih posisi aman, tidak terlalu dekat dengan jeratan dan juga tidak terlalu dekat dengan ditinggalkan. Sebaliknya jika negara memiliki ketergantungan yang besar terhadap partnernya dalam aliansi maka resiko untuk ditinggalkan akan jauh lebih besar. dan jika mengikuti logika di atas, negara memiliki dua kemungkinan, yaitu bekerja sama untuk memperkuat aliansi, atau dengan strategi membelot yaitu memperkuat negara untuk mengisi kekosongan yang saat ini diisi oleh partnernya atas dasar ketakutan akan ditinggalkan, terlepas dari tujuan untuk memperkuat aliansi dan lebih mengarah pada pelepasan diri dari aliansi.

Hipotesa

Kondisi Jepang lebih mengarah pada pilihan kedua, dimana tingkat ketergantungan Jepang terhadap AS besar. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan dan penguatan aliansi serta pergeseran arah kebijakan pertahanan Jepang pasca perang hingga kini. Seperti penguatan aliansi pada saat Perang Dingin di saat AS mengeluarkan *Nixon Doctrine*, dan AS berencana mengurangi keberadaannya di kawasan Asia, penguatan aliansi pasca Perang Dingin saat Jepang menyetujui untuk memperluas perannya terhadap AS di wilayah sekitar Jepang, bantuan terhadap perang Irak, sampai pengadaan sistem pertahanan yang meningkatkan interoperabilitas antara Jepang-AS, seperti BMD, pengadaan *fighter* baru, dan lainnya. Di sisi lain Jepang juga terlihat ingin mengurangi ketergantungannya dari AS, seperti yang terlihat dalam peluncuran dan pengembangan satelit pengintai Jepang atas dasar ketidak mampuan intel AS dalam memberikan informasi vital di saat terjadinya peluncuran misil balistik *Taepodong I* oleh Korea Utara ke arah wilayah Jepang, sampai penelitian dan pengembangan pesawat generasi selanjutnya Jepang ATD-X *Shinshin* karena larangan pembelian F-22 *Raptor* terhadap Jepang oleh Kongres AS. Akan tetapi apakah hal tersebut menunjukkan strategi pembelotan dalam aliansi yang mengarahkan Jepang untuk lepas darinya?

Jika ketergantungan Jepang besar terhadap AS sebagai partnernya dalam aliansi, maka resiko untuk ditinggalkan menjadi lebih besar dari resiko terjerat dalam konflik partner, dan kemungkinan besar strategi yang diambil oleh Jepang adalah kerja sama untuk memperkuat aliansi, walaupun tidak menutup kemungkinan strategi pembelotan diambil atas dasar ketakutan ditinggal, dimana keduanya sama-sama akan menghasilkan peningkatan kapabilitas militer. Secara sederhana peningkatan kapabilitas militer Jepang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3. Model Analisis



Hipotesa di awal penelitian ini adalah Jepang masih lebih mengarahkan strateginya pada kerja sama penguatan aliansinya dengan AS, dengan argumen bahwa peningkatan kapabilitas Jepang belum sampai pada pengadaan senjata-senjata yang dapat mengisi kekosongan dalam pertahanan Jepang, seperti senjata ofensif untuk memukul atau menyerang balik kekuatan yang menyerang Jepang, serta senjata nuklir yang dapat memberikan daya tangkal dari musuh yang menggunakan senjata pemusnah masal, serta ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS, terutama dalam platform persenjataan.

1.7. Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didasarkan pada logika deduktif, dimana penelitian dimulai dengan topik yang umum terlebih dahulu, lalu kemudian disempitkan pertanyaan penelitian dan hipotesis, yang kemudian diuji dengan bukti-bukti empirik. Perlu dicatat, meskipun menggunakan metode penelitian kuantitatif, namun penelitian ini tidak akan menggunakan kuantifikasi

terhadap variabel dan data-data penelitian, akan tetapi akan lebih menggunakan pendekatan deskriptif.

Sifat penelitian yang akan dilakukan bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, dimana di dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas, dan teori akan digunakan sebagai alat untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian.³⁹ Karenanya metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini bukan berfokus pada analisis statistika semata, namun lebih menekankan pada logika berfikir kausalitas antara variabel independen dan dependen dari penelitian. Melalui metode ini diharapkan dapat dihasilkan penjelasan secara ilmiah mengenai pengaruh hubungan aliansi keamanan Jepang – AS terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen dan literatur. Data yang akan digunakan untuk keperluan analisa dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pernyataan formal dari pemerintah, seperti situs resmi Departemen Luar Negeri Jepang, Buku Putih pertahanan Jepang, laporan program dan anggaran pertahanan Jepang, serta data alutsista Jepang yang akan dirangkum melalui buku *Military Balance* tahun 2002-2011. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, serta situs-situs internet.

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 27-28

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB 1, adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian;

BAB 2, akan membahas mengenai peningkatan kapabilitas militer Jepang, yang dimulai dengan memaparkan sejarah perkembangan kebijakan pertahanan Jepang yang dibagi dalam tiga sub-bab, yaitu pasca-perang, pasca Perang Dingin, dan pasca 9/11. Selanjutnya peningkatan kapabilitas militer Jepang akan dilihat melalui indikator-indikator seperti jumlah kuantitatif, teknologi dan juga penggunaan kekuatan;

BAB 3, akan membahas mengenai dilema aliansi yang terdapat dalam hubungan aliansi Jepang AS, melalui pengukuran ketergantungan Jepang terhadap AS dalam aliansi keamanan untuk melihat apakah Jepang berada dalam posisi terkena resiko *entrapment* atau *abandonment*. Yang kemudian dari sana kita dapat berangkat melihat kecenderungan Jepang terhadap pilihan dalam aliansi, yaitu untuk bekerja sama (*cooperate*) atau untuk membelot (*defect*);

BAB 4, akan menganalisa mengenai keterkaitan hubungan antar variabel, yaitu dilema aliansi terhadap peningkatan kapabilitas militer Jepang akan mengarah kepada *cooperation* atau *defection*. Serta menghubungkan keterkaitan antara kecenderungan pilihan dalam aliansi terhadap peningkatan kapabilitas Jepang;

BAB 5, Kesimpulan.

BAB 2

PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG

2.1. Sejarah Perkembangan Pertahanan Jepang

Perkembangan kekuatan militer Jepang pasca Perang Dunia II menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Jepang sering kali disebut sebagai raksaksa ekonomi dunia akan tetapi kerdil dalam politik internasionalnya. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan Jepang bangkit sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia setelah kalah dalam peperangan tidak dibarengi dengan kekuatan militer untuk menunjang keikutsertaannya dalam percaturan politik internasional.

Sebuah kekuatan militer yang tadinya menjadi salah satu pemain utama dalam kancah peperangan, seketika seperti dikebiri untuk tidak lagi diakui haknya untuk memiliki angkatan bersenjata dan potensi perang lainnya, seperti yang tercantum dalam konstitusi baru Jepang pasca Perang. Walaupun pada akhirnya atas dorongan dari Pasukan Pendudukan sendiri, Jepang dapat memiliki perangkat pertahanannya kembali yang dikenal dengan sebutan *Japan Self-Defense Force* (JSDF) atas dasar hak pembelaan diri.

Untuk dapat melihat dan memahami perkembangan pertahanan Jepang lebih jauh, maka kita harus melihat mengenai sejarah yang mengiringinya. Dalam sub-bab ini kita akan melihat dalam tiga bagian besar yang menandai pergeseran yang terjadi dalam pengambilan kebijakan pertahanan Jepang, yaitu pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II (selanjutnya akan disebut pasca perang), pasca Perang Dingin, dan pasca Insiden 9/11.

2.1.1. Pasca Perang

Jepang mengalami kekalahan dan menyerah pada pasukan AS dan sekutu dalam Perang Dunia II. Penyerahan diri Jepang kepada pasukan pendudukan membawa Jepang memasuki era transisi. Khusus dalam bidang militer, pasukan pendudukan ingin mematikan segala bentuk potensi perang yang dimiliki oleh Jepang melalui demiliterisasi. Hal tersebut yang kemudian tertuang dalam undang-undang baru yang diadaptasi oleh Jepang, khususnya dalam pasal 9, yang

kemudian sering disebut sebagai konstitusi damai, dimana Jepang tidak akan memiliki angkatan perangnya sendiri, dan tidak akan memulai perang. Konstitusi Jepang pasca perang didasarkan pada rancangan yang dipersiapkan oleh pasukan pendudukan melalui *Supreme Commander for the Allied Power (SCAP)*. Dan pasal 9 tersebut, dimasukkan sendiri oleh Jendral Douglas MacArthur, pemimpin pasukan pendudukan Jepang.⁴⁰

Akan tetapi ketika AS memutuskan untuk terjun dalam perang Korea, Jepang berada dalam posisi yang sulit, dimana Jepang harus menanggapi dorongan kuat dari AS yang menginginkan Jepang ikut menanggung beban dalam pengamanan wilayahnya sendiri karena mereka harus mengkonsentrasikan kekuatan mereka dalam peperangan tersebut, di sisi lain Jepang juga menghadapi resistensi terhadap remilitarisasi Jepang, baik dari publik Jepang sendiri maupun dari dunia luar, serta ketakutan bahwa Jepang akan terbawa dalam peperangan yang dilakukan oleh AS.

Akhirnya, pada bulan Juli tahun 1950, Jenderal MacArthur, atas kesediaan kerjasama dari Perdana Menteri Yoshida Shigeru dan kabinetnya, memerintahkan pendirian *National Police Reserve (NPR)*, yang terdiri dari 75.000 personel, untuk membantu pasukan pendudukan dalam menjaga kestabilan keamanan di Jepang. Di bawah tekanan besar dari AS yang mendorong Jepang untuk mengambil bagian dalam menanggung beban militer, Yoshida menyetujui untuk membangun kapabilitas pertahanan dengan syarat pengembalian kedaulatan Jepang dan jaminan perlindungan keamanan Jepang oleh AS. Untuk mengurangi kecurigaan terkait kontroversi remilitarisasi, kemudian pada tahun 1952, NPR diubah menjadi *National Safety Forces*, dan akhirnya menjadi *Self-Defense Forces (Jieitai)*⁴¹ pada tahun 1954, yang terdiri dari 165.000 personel.⁴²

⁴⁰ Jeff Kingston, *Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change Since the 1980s* (West Sussex :Willey-Blackwell, 2011), hlm. 4-5

⁴¹ Penamaan JSDF juga dipilih untuk menimalisir kekhawatiran mengenai bangkitnya militerisme Jepang pada masa perang dan menegaskan fungsinya sebagai kekuatan defensif, dimana dalam bahasa Jepang, penamaan JSDF tidak menggunakan kata *gun* (軍) yang berarti angkatan bersenjata/militer, akan tetapi menggunakan *tai* (隊) yang berarti kelompok, dalam *jieitai* (自衛隊), untuk menghindari kesan militer dari organisasi tersebut. Lihat Yuko Kurashina, "Peacekeeping Participation And Identity Changes In The Japan Self Defense Forces: Military Service as 'Dirty Work'", Disertasi, University of Maryland, 2005

⁴² Kenneth G. Henshall, *op.cit.*, hlm. 154

SDF terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *Ground Self-Defense Force* (GSDF), *Maritime Self-Defense Force* (MSDF), dan *Air Self-Defense Force* (ASDF). Kabinet pemerintahan Yoshida juga mendirikan *Japan Defense Agency* (JDA) sebagai sebuah badan administratif yang mengontrol SDF.

Konstitusi pasca perang, terutama pasal 9, memberikan dampak yang sangat besar bagi pengambilan keputusan kebijakan pertahanan Jepang. Semenjak pendiriannya, legitimasi SDF menjadi bahan perdebatan yang bahkan masih bergulir hingga saat ini. Pendirian SDF tidak bertentangan dengan konstitusi dengan didasari atas argumen bahwa konstitusi tidak menyangkal mengenai hak pembelaan diri sebagai sebuah hak dari bangsa yang berdaulat.⁴³

Jepang kemudian mendapatkan kembali kedaulatannya pada tahun 1952, setelah menandatangani *San Francisco Peace Treaty*, dan Jepang mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dari AS yang tercantum dalam *Mutual Security Assistance Pact*, yang ditandatangani pada tahun yang sama, yang kemudian digantikan dengan *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960, dimana Jepang memberikan hak kepada AS untuk mendirikan pangkalan militer di wilayahnya sebagai timbal balik atas perlindungan tersebut.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshida Shigeru (1946-47 dan 1948-1954), Jepang memfokuskan diri pada perbaikan dan pembangunan ekonomi, dan menyerahkan sebagian besar masalah keamanannya kepada AS. Kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai “*Yoshida Doctrine*”. Prinsip utama yang terkandung di dalamnya antara lain adalah: pasifisme, yang bersumber pada pasal 9 konstitusi Jepang pasca perang, dimana dengan alasan tersebut Jepang menolak dorongan AS untuk mempersenjatai kembali Jepang dalam skala penuh; aliansi keamanan dengan AS, dimana Jepang mendapatkan perlindungan dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan AS; dan merkantilisme yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekspor.⁴⁴ Kebijakan tersebut

⁴³ Richard Halloran, “Japan’s Military Force: Return of The Samurai”, *Parameters* (Fall-winter 1995), hlm. 32

⁴⁴ Henry Laurance, “Japan’s Proactive Foreign Policy and The Rise of The BRICS”, *Asian Perspective*, Vol. 31, No. 4, 2007, hlm. 179

berhasil membawa Jepang bangkit sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia.

Pada tahun 1957, Jepang mengumumkan kebijakan keamanan militernya sendiri yang disebut dengan *Basic Policy for National Defense* (BPND). Melalui BPND Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer SDF baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan dilakukan secara bertahap. Jepang mengeluarkan *Japan Defense Build Up Program* yang pertama (1958-61) yang mendasari peningkatan kuantitatif kekuatan GSDF untuk menggantikan penarikan pasukan darat AS dari wilayahnya. Lebih jauh lagi, Jepang mengeluarkan *Defense Build Up Program* yang kedua (1962-66) yang berisikan peningkatan kekuatan maritim dan udara SDF melalui penambahan pengadaan senjata, dan *Defense Build Up Program* yang ketiga (1967-71), yang berkonsentrasi pada peningkatan pertahanan laut Jepang secara kualitatif.⁴⁵ *Defense Build Up Program* yang keempat (1972-76) mengikuti kelanjutan dari pembangunan pertahanan sebelumnya.

Defense Build Up Program yang keempat awalnya diajukan untuk memperkuat lebih jauh lagi kekuatan udara dan laut yang dimiliki Jepang (ASDF dan MSDF), dengan proyeksi anggaran mencapai masing-masing 2.8 dan 2.3 kali lebih besar dari *Defense Build Up Program* yang ketiga untuk pengadaan alutsista. Akan tetapi upaya tersebut mendapat tentangan domestik yang kuat, dan juga melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, ketika terjadi *détente*/peredaan pada masa Perang Dingin, dimana ternyata masih ada skenario lain selain membayangkan terjadinya peperangan antara Timur dan Barat, sehingga rencana tersebut tidak jadi terlaksana, sehingga *Defense Build Up Program* yang keempat dilaksanakan sebagai penerus dari pembangunan pertahanan sebelumnya secara lebih membumi dibandingkan rencana awalnya.⁴⁶

Prinsip dasar yang terdapat dalam BPND kemudian dituangkan dalam *National Defense Program Guidelines* (NDPG) yang dikeluarkan pada tahun 1976 yang merupakan doktrin pertahanan nasional Jepang yang pertama pasca-perang. Di dalamnya disebutkan intensi Jepang untuk mengejar kebijakan

⁴⁵ Ke Wang, "Japan "Defense" Policy", *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 8, No. 1, 2008, hlm. 89

⁴⁶ Norman D. Levin, *Japan's Changing Defense Posture* (Santa Monica, CA: RAND, 1988), hlm. 5-6

pertahanan nasionalnya dalam kerangka *defence* dan *deterrence*, yaitu untuk menciptakan kekuatan pertahanan Jepang yang dapat menangkal secara efektif agresi dalam skala perang lokal dengan senjata konvensional. Dan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar, JSDF dilatih dan dipersenjatai untuk menahan serangan hingga pasukan AS datang untuk mengatasi serangan tersebut.⁴⁷

Ketakutan akan penarikan pasukan AS setelah Perang Vietnam, pembangunan militer Soviet, serta kembali memanasnya Perang Dingin pada akhir 70-an mendorong penguatan kerja sama keamanan antara AS dan Jepang. Dan pada tahun 1978 kedua belah pihak megadopsi *US-Japan Defense Cooperation*.

Kebijakan pertahanan Jepang pasca perang diwarnai oleh kebijakan pasifis yang dihasilkan atas pembatasan dari konstitusi Jepang, terutama pasal 9. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pertahanan Jepang yang masih mempunyai pengaruhnya hingga saat ini, seperti tiga prinsip non-nuklir (Jepang tidak akan memproduksi, memiliki dan memperkenalkan senjata nuklir ke dalam wilayah Jepang) yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Sato pada tahun 1968, pembatasan anggaran belanja pertahanan di dalam batas satu persen dari GDP pada tahun 1976, serta perketatan larangan ekspor senjata – yang awalnya hanya berlaku untuk negara-negara Komunis, negara-negara yang terlibat konflik, atau negara-negara yang karna satu dan lain hal masuk ke dalam daftar hitam PBB, menjadi pelarangan ekspor persenjataan atau instalasi yang berhubungan dengan persenjataan ke semua negara.

Banyak pihak yang memandang bahwa kebijakan pertahanan Jepang pasca perang didominasi oleh kebijakan yang bersifat minimalis dan reaktif.⁴⁸ Jepang digambarkan sebagai negara yang pasif, hanya menjadi “penunggang gelap” dari negara lain seperti AS, serta tidak ingin mengambil resiko. Calder

⁴⁷ Tomohisa Sakanaka, “Military Threats and Japan’s Defense capability”, *Asian Survey*, Vol. 20, No. 7, 1980, hlm. 767

⁴⁸ Lihat Jeffrey Kingston, *Japan in Transformation 1953-2000* (Edinburg Gate: Pearson Education Limited, 2001), hlm. 60; Kent Calder, “Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State”, *World Politics*, Vol. 40, 1988; Keiko Hirata, “Japan as a Reactive State?: Analyzing the Case of Japan-Vietnam relations”, *Japanese Studies*, Vol. 18, No. 2, 1998

mendefinisikan kebijakan luar negeri reaktif sebagai sebuah dorongan untuk melakukan perubahan kebijakan lebih disebabkan karena adanya dorongan dari luar (Calder, 1998). Hal tersebut dilakukan Jepang ketimbang mengambil inisiatif atau mengemukakan pandangan strategisnya sendiri.

Meskipun demikian di bawah konstitusi yang sama, Jepang tetap menyesuaikan postur pertahanannya, baik dari segi persenjataan maupun peranan dan misi SDF untuk menghadapi ancaman yang muncul, serta dorongan dari luar, khususnya dari AS, dengan interpretasi yang dianggap masih dalam konteks kebijakan pertahanan Jepang yang defensif.

Seerti pada tahun 1981, Perdana Menteri Zenko Suzuki menyatakan dalam salah satu pidatonya di Washington, bahwa Jepang akan mengembangkan fungsi dan peranannya dalam pertahanan yang mencakup 1.000 nautical mil dari batas laut ke arah selatan dan tenggara. Pada tahun 1983, Perdana Menteri Nakasone, menyatakan bahwa peran Jepang adalah sebagai “kapal induk yang tak dapat ditenggelamkan” bagi AS. Ia kemudian juga mendukung alih teknologi pertahanan Jepang pada AS pada bulan Januari 1983, dan keikutsertaan Jepang dalam penelitian SDI⁴⁹ (*Strategic Defense Initiative*) pada tahun 1986.⁵⁰

Pada saat Perang Dingin berlangsung Jepang menjadi benteng pertahanan bagi AS, yang digunakan untuk menangkal serangan dan pengaruh komunis di Asia Pasifik, terutama melihat faktor strategis geografis Jepang, dimana satu-satunya pintu masuk ke arah Pasifik dari Laut Jepang adalah melalui Selat Tsushima, Selat Tsugaru, dan Selat Soya.⁵¹

2.1.2. Pasca Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet membawa perubahan signifikan dalam kondisi keamanan kawasan di Asia Timur. Begitu pula halnya dengan Jepang. Uni Soviet yang juga menjadi ancaman bagi keamanan Jepang pada masa Perang Dingin, tidak lagi hadir. Hal tersebut

⁴⁹Program yang dikemukakan oleh Presiden AS Ronald Reagan pada tahun 1983, yaitu strategi penggunaan sistem pertahanan berbasis darat dan angkasa untuk melindungi AS dan sekutunya dari serangan misil balistik nuklir

⁵⁰Masashi Nishihara, “Japan’s Gradual Defense Build Up and Korean Security”, *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 1, No. 1, 1989, hlm. 104

⁵¹Tomohisa Sakanaka, *loc.cit.*, hlm. 770

merubah tatanan perimbangan kekuatan kawasan, dimana AS mulai mengurangi kehadirannya di kawasan Asia dalam skala besar, sehingga menyebabkan Jepang harus memikirkan kembali kebijakan keamanannya.

Selama tahun 90-an, Jepang mulai beranjak dari postur pasifis-isolasionis yang mendominasi kebijakan pertahanan Jepang pasca perang. Sikap Jepang berubah menjadi lebih aktif dalam merespon kondisi yang terjadi dalam tatanan dunia internasional. Seiring dengan perkembangan kekuatan ekonominya yang membuat Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Jepang mulai mengekspresikan keinginannya untuk menjadi salah satu kekuatan besar di dunia, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal keamanan untuk mendukung kestabilan sistem internasional maupun kawasan.

Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan Jepang untuk mendapatkan kursi permanen dalam Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Jepang juga mulai memperluas cakupan operasi dan misi yang diemban untuk SDF, seperti pengiriman untuk Operasi Penjaga Perdamaian (UNPKO), atau untuk tujuan bantuan bencana alam, sampai pada operasi non-PBB. Jepang juga menjadi lebih sensitif dan peka terhadap perubahan kekuatan dan kondisi keamanan kawasan maupun global, yang juga kemudian terkait dengan meluasnya interpretasi terhadap batasan yang diterapkan dalam konstitusi pasca perang dan kebijakan pertahanannya.

Perubahan dalam kebijakan pertahanan Jepang tersebut dimulai ketika terjadi Perang Teluk pada tahun 1990-91, dimana AS dan sekutu mendorong Jepang untuk ikut berkontribusi dan memberikan bantuan berupa personel militer, dana dan juga perlengkapan dalam krisis tersebut. Atas dorongan yang kuat tersebut, akhirnya Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan finansial sebesar 13 milyar US Dolar, tanpa mengirimkan pasukannya ke wilayah konflik, karena legislasi yang diharapkan menjadi dasar hukum untuk mengirimkan pasukan SDF ke wilayah Teluk tidak berhasil disahkan karena kurangnya dukungan di Parlemen.⁵²

⁵² John H. Miller, *loc.cit.*, hlm. 16

Tindakan Jepang tersebut menuai kritik internasional, yang menyebutkan bahwa Jepang melakukan apa yang disebut sebagai “*checkbook diplomacy*”. Hal tersebut menjadi sebuah pukulan yang memalukan bagi Jepang di dalam pergaulan dunia internasional. Sebuah negara yang mengeluarkan dana bantuan begitu besar, akan tetapi tidak mendapatkan pengakuan dan hanya mendapatkan kritikan dan cemoohan. Sumber kritikan tersebut berasal dari sikap pasif Jepang yang menggunakan pendekatan yang tidak beresiko bagi mereka, sementara membiarkan pasukan sekutunya melakukan pekerjaan berbahaya di medan tempur, padahal hal tersebut juga berhubungan dengan kepentingan strategis yang vital bagi Jepang – akses terhadap minyak.⁵³ Oleh karenanya setelah itu Jepang kemudian mengirimkan SDF untuk melakukan operasi sapu ranjau ke Teluk Persia pada bulan April 1991. Akan tetapi hal tersebut dinilai terlambat dan kritikan pun terus berlanjut. Salah satunya adalah sebuah iklan dari warga Kuwait yang muncul di *New York Times* yang berisi ucapan terima kasih yang ditujukan pada masyarakat dunia internasional yang telah membantu dalam konflik tersebut, dan Jepang tidak disebutkan di dalamnya.⁵⁴

Di tengah kritikan yang berdatangan dari dunia internasional yang mempermalukan Jepang, seorang politisi partai konservatif yang berkuasa, Ichiro Ozawa, memunculkan perdebatan mengenai wacana Jepang untuk menjadi negara ‘normal’. Bagi Ozawa normal berarti Jepang harus memikirkan kembali pembatasan konstitusional dalam postur keamanannya yang membuat Jepang dapat merespon secara efektif krisis dan ancaman militer. Ia memandang bahwa Jepang telah gagal dalam tes kepemimpinan dengan tidak mengambil tanggung jawab yang harusnya diembannya mengingat pengaruh dan kekuatan globalnya. Karena Jepang tidak bisa hanya tinggal diam melihat sementara negara-negara lain menanggung beban keamanan dan penjaga perdamaian. Ia memainkan peranan penting dalam meloloskan undang-undang *International Peace Cooperation Law* (atau lebih dikenal dengan *PKO Law*) yang disahkan pada bulan Juni 1992.⁵⁵ Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah Jepang

⁵³ Jeffery Kingston, *op.cit.*, hlm. 63

⁵⁴ Tang Siew Man, “Japan’s Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japan’s Strategic Focus in the 21st Century”, *Akademika*, Vol. 70, 2007, hlm. 121

⁵⁵ Jeffery Kingston, *op.cit.*, hlm. 63

untuk mengirim SDF dalam operasi penjaga perdamaian di bawah *United Nations Transitional Authorities in Cambodia* (UNTAC).⁵⁶

Undang-undang tersebut kemudian menjadi sebuah batu loncatan bagi Jepang, untuk dapat berperan lebih aktif dalam dunia internasional, termasuk dalam pengiriman SDF ke misi-misi penjaga perdamaian lainnya serta pengiriman ke wilayah bencana alam di bawah PBB. Akan tetapi, interpretasi terhadap konstitusi yang dilakukan tetap membatasi Jepang, dimana pengiriman personel SDF bukanlah dilakukan sebagai sebuah pengiriman misi tempur. PBB menjadi sebuah wadah bagi Jepang untuk dapat menunjukkan niatannya untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan kestabilan dunia internasional, sekaligus untuk menjaga dan membangun kembali kepercayaan dari dunia luar, khususnya negara-negara Asia lainnya, semenjak pertama kali kembalinya pasukan Jepang di luar wilayahnya setelah masa perang di bawah UNPKO.

Pada tahun 1993, Korea Utara memutuskan untuk keluar dari NPT dan melakukan uji coba misil balistik dan program nuklirnya. Hal tersebut membuat kondisi keamanan di Asia Timur pada saat itu memanas, ketika AS merespon dan bersiaga untuk peperangan yang mungkin pecah di Semenanjung Korea. Pada saat itu, AS meminta Jepang untuk memberikan bantuan logistik selain penggunaan pangkalan militer AS di Jepang. AS juga meminta Jepang untuk mengirimkan SDF dalam misi blokade naval dan juga sapu ranjau di wilayah perairan Korea.⁵⁷ Akan tetapi, pemerintah Jepang tidak dapat memenuhi permintaan AS tersebut pada saat itu, dan tidak siap dengan keadaan semacam itu. Walaupun pada akhirnya perang tidak terjadi di kawasan tersebut.

Berakhirnya Perang Dingin tidak menjadi jaminan turut berakhir pula masalah keamanan di kawasan Asia Timur. Jepang menyadari bahwa kerangka multilateralisme yang tengah diperjuangkannya belum dapat menggantikan kerjasama keamanan bilateral yang diberikan dalam kerangka aliansi keamanan AS-Jepang. Kejadian pada Perang Teluk, dan kemudian disusul dengan krisis

⁵⁶ Yoshihide Soeya, "Redifining Japan's Security Profile: International Security, Human Security, and an East Asian Community", 2004. Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional IIPS, Tokyo, Jepang

⁵⁷ Glenn Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, & Hugo Dobson, *Japan's International Relations: Politics, Economics and Security* (London: Routledge, 2001), hlm. 220

Semenanjung Korea pada tahun 1993, memberikan sinyal bahwa Jepang telah gagal dalam merespon panggilan AS untuk memberikan bantuan dalam krisis keamanan yang terjadi, yang dapat meruntuhkan kepercayaan dalam aliansi AS-Jepang yang saat itu tengah melemah di antara keduanya. Hal tersebut kemudian mendorong Jepang untuk memperkuat aliansi keamanan AS-Jepang.

Jepang kemudian memperluas perannya dalam kerangka aliansi keamanan AS-Jepang untuk memberikan bantuan logistik dan lainnya terhadap pasukan AS jika terjadi keadaan darurat di daerah sekitar Jepang yang dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan Jepang. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan antara Presiden Clinton dan PM Hashimoto pada tahun 1996, dengan landasan bahwa kejadian seperti pada saat Perang Teluk dan Krisis Korea tidak akan terulang. Kesiapan Jepang untuk bekerjasama secara militer dengan AS dalam menjaga keamanan regional tersebut kemudian tertuang dalam rancangan *US-Japan Guidelines for Defense Cooperation* pada tahun 1997, yang disahkan pada tahun 1999.

Perubahan kondisi keamanan di Asia Timur memegang porsi besar dalam mempengaruhi pergeseran kebijakan keamanan Jepang. Diantaranya adalah uji coba misil dan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tahun 1993, serta peningkatan kapabilitas militer China, termasuk di dalamnya uji coba nuklir dan misil, khususnya “diplomasi misil” yang dilakukan oleh China untuk mengintimidasi Taipei, dalam krisis Teluk Taiwan pada tahun 1995-96.

Selanjutnya, uji coba misil balistik Korea Utara yang diarahkan ke wilayah Jepang pada tahun 1998 membuat Jepang semakin tersadar bahwa mereka sangat rentan akan serangan militer ke wilayah mereka. Atas desakan publik yang kuat dalam merespon insiden tersebut, Jepang kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam penelitian bersama dengan AS dalam sistem pertahanan misil (*BMD/Ballictic Missile Defense*). Selain itu untuk mengurangi ketergantungan Jepang terhadap AS yang berhubungan dengan informasi intelijen vital yang berkaitan langsung terhadap keamanan nasionalnya, Jepang juga membangun program pengembangan sistem pengintai satelit independen sebagai peringatan dini atas peluncuran misil yang dapat membahayakan keamanan Jepang.⁵⁸

⁵⁸ John H. Miller, *loc.cit.*, hlm. 17-18

2.1.3. Pasca 9/11

Serangan 11 September 2001 yang ditujukan pada *World Trade Center* dan Pentagon membuka lembar baru keamanan internasional ketika AS menyerukan kepada dunia internasional kebijakan “*war on terror*” yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Bush.

Seperti tidak ingin mengulangi kesalahannya ketika Perang Teluk setelah Perang Dingin berakhir, dimana Jepang hanya mengandalkan “*checkbook diplomacy*”-nya, Jepang merespon dengan segera panggilan AS tersebut, sebagai salah satu bagian anggota dari dunia internasional dan juga sebagai partner AS dalam aliansinya. Jepang kemudian mengadopsi undang-undang baru yang kembali memperluas interpretasi terhadap pasal 9 konstitusi pasca perang Jepang. Undang-undang baru tersebut antara lain adalah, *Anti-Terrorism Special Measure Law* tahun 2001, *Law on Armed Contingency in Japan* tahun 2003, dan *Law Concerning the Special measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq*. Undang-undang tersebut ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi Jepang untuk ikut ambil bagian dalam *Operation Enduring Freedom* (OEF) di Afghanistan, dan *Operation Iraqi Freedom* (OIF) di Irak.

Anti-Terrorism Special Measure Law yang dikeluarkan pada tahun 2001, membuat Jepang dapat mengirimkan bantuan untuk suplai logistik dan transportasi, begitu juga dengan perbaikan, perawatan dan aktivitas medis ke/untuk negara lain yang berlokasi di dalam wilayah Jepang, Samudera Hindia (termasuk Teluk Persia), Diego Garcia, wilayah Australia, dan wilayah dari negara-negara yang terletak di garis pantai Samudera Hindia dan wilayah dari negara-negara di sepanjang rute yang terletak di antara wilayah-wilayah yang telah disebutkan sebelumnya.⁵⁹

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut Jepang dapat mengirimkan SDF untuk memberikan bantuan humanitarian dan non-tempur kepada AS dan pasukan multinasional. Selama Perang Afghanistan, Jepang telah mengirimkan kapal sapu ranjau, *destroyer*, dan juga kapal *Coast Guard*-nya untuk

⁵⁹ Lihat “Outline of the Basic Plan regarding Respones Measures Based on the Anti-Terrorism Special Meassure Law” http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/terro0109/policy/plan_o.html diakses pada 12 Februari 2012, pukul 20.10

mengawal kapal induk AS *Kitty Hawk* dari pangkalan laut Yokosuka. Selain itu Jepang juga mengirimkan kapal-kapal MSDF seperti *Hamana*, *Kurama*, dan *Kirisame* ke Samudera Hindia. Kapal-kapal ini bertugas untuk memberikan bantuan garis belakang untuk pengisian bahan bakar dan keperluan logistik kepada kapal-kapal pasukan koalisi.⁶⁰

Law on Armed Contingency in Japan yang dikeluarkan pada tahun 2003 adalah seperangkat undang-undang darurat yang ditujukan untuk merespon jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang. Undang-undang tersebut memiliki tiga aspek penting, yaitu, yang pertama adalah meningkatkan reliabilitas kerjasama keamanan antara AS dan Jepang. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan internasional dan membantu untuk memperkuat tatanan internasional. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan respon Jepang jika terjadi serangan bersenjata dan atau kejadian darurat lainnya.⁶¹

Law Concerning the Special measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq ditujukan untuk memberikan bantuan dalam usaha rekonstruksi di Irak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Jepang untuk mengirimkan SDF dan personel pendukung untuk memberikan dukungan medis dan juga suplai air, rehabilitasi dan perawatan fasilitas publik sambil menjaga hubungan dekat dengan badan dan negara lain yang terkait untuk tujuan koordinasi.

Pengiriman SDF ke Irak paling tidak menunjukkan dua hal penting dalam perubahan kebijakan keamanan Jepang, yaitu bagaimana Jepang merespon keadaan keamanan internasional yang sedang berkembang dalam kerangka kepentingannya sendiri dan juga sebagai anggota dunia internasional yang turut bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan keamanan internasional, dan di sisi lain adalah sebagai partner yang dapat diandalkan oleh AS. Seperti yang dikemukakan oleh Shigeru Ishiba, mantan Direktur Jendral JDA, dua alasan pengiriman pasukan ke Irak adalah untuk memenuhi kepentingan nasional Jepang

⁶⁰ Arpitha Mathur, "Japan's Changing Role in the US-Japan Security Alliance", *Strategic Analysis*, Vol. 28 No. 4, 2004, hlm. 509

⁶¹ Lihat "Legislation on the Response in the case of an armed attack and other such emergency and Japan's Foreign policy", <http://www.mofa.go.jp/policy/security/legislation.html> diakses pada 12 Februari 2012, pukul 20.55

dengan membawa stabilitas kawasan yang menjadi sebagian besar sumber impor minyak Jepang berasal, dan yang kedua adalah untuk memperkuat aliansi AS-Jepang.⁶²

Keikutsertaan SDF dalam “*war on terror*” telah memperluas cakupan geografis dalam pengembangan misinya melewati wilayah Asia Timur. Hal tersebut tertuang dalam doktrin kemanan nasional – *National Defence Programme Guidelines* (NDPG), yang dikeluarkan pada tahun 2004, yang mencakup peranan global baru yang diemban oleh Jepang, yaitu “*to improve the international security environment*”⁶³ atau ikut menjaga keamanan lingkungan internasional.

Pengiriman SDF ke luar wilayah Jepang kembali mengalami perkembangan ketika disetujuinya *Anti-Piracy Law* pada tahun 2009, yang melegalkan pengiriman SDF untuk mengawal kapal-kapal komersial asing dari serangan pembajak di Teluk Aden dan Perairan Somalia, dan memberikan wewenang kepada SDF untuk melancarkan serangan terhadap kapal pembajak jika terpaksa atas alasan pembelaan diri. Operasi tersebut telah berlangsung dari 28 Juli 2009 sampai 30 Juni 2011, dan telah diperpanjang selama setahun dimulai dari 23 Juli 2011. Hal penting lainnya yang patut dicermati adalah pembangunan pangkalan SDF di luar wilayah Jepang, yang didirikan di Djibouti, negara tetangga Somalia, untuk mendukung operasi tersebut. Ini adalah pertama kalinya Jepang mendirikan pangkalan di luar wilayahnya semenjak Perang Dunia II.⁶⁴

Selain kondisi kemanan global, kondisi keamanan kawasan Asia Timur yang tidak menentu juga menjadi perhatian khusus bagi keamanan Jepang. Dalam Buku Putih Pertahanan 2004, Jepang untuk pertama kalinya menyatakan secara eksplisit menjadikan Korea Utara dan China sebagai sebuah ancaman bagi keamanannya. Korea Utara dianggap sebagai ancaman jangka pendek terhadap keamanan Jepang atas uji coba misil balistiknya dan program nuklirnya. Sedangkan China dianggap memiliki ancaman dalam jangka panjang, atas

⁶² Arpitha Mathur, *loc.cit.*, hlm. 509

⁶³ *Defense Of Japan 2011*

⁶⁴ Lihat “Establishment of Facility for counter-piracy mission in Djibouti”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no23/topics01.html> diakses pada 13 Mei 2012, pukul 21.10

peningkatan dan modernisasi postur militernya, dibarengi intensinya yang dianggap tidak transparan.

Krisis Nuklir Korea Utara yang kedua pada tahun 2002-2003 mendorong Pemerintahan Koizumi untuk melanjutkan akselerasi dari penelitian BMD antara AS dan Jepang yang telah disepakati sebelumnya. Pada bulan Agustus 2003, JDA menyerahkan permohonan anggaran yang berkaitan dengan BMD untuk tahun anggaran 2004 kepada Kementerian Keuangan untuk pertama kalinya. Dan pada bulan Desember di tahun yang sama Pemerintah Jepang memutuskan untuk memperkenalkan sistem BMD. Komitmen pemerintah Jepang terhadap BMD dapat dilihat pada NDPG tahun 2004, yang diikuti dengan penandatanganan MOU kerja sama BMD antara Jepang dan AS. Pada tahun 2007, pemerintahan Abe Shinzo memasang sistem pertahanan misil yang berbasis di darat yang pertama, yaitu *Patriot Advanced Capability-3* (PAC-3). Kemudian menyusul 4 unit kapal *Aegis* kelas *Kongo*, *Chokai*, *Myoko*, dan *Kirishima* yang juga dilengkapi dengan BMD, melalui pemasangan misil SM-3 di dalam VLS (*Vertical Launch System*) di kapal-kapal tersebut, yang mulai beroperasi semenjak November 2009.⁶⁵

Selain itu, uji coba peluncuran misil Korea Utara pada tahun 2006, serta ketertinggalan Jepang dari negara besar lainnya, khususnya China dalam hal pertahanan angkasa, melalui kesuksesan uji coba senjata anti-satelit yang dilakukan oleh Beijing pada tahun 2007, menjadi sebuah tamparan bagi Jepang, yang mendorong Pemerintahan Fukuda Yasuo meloloskan undang-undang keangkasaan yang memperbolehkan Jepang untuk menggunakan wilayah angkasa untuk tujuan pertahanan yang kemudian membuka jalan SDF untuk mengakuisisi satelit peringatan dini yang berguna untuk mendeteksi peluncuran misil.

Antara tahun 2003 dan 2007 Jepang telah meluncurkan 4 unit IGS (*Intelligence-Gathering Satellites*), 2 unit menggunakan sistem optikal dan 2 unit lainnya menggunakan sistem SAR (*Synthetic-Aperture Radar*). Satelit tersebut telah disetujui penggunaannya untuk memonitor pangkalan misil Korea Utara. Akan tetapi, resolusi yang dihasilkan oleh satelit dengan menggunakan sistem optikal hanya 1 meter dan untuk satelit dengan sistem SAR hanya 1-3 meter, yang

⁶⁵ "Japan's BMD", lihat http://www.mod.go.jp/e/d_act/bmd/bmd.pdf diakses pada 14 Mei 2012, pukul 08.00

menyebabkan Jepang masih harus bergantung pada kemampuan satelit pengintai infra-merah AS untuk mendeteksi peluncuran misil, dan juga peringatan dini yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem BMD.⁶⁶

Dalam penentuan kebijakan keamanan Jepang selanjutnya, NDPG tahun 2004 menyatakan bahwa amandemen yang diperlukan untuk *defense guidelines* selanjutnya harus dibuat 5 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2009, dengan pertimbangan perubahan lingkungan keamanan dan inovasi teknologi militer yang berlangsung secara cepat.⁶⁷ NDPG selanjutnya dikeluarkan pada tahun 2010, lebih lambat dari waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya. Keterlambatan tersebut terkait dengan perpindahan kekuasaan kepada pemerintahan baru partai DPJ pada Agustus tahun 2009, sehingga memerlukan waktu untuk mempertimbangkan mengenai garis kebijakan keamanan yang baru.

Salah satu peristiwa penting lainnya dalam perkembangan kebijakan pertahanan Jepang adalah perubahan status JDA menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada 9 Januari 2007. Kementerian Pertahanan kini dapat secara langsung mengajukan rancangan undang-undang dalam pertemuan kabinet dan memberikan permohonan anggaran pertahanan ke Kementerian Keuangan tanpa harus melalui pos kementerian lainnya (dimana sebelumnya, posisi dan status JDA yang berada di bawah kementerian lainnya membuatnya tidak mempunyai wewenang penuh atas pos pertahanan). Tanggung jawab utama pertahanan nasional akan berpindah dari Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan, akan tetapi untuk kepentingan kontrol sipil terhadap SDF, Perdana Menteri akan tetap menjadi Panglima Tertinggi dengan kuasa untuk memerintahkan mobilisasi untuk keperluan pertahanan dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban.⁶⁸

Pergeseran yang terjadi di dalam kebijakan pertahanan Jepang pasca perang hingga saat ini dapat memberikan sedikit gambaran terhadap latar belakang, dan dapat menjadi landasan untuk dapat melihat dan memahami lebih lanjut

⁶⁶ Christopher W. Hughes, *op.cit.*, hlm. 48

⁶⁷ *Defense of Japan 2011*, hlm. 144

⁶⁸ Lihat "Defense Policy", http://fpcj.jp/old/e/mres/publication/ff/pdf_07/05_defense.pdf diakses pada 16 Mei 2012, pukul 19.05

dalam pembahasan selanjutnya untuk melihat indikator-indikator dalam peningkatan kapabilitas militer Jepang.

2.2. Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

Kapabilitas militer adalah kemampuan sebuah kekuatan militer untuk dapat menjalankan bermacam operasi menghadapi musuh-musuh atau ancaman negara. Gagasannya adalah bagaimana negara dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat merubah mereka dan menerapkan dalam organisasi militernya sehingga dapat memiliki kemampuan perang yang spesifik yang telah direncanakan oleh negara tersebut untuk mengejar kepentingannya ataupun menghadapi musuh atau ancaman terhadap negara.⁶⁹

Secara umum, seperti yang disebutkan dalam NDPG terbaru tahun 2010, kapabilitas militer Jepang ditujukan untuk menciptakan SDF yang memiliki efisiensi, mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi untuk menghadapi ancaman yang berkembang di sekitar wilayah Jepang. Perubahan terjadi diantaranya pada postur GSDF dari postur sebelumnya yang ditujukan untuk menghadapi kondisi Perang Dingin, yaitu dengan mengurangi jumlah MBT (dan menambah MBT baru yang lebih sesuai dengan kondisi geografis Jepang) serta artileri, memperkuat pertahanan udara dengan menggunakan misil kendali darat-ke-udara yang lebih canggih, dan meningkatkan sistem jaringan dan komando serta membangun unit siaga yang dapat dikerahkan dengan cepat dan efektif. Selain itu, peningkatan pertahanan udara dan laut pun dilakukan dengan pengadaan dan *upgrade* alutsista yang dimilikinya. Serta peningkatan kekuatan SDF di wilayah barat daya Jepang di wilayah kepulauan-kepulauan untuk mengantisipasi kemungkinan penyerangan dan invasi ke pulau-pulau pantai. Perkembangan kekuatan SDF juga ditekankan pada peningkatan kemampuan pengintaian dan peringatan dini yang terus dilakukan secara berkesinambungan yang juga terintegrasi melalui pengembangan C4ISR. Berikut ini adalah gambaran kasar mengenai kekuatan Jepang yang dilihat melalui kepemilikan alutsista.

⁶⁹ Ashley J.T., & Janice Bially, *op.cit.*, hlm. 133-134

Tabel 2.1. Alutsista Jepang

	Jepang
Satelit Pengintai	4
Pesawat pengintai maritime	95
Pesawat Peringatan Dini	17
MBT	850
Helikopter Serang	185
Artileri	1,880
Kapal Selam	18*
Kapal Tempur Permukaan Utama	49
Aircraft Carrier Helicopter	1 (untuk Helikopter)**
Cruiser	2
Destroyer	30
Frigates	16
Coastal and patrol combatants	6
Pesawat dengan kemampuan tempur	374(AU)+95(AL)
Fighter	202
Fighter Ground Attack	159

Sumber: *Military Balance 2011*

- (*) NDPG yang baru merencanakan akan menambah jumlah unit hingga berjumlah 22 unit
 (***) *Military Balance* mengelompokkan unit ini sebagai aircraft carrier helicopter sementara Jepang masih menggunakan istilah Destroyer helicopter, 1 unit lagi akan ditambahkan dengan tipe yang sama, yaitu DDH Ise, dan 2 unit lainnya dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 22DDH

Terdapat banyak cara serta indikator yang digunakan untuk dapat melihat dan mengukur kapabilitas militer sebuah negara. Indikator yang paling umum digunakan adalah dengan melihat jumlah kekuatan (*numerical preponderance*), teknologi, serta penggunaan kekuatan (*force employment*).⁷⁰ Dalam sub-bab ini akan dipaparkan lebih rinci mengenai kapabilitas militer Jepang melalui ketiga indikator tersebut.

2.2.1. Jumlah Kekuatan

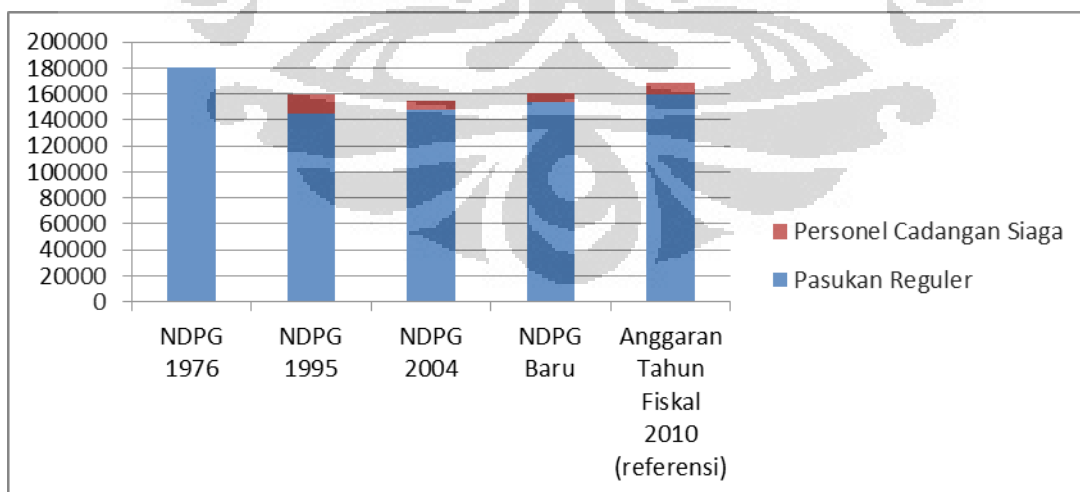
Pengukuran secara kuantitatif melalui jumlah kekuatan pada aspek-aspek atau platform-platform penting sering dijadikan acuan dalam melihat kapabilitas

⁷⁰ Stephen Biddle, *op.cit.*, hlm. 14-17.

militer suatu negara secara kasat mata, walaupun jumlah tidak selalu dapat dijadikan pengukuran yang mutlak akan keunggulan kapabilitas suatu negara dengan negara lain, dikarenakan adanya berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi kapabilitas militer sebuah negara. Hal yang biasa dilihat adalah jumlah pasukan darat, jumlah alutsista, dan juga jumlah anggaran militer berdasarkan GDP.

Jika dilihat dari jumlah pasukan, Jepang mengalami peningkatan secara kuantitatif semenjak kekuatan pertahanannya dibangun kembali pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Dari dibentuknya NPR dengan jumlah pasukan sebanyak 75.000 personel, yang kemudian diubah menjadi JSDF pada tahun 1954 yang terdiri dari 165.000 personel,⁷¹ hingga mencapai 180.000 personel pada NDPG 1976. Lalu, saat ini Jepang mempunyai pasukan darat yang terdiri dari personel aktif yang berjumlah 151.641, dan personel cadangan siaga yang berjumlah 8.479 orang.⁷² Walaupun tentu saja jumlah tersebut mengalami pasang surut. Peningkatan jumlah kuantitatif terjadi pada masa Perang Dingin, dan mulai mengalami penurunan, setelah berakhirnya Perang Dingin, khususnya ketika arah kebijakan pertahanan Jepang lebih diarahkan untuk menciptakan pasukan yang lebih efektif dan efisien.

Grafik 2.1. Jumlah Pasukan Darat Jepang



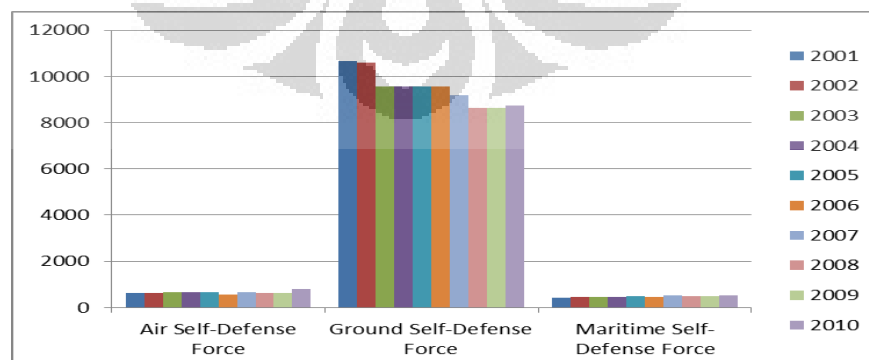
Sumber: Diolah dari *Defense of Japan 2011*

⁷¹ Kenneth G. Henshall, *op.cit.*, hlm. 154

⁷² *Military Balance 2011*, hlm. 245

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas terhadap kekuatan JSDF pada masa Perang Dingin, khususnya melalui *Defense Build Up Program* yang berujung pada NDPG tahun 1976. Akan tetapi setelah itu Jepang lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas pertahanannya, khususnya pada kekuatan maritim dan udaranya, dan melakukan efisiensi terhadap kekuatan daratnya dengan melakukan pengurangan persenjataannya, khususnya MBT dan artileri yang dimilikinya. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah, alutsista yang dimiliki oleh Jepang dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini mengalami penurunan jumlah pada persenjataan yang dimiliki oleh GSDF. Jika dilihat lebih jauh, pengurangan tersebut khususnya terjadi pada MBT, artileri, dan *tug/anti-tank*. Jumlah MBT yang dimiliki oleh Jepang berkurang dari 1.040 unit pada tahun 2001 menjadi 850 unit pada tahun 2010, jumlah artileri yang dimiliki berkurang dari 2.120 pada tahun 2001, menjadi 1.880 pada tahun 2010, dan jumlah *tug/anti-tank* berkurang dari 5.084 pada tahun 2001 menjadi 3.600 pada tahun 2010. Akan tetapi pengurangan tersebut tidak terjadi secara keseluruhan tipe dari masing-masing jenis tersebut. Contohnya, dalam hal MBT, Jepang melakukan pengurangan terhadap Tank Tipe-74 secara bertahap yang rencananya memang akan digantikan oleh Tank terbaru Tipe-10, dan di sisi lain meningkatkan jumlah MBT Tipe-90. Sedangkan jumlah alutsista yang dimiliki oleh ASDF dan MSDF cenderung mengalami peningkatan, walaupun tidak terlihat signifikan.

Grafik 2.2. Jumlah Alutsista Jepang 2001-2010



Sumber: Diolah dari *Military Balance 2002-2011*

Penjelasan di atas adalah gambaran secara umum jika kita melihat keseluruhan jumlah alutsista yang dimiliki oleh Jepang. Akan tetapi, jika kita melihat secara lebih detail, maka kita akan melihat peningkatan kuantitas dari pengadaan persenjataan atau sistem pertahanan baru yang belum pernah dimiliki oleh Jepang sebelumnya. Jepang saat ini telah memiliki 4 unit satelit pengintai, pesawat pengisi bahan bakar di udara (KC-767) sebanyak 4 unit yang dimulai pengadaannya semenjak tahun 2007 secara bertahap, 1 unit *aircraft carrier helicopter* pada tahun 2010 dan masih akan bertambah karena masih dalam tahap pembangunannya, serta sistem pertahanan misil balistik, seperti penambahan kapal tempur yang dilengkapi dengan sistem ini, dari 4 unit kapal tempur kelas *Kongo* menjadi 6 unit dengan penambahan 2 unit dari kapal tempur kelas *Atago*.

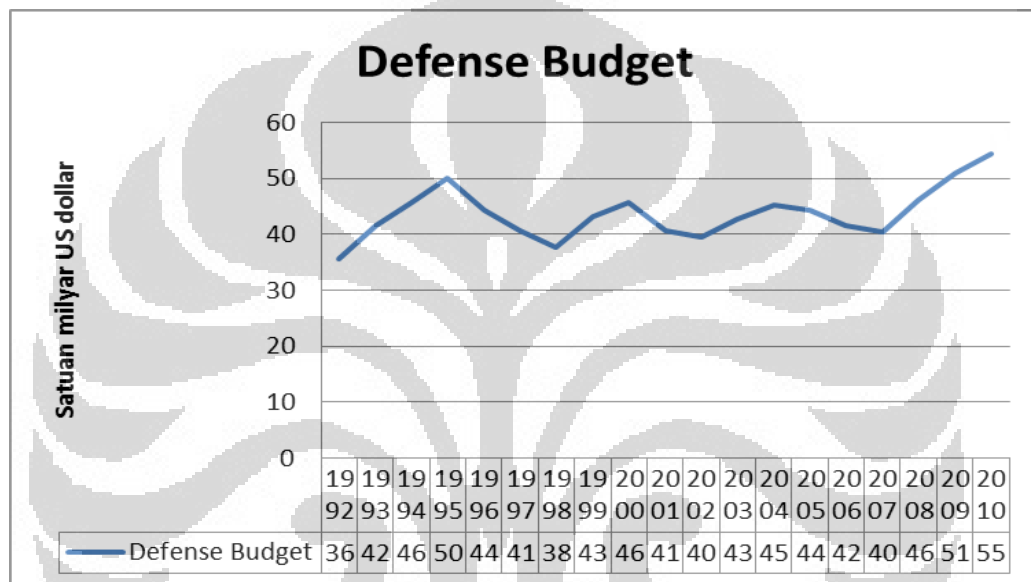
Selain itu kita dapat melihat peningkatan jumlah persenjataan dengan melihat program pengadaan alutsista Jepang di dalam *Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY 2012 Budget* yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Jepang,⁷³ diantaranya adalah pembuatan *destroyer* helikopter (19.500 ton) sebagai pengganti *destroyer* kelas Kurama yang akan diberhentikan pada tahun 2016. Pembuatan satu kapal selam (2.900 ton) yang dilengkapi dengan TCM (*Torpedo Counter Measure*). Selain itu, Jepang juga mengakuisisi 4 unit pesawat tempur generasi baru F-35A, 1 unit helikopter tempur AH-64D, serta 13 unit MBT tipe-10 [Lampiran 1].

Selanjutnya anggaran pertahanan yang dilihat dari GDP suatu negara juga biasa digunakan untuk melihat kapabilitas militer sebuah negara. Jepang merupakan sebuah contoh yang unik dalam hal ini. Jepang memberlakukan pembatasan terhadap anggaran pertahanannya dalam batasan 1% dari GDP yang diperkenalkan oleh PM Takeo Miki pada tahun 1976. Walaupun pembatasan tersebut sempat dilampaui pada masa pemerintahan PM Yasuhiro Nakasone pada tahun 1987, yang sempat melebihi sedikit di atas 1% GDP, akan tetapi pemerintahan-pemerintahan selanjutnya tetap memberlakukan pembatasan tersebut hingga saat ini [Lampiran 2].

⁷³ Lihat "Defense Program and Budget of Japan, Overview FY 2012", <http://www.mod.go.jp/e/d/budget/pdf/240301.pdf> diakses pada 17 Mei 2012, pukul 15.20

Dari data yang didapat dari Bank Dunia, dalam kurun waktu dua puluh tahun belakangan (1992-2010), anggaran pertahanan Jepang cenderung fluktuatif, akan tetapi masih dalam angka pertumbuhan yang positif sebesar 2.80%. Setelah sempat mengalami penurunan sampai pada tahun 2007, anggaran pertahanan Jepang mulai mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2010, seperti yang dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.

Grafik 2.3. Anggaran Pertahanan Jepang 1992-2010



Sumber: Diolah dari data Bank Dunia

Jika dilihat melalui pembatasan 1% GDP terhadap anggaran pertahanan Jepang, maka secara kuantitatif anggaran pertahanan Jepang cenderung stabil berada di bawah 1% dari GDP. Yang kemudian menjadi perhatian adalah bahwa angka 1% dari GDP tidak memberikan gambaran bahwa Jepang memiliki anggaran pertahanan yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang memiliki jumlah persen anggaran pertahanan yang lebih besar dari GDP. Negara dengan kemampuan ekonomi yang besar seperti Jepang, walaupun hanya mengalokasikan bagian kecil dari kekayaannya untuk pertahanan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan kekuatan militer. Sebaliknya negara dengan kekuatan ekonomi yang kecil, walaupun memberikan persentase yang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya hanya dapat memberikan bagian yang terbatas

sesuai besaran kekayaan yang dimilikinya terhadap pembangunan kapabilitas militernya. Sehingga angka 1% yang dimiliki Jepang kadang membelokkan kenyataan bahwa Jepang dapat mengalokasikan dana yang besar terhadap pembangunan kekuatan bersenjata. Terlepas dari politik 1% tersebut, Jepang merupakan salah satu negara dengan anggaran belanja militer terbesar di dunia.

Tabel 2.2. Sepuluh Negara Teratas Anggaran Pertahanan Dunia

2008					2009				2010			
		DB	GDP	%		DB	GDP	%		DB	GDP	%
1	AS	696.3	14,264	4.9	AS	693.3	14,119	4.9	AS	692.8	14,624	4.7
2	Inggris	71.4	2,670	2.7	China	70.4	4,984	1.4	China	76.4	5,733	1.3
3	China	60.1	4,422	1.4	Inggris	60.5	2,179	2.8	Inggris	56.5	2,255	2.5
4	Jepang	46	4,926	0.9	Jepang	50.3	5,075	1.0	Jepang	52.8	5,387	1.0
5	Perancis	44.6	2,863	1.6	Perancis	46.0	2,656	1.7	Arab S	45.2	434	10.4
6	Jerman	43.3	3,659	1.2	Jerman	43.5	3,339	1.3	Perancis	42.6	2,587	1.6
7	Rusia	40.5	1,680	2.4	Arab S	41.3	376	11	Rusia	41.4	1,488	2.8
8	Arab S	38.2	469	8.1	Rusia	38.3	1,236	3.1	Jerman	41.2	3,346	1.2
9	India	28.4	1,223	2.3	India	34.4	1,231	2.8	India	38.4	1,545	2.5
10	Italia	24.1	2,307	1.0	Brazil	28.0	1,592	1.8	Brazil	34.7	2,039	1.7

Sumber: *Military Balance 2011*, hlm. 469

Hal lain yang patut dicermati adalah cara pemerintah Jepang untuk mensiasati pembatasan tersebut. Tidak seperti negara-negara NATO yang sering dijadikan pembanding oleh Jepang terhadap pembatasan anggaran pertahanannya tersebut, Jepang tidak memasukkan dana pensiun prajurit serta anggaran pembangunan paramiliter *Japan Coast Guard* (JCG) ke dalam anggaran pertahanannya.⁷⁴ Dimana jika penghitungan anggaran pertahanan dilakukan mengikuti cara penghitungan negara anggota NATO, yaitu mengikutsertakan dana pensiun dan juga anggaran pembangunan paramiliter, anggaran pertahanan Jepang telah menembus angka 1% GDP, yaitu berkisar antara 1.1 – 1.5% dari GDP [Lampiran 2].

JCG sendiri berdiri di bawah naungan Kementerian Pertanian, Infrastruktur, dan Transportasi. Menurut pasal 25 dalam *JCG Law*, JCG tidak dilihat sebagai sebuah angkatan militer. Akan tetapi pasal 80 menyebutkan bahwa

⁷⁴ Christopher W. Hughes, *op.cit.*, hlm. 39

pada saat mobilisasi JSDF dalam keadaan darurat, JCG dapat digerakkan di bawah perintah Menteri Pertahanan.⁷⁵ Di bawah undang-undang yang sama, JCG mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum (seperti menghentikan penyebrangan batas negara ilegal) sekaligus menjalankan misi keamanan (seperti mempertegas klaim kedaulatan negara).⁷⁶ JCG mempunyai keleluasaan yang lebih dibandingkan dengan MSDF dalam hal penggunaan kekuatan senjata (melakukan tembakan pertama terhadap kapal yang dianggap mencurigakan) dan juga ruang geraknya mengingat statusnya yang lebih mengarah pada aparat penegak hukum dibandingkan sebuah angkatan militer, dimana dalam hal kekuatan persenjataan masih berada jauh di bawah MSDF sehingga tidak efektif dalam peran tempur.

Jepang telah melakukan peningkatan dan pembangunan kekuatan JCG di luar pembatasan 1% GDP yang diberlakukannya terhadap anggaran pertahanannya. Dalam hal anggaran, JCG mengalami peningkatan 3% selama periode 8 tahun, dari 117.5 milyar yen pada tahun 2002 sampai 182.6 milyar yen pada tahun 2010, dengan jumlah anggaran tertinggi pada tahun 2009 sebesar 211.5 milyar yen pada tahun 2009.⁷⁷ Dalam hal peralatan yang dimiliki, JCG mempunyai angkatan dengan total berat ton sebesar 145.000 pada tahun 2005, yang pada saat itu mencapai lebih dari 60% dari total berat ton yang dimiliki angkatan kapal permukaan China, yang kemudian berkembang menjadi 237.000 dalam jumlah berat ton pada tahun 2007. Angkatan tersebut terdiri dari 89 kapal patrol bersenjata dengan berat masing-masing mencapai 500 ton, dan sekitar 56 kapal mempunyai berat lebih dari 1.000 ton.⁷⁸

Pada tahun 2005, ketika anggaran JDA terkena pemotongan, anggaran JCG untuk pengadaan peralatan meningkat, yang kemudian digunakan untuk pengadaan 21 unit kapal baru dan 7 unit pesawat jet. Pada tahun 2006, ketika anggaran yang ditujukan untuk JDA lagi-lagi terkena pemotongan, JCG menerima

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 39

⁷⁶ Richard J. Samuels, "New Fighting Power!" Japan's Growing Maritime Capabilities and East Asian Security", *International Security*, Vol. 32, No. 3, 2007, hlm. 84

⁷⁷ De Koning., Philippe B., & Lipsy, Phillip Y, "Resilience or Retrenchment?: Japanese Security in the Era of Fiscal Austerity", 2011, hlm. 35. Lihat <http://ssrn.com/abstract=1893284> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1893284>

⁷⁸ Richard J. Samuels, *loc.cit.*, hlm. 99

pengiriman 2 unit pesawat jet jarak jauh (12,000 mil) *Gulf Stream V* yang dilengkapi dengan kemampuan pengumpulan data secara terus menerus dan identifikasi kapal *real-time*, serta 2 unit kapal patroli yang telah dilengkapi dengan sistem kontrol tembak yang canggih, meriam 20mm dan 40mm, serta kemampuan mencari sasaran dalam kondisi pandang malam hari. Kapal patroli bersenjata yang paling mumpuni yang dimiliki oleh JCG adalah 30 unit kapal patroli besar (PL/*Patrol Large*) yang mempunyai satu atau dua landasan helikopter (PLH/*Patrol Large with Helicopter*), ditambah 69 unit kapal patroli besar tanpa landasan helikopter. Kapal patroli terbesar yang dimiliki oleh JCG adalah kelas *Shikishima*, dengan berat sekitar 6500 ton, panjang 150 meter, dan memiliki jangkauan 37.000 km. Kapal tersebut dapat membawa sampai 2 unit helikopter, dilengkapi dengan sistem radar pencari udara dan permukaan, 2 buah meriam kembar 35mm dan senapan *gatling* M-61 20mm.⁷⁹

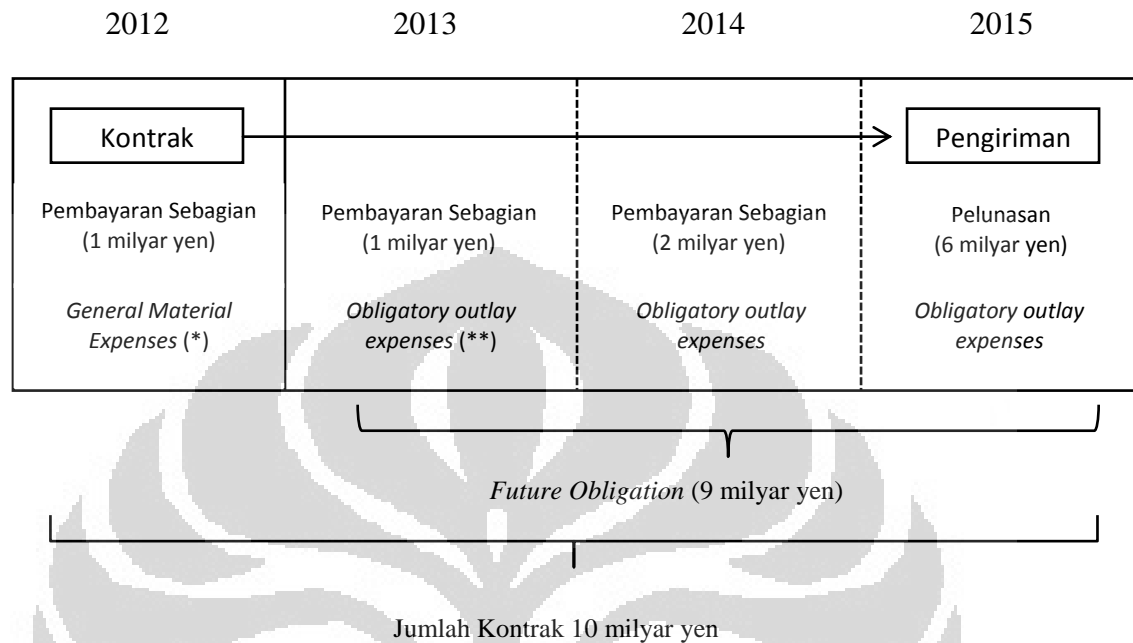
Cara lain yang digunakan pemerintah Jepang untuk mensiasati pembatasan 1% GDP terhadap anggaran pertahanannya adalah dengan menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan (*deffered payments/saimu futan koi*). Cara ini telah digunakan semenjak tahun 70-an, yaitu dengan menyebar/memecah pengeluaran untuk sistem persenjataan dalam beberapa tahun ke depan ketimbang membayarnya sekaligus.⁸⁰ Pembayaran pada tahun-tahun yang akan datang disebut sebagai *future obligation*. *Future obligation* adalah jumlah yang harus dibayarkan pada tahun fiskal yang akan datang setelah tahun kontrak dibuat, berdasarkan kontrak beberapa tahun fiskal. Dalam pembangunan kapabilitas pertahanan, seperti pengadaan alutsista seperti pesawat, kapal, dan juga pembangunan hangar serta akomodasi personel SDF, dapat memakan selama beberapa tahun. Untuk alasan tersebut Kementerian Pertahanan membuat kontrak dengan jangka waktu beberapa tahun (biasanya kurang dari 5 tahun), dan pada saat pembuatan kontrak, pemerintah membuat komitmen atau pembayaran di muka, yang akan dilanjutkan dengan pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 99-100

⁸⁰ Christopher W. Huges, *op.cit.*, hlm. 6

Gambar 2.1. Sistem Pembayaran Ditangguhkan (*Deffered Payment*)

Contoh: Pengadaan alutsista senilai 10 milyar yen di bawah kontrak selama 4 tahun



(*) *General Material Expenses*: Pengeluaran untuk pembayaran yang dibuat tahun 2012, yang berkaitan dengan kontrak yang dibuat tahun 2012

(**) *Obligatory outlay expenses*: Pengeluaran untuk pembayaran yang dibuat tahun 2012, yang berkaitan dengan kontrak yang dibuat sebelum tahun 2011

Jika dilihat secara umum jumlah kuantitatif dari pertahanan Jepang cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan. Akan tetapi jika kita melihat lebih dekat lagi, Jepang masih melakukan penambahan pengadaan alutsistanya, baik peralatan baru atau pun untuk menggantikan peralatan lamanya. Dan dengan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang dapat mensiasati pembatasan secara kuantitatif yang diterapkan dalam anggaran belanja pertahanannya.

2.2.2. Teknologi

Setelah jumlah kekuatan, indikator selanjutnya yang sering dilihat untuk melihat kapabilitas militer sebuah negara adalah faktor teknologi. Perkembangan teknologi yang dimiliki Jepang berada pada atau di atas tingkat dunia di banyak bidang yang penting bagi perkembangan sistem militer. Terlebih lagi, anggaran

yang ditujukan untuk pengadaan peralatan militer dan R&D (*Research and Development*) tumbuh mencapai kisaran dua angka semenjak tahun 1970-an, yang menempatkannya mendekati tingkatan negara-negara Eropa NATO.⁸¹ Berikut ini akan dipaparkan mengenai kepemilikan dan pengadaan teknologi persenjataan utama Jepang, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang dilihat dari *Military Balance* tahun 2002-2011, dan juga pengadaan serta modernisasi yang terdapat dalam anggaran tahun 2010-2012 [Lampiran 1].

Teknologi canggih yang dimiliki oleh Jepang yang dipadukan ke dalam alutsistanya menjadi kelebihan Jepang untuk mengimbangi kekurangan dalam hal jumlah. Khususnya dalam hal kekuatan darat, Jepang kalah dalam hal jumlah jika dibandingkan dengan negara-negara dalam satu kawasan seperti China, Korea Selatan, bahkan Korea Utara.⁸²

Tank utama yang dimiliki oleh Jepang adalah MBT Tipe-90, selain Tipe-74 yang akan digantikan oleh Tank terbaru Tipe-10. Pengembangan Tank Tipe-90 dicanangkan pada tahun 1977 dan mulai dioperasikan pada tahun 1990. Tipe-90 yang mempunyai berat 50 ton dan dilengkapi dengan meriam tembak 120 mm ini adalah tank kelas pertama yang dapat disejajarkan dengan tank mana pun yang dibuat oleh negara-negara maju di dunia. Teknologi inovatif yang terdapat di dalam tank tersebut diantaranya adalah tembakan dengan kendali laser dan panas serta kontrol *turret*.⁸³ Fitur-fitur ini membuat tank dapat mencapai ketepatan tinggi dan menembak dalam posisi bergerak (*mobile firing*), serta meningkatkan kemampuan tank untuk merespon secara cepat target dalam jumlah banyak.⁸⁴

Selanjutnya adalah Tank terbaru Tipe-10 yang dimiliki oleh Jepang di bawah proyek pengembangan MBT-X. Tipe-10 ini ditujukan untuk menggantikan MBT Tipe-74 yang saat ini masih beroperasi di bawah GSDF. Tank ini akan dioperasikan ke wilayah-wilayah dengan kondisi yang lebih sempit dan bergunung di Jepang. Rancangannya dibuat dengan memasukkan unsur C4I

⁸¹ Arthur Alexander, "Of Tanks and Toyota: An Assessment of Japan's Defense Industry", *Research Paper N-3542-AF*, RAND, 1993

⁸² Anthony A. Cordesman., & Robert Hammond, "The Military Balance In Asia 1990-2011: A Quantitative Analysis", Center for Strategic & International Studies, 2011, In www.csis.org/burke/reports

⁸³ Kubah atau tempat senjata pada tank yang dapat berputar

⁸⁴ Lihat "Type 90 Tank", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/type-90.htm> diakses pada 20 Mei 2012, pukul 16.00

(*Command, Control, Communications, Computers and Intelligence*) serta peningkatan dalam hal performa, daya tembak, pertahanan dan juga mobilitas. Tank ini akan dilengkapi dengan meriam 120mm, dengan senjata sekunder senapan mesin 7.62mm dan 12.7mm, yang menggunakan sistem *autoloader*, dengan kru berjumlah 3 orang (komandan dan penembak di *turret*, serta pengemudi di dalam lambung tank). Penggunaan *Continuously Variable Transmission*, dan juga sistem suspensi *hydropneumatic* aktif, menambah fleksibilitas pergerakan tank untuk dapat melakukan bermacam-macam manuver.⁸⁵

Gambar 2.2. MBT Tipe-10



Sumber: diolah kembali dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/mbt-x.htm>

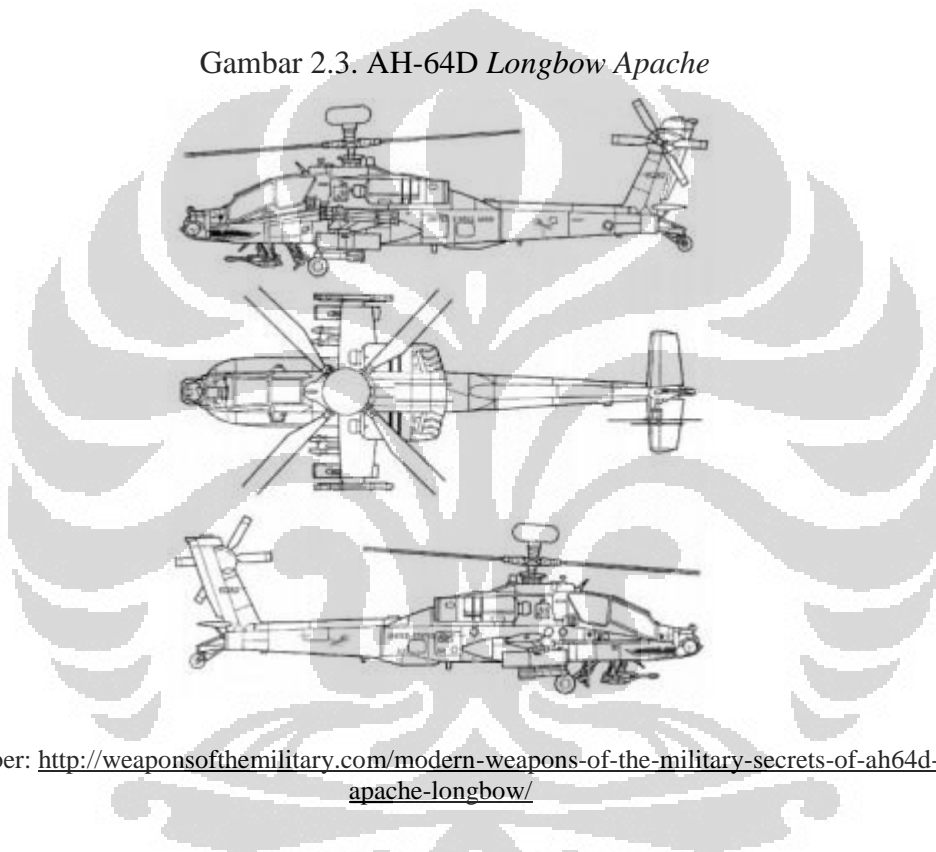
Selain MBT, GSDF juga diperkuat dengan pengadaan helikopter tempur baru untuk melengkapi helikopter tempur utamanya AH-1S *Cobra*. Jepang terus memperpanjang lisensi untuk pembuatan AH-1S agar dapat mereka gunakan selama beberapa dekade ke depan, dan di saat yang sama Jepang juga memutuskan untuk mengganti semua AH-1S yang lama dengan helikopter serang baru (AH-X). Pilihan untuk program AH-X kemudian jatuh kepada AH-64D

⁸⁵ Lihat "Type 10 MBT-XPrototype (TK-X)", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/mbt-x.htm> diakses pada 20 Mei 2012, pukul 16.15

Longbow Apache yang akan dikerjakan oleh Fuji Heavy Industries (FHI) di bawah lisensi Boeing.⁸⁶

Apache dilengkapi dengan senjata dan sistem avionik yang terintegrasi penuh, ditambah dengan modem tercanggih yang dapat menyiarkan informasi di medan tempur secara langsung dan aman kepada pasukan darat dan udara. Unit tempur ini dapat secara cepat mendeteksi, menggolongkan, memprioritaskan, dan menyerang target diam atau bergerak dalam jangkauan di hampir segala cuaca.⁸⁷

Gambar 2.3. AH-64D *Longbow Apache*



Sumber: <http://weaponsofthemilitary.com/modern-weapons-of-the-military-secrets-of-ah64d-apache-longbow/>

Perkembangan teknologi lainnya yang kemudian menjadi tambahan alutsista Jepang dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah pengoperasian misil Tipe-03 Chu-SAM (*Surface-to-Air Missile*) untuk memperkuat pertahanan udara. Jepang telah mengembangkan sistem pertahanan anti-misil dan anti-pesawat tersebut untuk menggantikan sistem MIM-23 HAWK.⁸⁸ Jepang akan

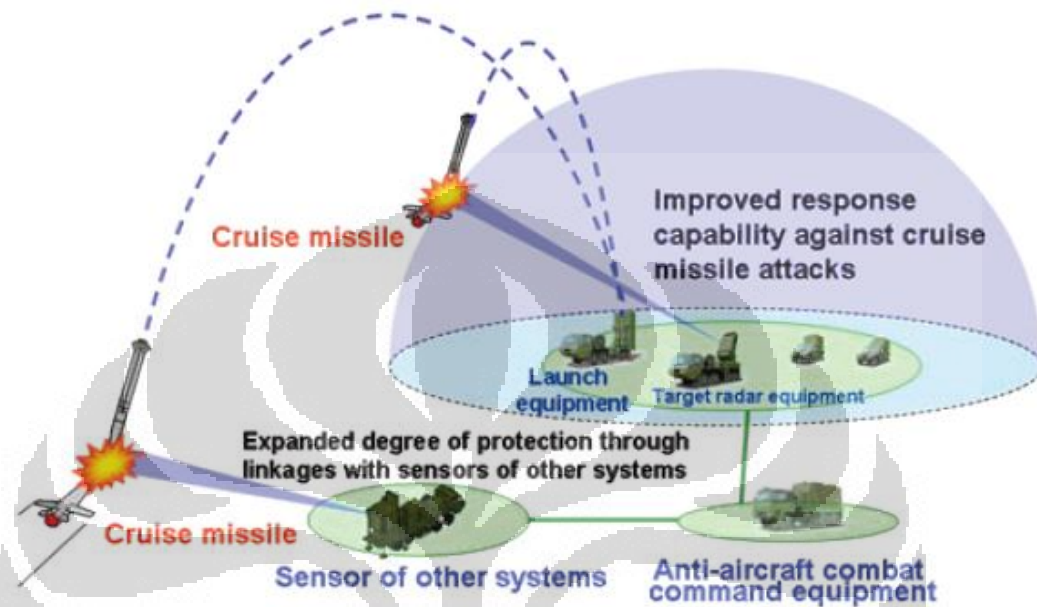
⁸⁶ Lihat "AH-X/AH-64D Apache Longbow", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ah-64d.htm> diakses pada 21 Mei 2012, pukul 19.00

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Lihat "Chu-SAM (Type-03) (Japan), Defensive Weapons", <http://articles.janes.com/articles/Janes-Strategic-Weapon-Systems/Chu-SAM-Type-03-Japan.html> diakses pada 20 April 2012 pukul 21.00

memanfaatkan teknologi jaringan sensor untuk memperluas tingkat perlindungan terhadap misil jelajah dan meningkatkan respon terhadapnya.

Gambar 2.4. Sistem Pertahanan Misil Tipe-03 *Chu-SAM*



Sumber: *Defense Programs and Budget of Japan, Overview of FY2010 Budget*

Dalam hal kekuatan udara, Jepang memiliki sistem pertahanan udara yang canggih dengan menggunakan kombinasi pesawat tempur, sistem radar pengintai udara, dan pesawat pendukung lainnya di bawah ASDF. Hal yang cukup menjadi perhatian dalam perkembangan kekuatan ASDF adalah pengadaan pesawat pengisi bahan bakar di udara, KC-767, yang diterima pertama kali pada tahun 2007. Pengisian bahan bakar di udara menjadi kontroversial karena secara potensial dapat memberikan Jepang sebuah kapabilitas yang bersifat ofensif, dengan meningkatkan kemampuan pesawat Jepang untuk melaksanakan misi jarak jauh. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh JDA dengan pembenaran bahwa pengisian bahan bakar di udara diperlukan Jepang untuk meningkatkan waktu terbang pesawat pencegatnya dalam misi defensif.⁸⁹

⁸⁹ Denny Roy, "Stirring Samurai, Disapproving Dragon: Japan's Growing Security Activity and Sino-Japan Relations", *Asian Affairs*, Vol. 31, No.2, 2004, hlm. 86-101

ASDF, saat ini memiliki 3 model pesawat tempur utama yang digunakan dalam angkatannya, yaitu F-15J/F-15DJ *Eagles*, F-4EJ kai dan RF-4EJ *Phantom II* versi pengintai, serta Mitsubishi F-2 jenis yang lebih besar dan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari varian F-16C, yang menggantikan Mitsubishi F-1. Sedangkan program F-X yang tengah digulirkan untuk menggantikan pesawat tempur F-4 yang lama, telah mencapai keputusan akhirnya dengan pemilihan F-35 *Lightning II* sebagai pesawat tempur Jepang generasi selanjutnya, yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan pada 19 Desember 2011.⁹⁰

Pilihan terhadap pesawat tempur F-35 diumumkan di antara pilihan lainnya seperti F/A-18E/F *Super Hornet*, Eurofighter *Typhoon*, atau Dassault *Rafale*, setelah Jepang gagal mendapatkan pesawat tempur F-22 *Raptor* karena tidak mendapatkan persetujuan Kongres AS terkait dengan isu teknologi sensitif pesawat tempur tersebut. Program F-X yang ditujukan untuk mengganti angkatan pesawat tempur F-4 yang telah menua, juga ditujukan untuk menghadapi tantangan yang datang dari kawasan, khususnya China, dengan peluncuran prototipe pesawat tempur siluman J-20. F-22 merupakan pesawat tempur tercanggih yang ada saat ini dalam hal kemampuan aerial, kemampuan siluman, serta rancangan mesin gandanya, yang dapat memberikan Jepang keunggulan udara di kawasannya jika berhasil memilikinya.⁹¹

F-35 *Lightning II Joint Strike Fighter* (JSF) dipilih lebih atas dasar kemampuan tempurnya yang memadukan kemampuan siluman dengan kecepatan dan kelincihan pesawat tempur, sistem operasi sensor dan jaringan yang terintegrasi penuh, serta interoperabilitas dengan AS dan negara-negara sekutu lainnya ketimbang atas dasar keuntungan industri. Secara operasional, pertimbangan jangka panjang Jepang adalah bahwa AS, Korea Selatan, Singapura dan Australia juga menggunakan F-35 di masa mendatang, dan Jepang ingin dapat bekerja sama dengan negara-negara tersebut.⁹²

⁹⁰ Lihat "F-X Support Fighter", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/f-x.htm> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.00

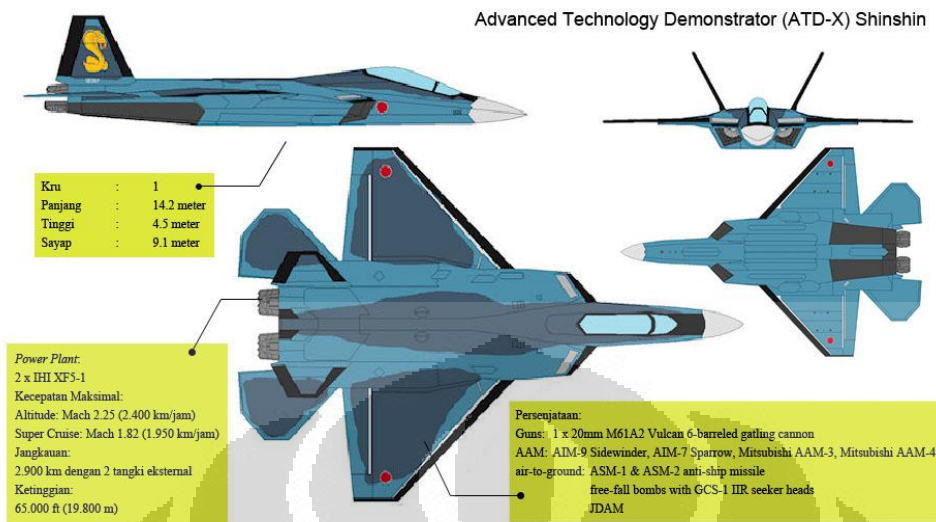
⁹¹ Lihat "Japan's Next Fighter: F-35 Wins The F-X Competition", <http://www.defenseindustrydaily.com/f22-raptors-to-japan-01909/> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.30

⁹² Lihat "Analysis: Japan's F-35 choice a case of capability over industry", <http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?id=1065932120> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.55

Di bawah tekanan yang muncul dari kawasan dengan kemampuan pesawat tempur generasi terbaru, khususnya dalam hal teknologi siluman, dimana China telah mengembangkan pesawat siluman J-20, serta kegagalan dalam mendapatkan F-22 *Raptor* untuk pesawat tempur generasi selanjutnya, Jepang memutuskan untuk mengembangkan pesawat prototipe *Advanced Technology Demonstrator-X* (ATD-X). Kementerian Pertahanan Jepang akan menggunakan ATD-X sebagai demonstrasi teknologi dan prototipe penelitian untuk mengetahui apakah Jepang dapat menjangkau secara domestik teknologi canggih yang digunakan untuk pesawat tempur generasi ke-5.

Jenderal Hideyuki Yoshioka, Direktur bagian pengembangan sistem udara di Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa prototipe pesawat ATD-X atau disebut juga dengan *Shinshin* akan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2014. Prototipe ini akan melihat bagaimana pengembangan teknologi yang digunakan dalam pesawat generasi ke-5, dan jika berhasil maka pemerintah akan memutuskan bagaimana selanjutnya pada tahun 2016. Jepang telah menghabiskan sekitar 39 milyar Yen (sekitar 475 juta Dolar AS) dalam proyek ini semenjak tahun 2009, terlebih lagi semenjak ada kejelasan bahwa AS tidak akan menjual F-22 *Raptor* kepada Jepang.⁹³

⁹³ Lihat "Advance Technology Demonstrator (ATD-X) Shinshin", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/atd-x.htm> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 21.00

Gambar 2.5. ATD-X *Shinshin*

Sumber: diolah kembali dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/atd-x.htm>

Selain pengadaan pesawat tempur baru dan proyek penelitian tersebut, Jepang juga terus melakukan pengembangan terhadap kemampuan yang dimiliki pesawat-pesawat tempur sebelumnya, seperti yang dikemukakan dalam *Defense Programs and Budget of Japan* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang, yang dirangkum dalam 3 tahun terakhir [Lampiran 1]. Peningkatan tersebut diantaranya adalah:

- Melengkapi pesawat tempur F-2 dengan *self-guided air-to-air missile* (AAM-4) dan fungsi JDAM (*Joint Direct Attack Munitions*), serta meningkatkan kemampuan radar guna menambah jangkauan deteksi;
- Mengembangkan misil AAM-5 yang dilengkapi dengan IRCCM (*Infrared Counter Counter Measures*) sehingga lebih efektif mengenai target sasaran dan membedakannya dengan *flare/decoy* yang dikeluarkan pesawat musuh, atau membedakannya dengan latar belakang lingkungan, yang akan digunakan untuk pertempuran jarak dekat yang akan digunakan oleh pesawat tempur F-15;
- Modernisasi pesawat: Konversi radar dan meningkatkan performa computer pusat; meningkatkan performa generator dan sistem pendinginan; pemasangan dan peningkatan FDL (*Fighter Data Link*) penghubung data yang berfungsi untuk menampilkan situasi pertempuran;

memasang dan mengembangkan misil AAM-4B dan AAM-5 (pemasangan HMD/*Helmet Mounted Display*);

- Peningkatan kapabilitas pertahanan pesawat: meningkatkan kemampuan radar peringatan; meningkatkan kemampuan alat pengacak (*jamming*); meningkatkan performa alat pengacak tipe pelontar.

Dalam hal kekuatan laut, Jepang memiliki angkatan dengan peralatan tercanggih dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur, tanpa melihat kekuatan laut AS di kawasan tersebut.⁹⁴ Selain jumlah total ton armada laut Jepang yang terus mengalami peningkatan,⁹⁵ perkembangan yang menarik adalah pengadaan *aircraft carrier helicopter* oleh MSDF.

Jepang sebenarnya sudah sejak lama mempunyai keinginan untuk membangun sebuah *aircraft carrier*. Pada tahun 1983, Jepang berencana untuk membangun sebuah *aircraft carrier* dengan berat 20.000 ton, yang dapat membawa 20 unit helikopter atau 20 unit pesawat yang menggunakan sistem VTOL (*Vertical Take Off and Landing*) seperti *Sea Harrier*. Akan tetapi rencana tersebut ditentang keras oleh AS, yang mendorong Jepang agar membangun lebih banyak *destroyer*, melihat kondisi pada saat itu dimana Angkatan Laut AS telah mempunyai cukup kapal induk untuk menghadapi Angkatan Laut Uni Soviet, akan tetapi masih kekurangan *destroyer*.⁹⁶

Mengacu pada Konstitusi pasca perang Jepang, SDF tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata ofensif seperti ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*), pesawat pengebom strategis, ataupun *aircraft carrier* serang. Akan tetapi, sampai pada tahun 1970-an ketika Angkatan Laut AS mulai mengkategorikan kapal induk ukuran besar sebagai "*aircraft carrier* serang", dan kapal induk ukuran kecil sebagai "*aircraft carrier* anti-kapal selam", Jepang dapat mengartikan bahwa

⁹⁴ Richard Tanter, *op.cit.*, hlm. 30 – 33

⁹⁵ *Defense Of Japan 2011*

⁹⁶ Lihat "Japanese Aircraft Carrier", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x-aircraft-carrier.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.00

pelarangan kepemilikan *aircraft carrier* serang dapat diartikan dibolehkannya memiliki *aircraft carrier* ukuran kecil.⁹⁷

Aircraft carrier ukuran kecil, pertama kali dimuat di dalam *National Buildup Program Outline* (program jangka menengah) tahun 2001-2005. Kapal ini masih dikelompokkan dalam DDH (*Destroyer with Helicopter*), karena JDA berpendapat bahwa kapal tersebut hanya merupakan pengembangan dari *destroyer* pembawa helikopter konvensional, walaupun jika dilihat dari bentuknya sama seperti *aircraft carrier* berukuran kecil.

Kapal pertama selesai pada tahun 2009 dengan kode 16DDH/*Hyuga*, dan kapal kedua selesai pada tahun 2011 dengan kode 18DDH/*Ise*. Kedua kapal tersebut adalah *destroyer* pembawa helikopter terbesar yang dimiliki oleh MSDF dengan total berat 13.500 ton, panjang 197 meter dan lebar 33 meter. Gelar tersebut akan berpindah ketika *destroyer* pembawa helikopter kelas 22DDH selesai dibangun.

16DDH akan mengemban misi yang telah digariskan dalam NDPG baik ketika masa perang maupun dalam masa damai. Sebagai kapal utama di waktu perang, 16DDH akan berfungsi sebagai *command-and-control platform*, mengkoordinasi kegiatan dari unit-unit lain sementara helikopter yang dibawanya melakukan misi ASW (*Anti-Submarine Warfare*). Selama masa damai ataupun MOOTW (*military operation other than war*), 16DDH akan bergabung dengan kapal kelas *Osumi* untuk misi penjaga perdamaian dan juga misi bantuan, sekaligus menanggapi beragam situasi yang dianggap mengancam di wilayah laut dalam.⁹⁸

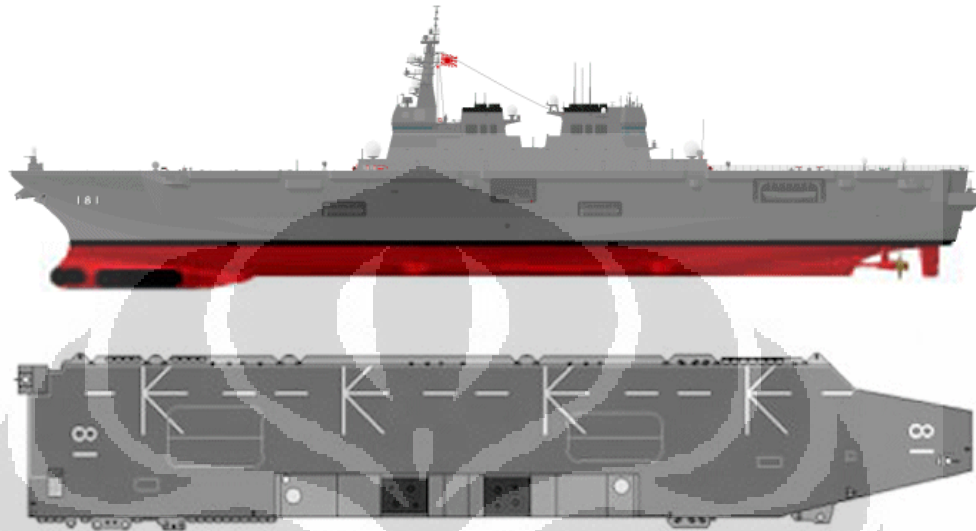
16DDH mempunyai dek kapal yang dapat membawa helikopter jenis SH-60 *Seahawk* untuk misi ASW dan EH-101 *Merlin* untuk operasi ranjau, dan dikatakan mempunyai kapasitas untuk membawa MH-53E. Secara resmi, kapal ini akan membawa 3 unit helikopter anti-kapal selam SH-60J dan 1 unit helikopter multi-fungsi CH-53E *Super Stallion*, walaupun 4 unit helikopter hanyalah sebagian dari kapasitas angkut kapal ini. 16DDH hampir sama dalam ukuran dan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

berat dengan *aircraft carrier* ukuran kecil Inggris kelas *Invincible*, yang dapat membawa sampai 22 helikopter dan kapal VSTOL.⁹⁹

Gambar 2.6. 16DDH *Hyuga*



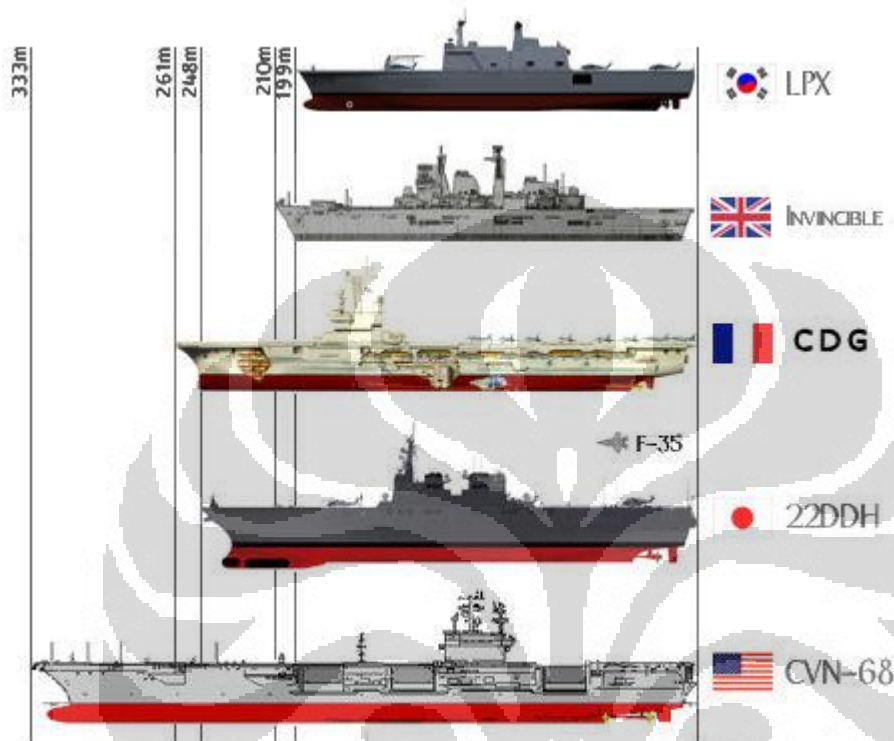
Sumber: <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x-schem.htm>

Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran untuk pembuatan *destroyer* pengangkut helikopter yang baru 22DDH dalam anggaran tahun fiskal 2010. 22DDH akan mempunyai panjang sekitar 248 meter, lebih panjang sekitar 25% dari 16DDH *Hyuga*. Berat kosongnya dilaporkan mencapai 19.500 ton (meningkat 44% dari 16DDH), dengan berat terisi penuh yang mungkin dapat dibandingkan dengan berat isi *aircraft carrier* Italia kelas *Cavour* yang mencapai 27.000 ton. 22DDH dilaporkan mempunyai kemampuan untuk mengangkut sampai 4.000 orang dan 50 truk, dan dapat mengisi bahan bakar ke kapal lain. Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan, kapal ini dapat mengakomodasi sampai 9 helikopter yang beroperasi secara bergantian (5 unit lebih banyak

⁹⁹ Lihat "DDH-161Hyuga/16DDH 13,500 ton Class", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.10

dibandingkan 16DDH), dan menampung 14 helikopter di dek hangar (3 unit lebih banyak dari 16DDH).¹⁰⁰

Gambar 2.7. Perbandingan 22DDH Dengan *Aircraft Carrier* Negara Lain



Sumber: <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x-aircraft-carrier.htm>

22DDH didesain untuk merespon kekuatan laut China yang terus meningkat dan juga untuk mendukung misi bantuan bencana alam sipil maupun UNPKO. Kapal ini memiliki multi-fungsi, diantaranya sebagai *destroyer* pembawa helikopter, pengisi bahan bakar untuk kapal lain, pengangkut personel dan peralatan, dan juga untuk mengawasi wilayah perairan di sekitar Jepang.¹⁰¹

Dalam program ruang angkasa, Jepang terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kemampuan C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*) yang dimilikinya seperti yang dapat dilihat dalam laporan program dan anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Jepang menyediakan anggaran untuk

¹⁰⁰ Lihat "22DDH Class", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/22ddh.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.55

¹⁰¹ *Ibid.*

penelitian terhadap teknologi sensor pencitraan infra-merah dua warna, dimana saat ini Jepang masih bergantung kepada AS untuk teknologi tersebut yang dianggap vital untuk pengawasan dan peringatan diri yang berhubungan dengan sistem BMD. Selain itu juga disebutkan penggunaan satelit komunikasi *x-band*, penggunaan satelit pencitraan komersial, dan juga satelit meteorologi, untuk meningkatkan C4ISR.

Pembangunan kekuatan pertahanan Jepang yang signifikan terjadi pasca berakhirnya Perang Dingin dengan dikeluarkannya keputusan Jepang untuk ikut serta dalam kerja sama sistem BMD dengan AS. Kerja sama tersebut mencakup penelitian, pengembangan, dan pengoperasian bersama sistem pertahanan tersebut.

Kerja sama dalam area kebijakan mencakup kerjasama AS dalam tahap awal pemasangan aset-aset BMD Jepang, pemasangan aset BMD yang dimiliki oleh AS ke wilayah Jepang (meliputi penempatan radar FBX-T ke sub-pangkalan Udara JASDF Shariki, penempatan kapal USS *Shiloh* dengan kemampuan menangkal misil balistik jarak menengah yang ditempatkan di pangkalan laut Yosuka, serta penempatan sistem PAC-3 di pangkalan udara Kadena), dan saling tukar informasi terkait BMD yang didapat oleh aset-aset BMD milik AS dan Jepang. Dalam area penelitian dan pengembangan sistem BMD terdapat proyek SCD (*SM-3 Cooperative Development*), yaitu pengembangan misil SM-3 yang akan dipasangkan pada sistem BMD kapal Aegis.¹⁰²

Dengan dipasangnya aset-aset BMD AS di Jepang, dan aset BMD milik Jepang sendiri yang telah beroperasi semenjak tahun 2006, menandai fase kerja sama antara Jepang dan AS dalam sistem BMD telah memasuki area operasional. Akuisisi sistem persenjataan utama BMD (16 unit PAC-3 FU dan 4 unit kapal *Aegis* yang dilengkapi dengan BMD) yang tertuang dalam NDPG tahun 2004 didanai melalui anggaran tahun 2007.¹⁰³

Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya tren tentang pengadaan dan pengembangan alutsista dan teknologi pertahanan Jepang, khususnya dalam satu dekade terakhir, tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah

¹⁰² "Japan's BMD", *loc.cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

digambarkan oleh Desmond Ball terhadap perkembangan tren pengadaan dan pengembangan alutsista negara-negara di kawasan Asia Timur, termasuk di dalamnya adalah Jepang, setelah berakhirnya Perang Dingin. Tema umum yang terlibat di antaranya adalah:¹⁰⁴

- C4ISR (*Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*); Jepang telah menggunakan dan mengembangkan teknologi berbasis IT untuk keperluan pertahanannya, seperti pembangunan markas pusat, pusat komando dan kontrol, sistem komunikasi dan *data relay*, serta teknologi pengumpulan data dan informasi inteligen yang berhubungan dengan kepentingan strategis dan taktis, yang saling terintegrasi dalam sistem pertahanan Jepang agar dapat berfungsi lebih efisien, cepat dan tepat.
- Pesawat tempur multi-fungsi; tercatat tahun 2010 Jepang mempunyai 202 unit F-15J *Eagle*, 87 unit F-2/F-2B, dan 72 unit F-4E *Phantom II*. Unit lama F-4E rencananya akan digantikan dengan program F-X yang mengacu pada pesawat tempur generasi baru F-35 *Lightning*, dan unit pesawat F-15J serta F-2 masih terus mengalami *up-grade* dan juga modernisasi sistem pertahanannya.
- UAVs (*Unmanned Aerial Vehicles*); ketertarikan Jepang atas UAV dapat dilihat dalam laporan program dan anggaran pertahanan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan, dimana Jepang sedang mengembangkan pesawat mata-mata tanpa awak jarak menengah.
- Pesawat pengintai maritim; Jepang mempunyai pesawat P-3C *Orion* yang berfungsi sebagai pesawat patroli maritim jarak jauh, yang mampu membawa misil anti-kapal, radar pencari permukaan, peralatan SIGINT/ELINT/EW, dan sistem ASW. Pada tahun 2010 Jepang mempunyai 95 unit pesawat jenis ini di bawah MSDF, yang bertambah dari tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah 80 unit. Dan saat ini Jepang juga telah memiliki pesawat baru untuk fungsi ini, yaitu Kawasaki P-1 yang dalam program jangka panjang akan menggantikan P-3C *Orion*.

¹⁰⁴ Desmond Ball, *op.cit.*, hlm. 13-19

- Misil anti-kapal; Jepang telah mengembangkan berbagai jenis misil anti-kapal berdasarkan rancangan dari misil udara-ke-kapal Tipe-80. Di antaranya adalah Tipe-88 SSM, Tipe-90 SSM, Tipe-91 dan 93 ASM, yang digunakan di ketiga angkatannya. Dibandingkan Tipe-80 ASM-1, unit yang telah dikembangkan, yaitu Tipe-93 ASM-2, memiliki mesin turbojet yang memberikan jangkauan dua kali lebih jauh dari Tipe-80 dan memiliki ketepatan yang lebih tinggi dengan menggunakan sensor pengendali infra-merah.
- Kapal tempur permukaan; Pada tahun 2010, kapal tempur permukaan utama Jepang meliputi 1 unit *aircraft carrier* pembawa helikopter; 2 unit *cruiser* dilengkapi dengan misil kendali, landasan helikopter, dan SAM; 20 unit *destroyer* dilengkapi dengan AShM, hangar, dan SAM; 7 unit *destroyer* yang dilengkapi dengan AShM dan SAM; 3 unit *destroyer* yang dilengkapi dengan SAM; serta 16 unit *frigates* yang dilengkapi dengan AShM dan SAM.
- Kapal Selam; Pada tahun 2010 Jepang telah mempunyai 18 unit kapal selam taktis/serang yang dilengkapi dengan kemampuan ASW (*hunter-killer*) dan SSM.
- EW¹⁰⁵ (*Electronic Warfare*); kekuatan militer modern sangat bergantung pada bermacam kemampuan elektronik dengan teknologi tinggi dan kompleks, yang memanfaatkan teknologi radio, radar, infra-merah, optik, ultraviolet, elektro-optik, dan laser yang bergantung pada elektromagnet, seperti aplikasi dalam komunikasi, deteksi, identifikasi, dan sasaran. Oleh karenanya, kemampuan untuk membatasi/menyerang peralatan elektronik musuh dan melindungi peralatan elektronik sendiri sangat penting pada masa modern. Jepang memiliki pesawat 5 unit EP-3C *Orion* di bawah MSDF, dan 1 unit Kawasaki EC-1 dan 10 unit pesawat YS-11E di bawah ASDF untuk fungsi ini.

¹⁰⁵ EW adalah berbagai aksi militer yang terkait dengan penggunaan spektrum electromagnet untuk memanfaatkan energi yang diarahkan (*directed energy/DE*) untuk mengontrol spektrum electromagnet atau untuk menyerang musuh. United States of Air Force, "Electronic Warfare. Air Force Doctrine", *Document 2-5.1*, 5 November 2002

- Pasukan Khusus; Jepang membentuk sebuah satuan khusus *Central Readiness Group* (CRG) pada tahun 2007, yang terdiri dari pasukan elit 1st Airborne Brigade, 1st Helicopter Brigade, unit 101st *Nuclear, Biological and Chemical* (NBC), dan *Special Operation Group* (SOG). Satuan khusus ini ditujukan untuk unit cepat tanggap untuk mengatasi terorisme dalam negeri, serangan gerilya, perang NBC, serta pelatihan personel untuk pengiriman ke luar negeri.¹⁰⁶
- Kemampuan IW (*Information Warfare*); kemampuan IW menjadi dibutuhkan seiring semakin berkembangnya penggunaan IT, khususnya dalam bidang pertahanan, dari manipulasi dan pengawasan internet, sampai penggunaan strategis, dan kemampuan untuk menghancurkan atau melumpuhkan infrastruktur informasi penting dari kekuatan musuh. Jepang sendiri sudah menaruh perhatian besar terhadap isu ini, dengan memasukkannya di dalam NDPG untuk menanggulangi ancaman, seperti serangan dalam dunia maya (*cyber attack*).

Selain hal tersebut di atas, hal lain yang sangat terkait dengan perkembangan teknologi adalah industri pertahanan sebuah negara. Sejarah perkembangan industri pertahanan Jepang pasca perang terhubung erat dengan hubungan keamanan Jepang dengan AS, dimana perkembangannya bertumpu pada lisensi dan kerja sama produksi dari perusahaan AS, dan belakangan ini ketergantungan militer AS yang semakin meningkat terhadap teknologi melihat Jepang memiliki perbandingan komparatif dalam bidang pengembangan teknologi.¹⁰⁷ Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan PM Nakasone yang mendukung alih teknologi pertahanan Jepang pada AS pada bulan Januari 1983, dan keikutsertaan Jepang dalam penelitian SDI pada tahun 1986, dan yang terakhir adalah kerjasama dalam pengembangan BMD.

Tidak seperti negara-negara dengan industri pertahanan maju lainnya, industri pertahanan Jepang difokuskan hanya untuk memenuhi kebutuhan SDF, dan larangan ekspor yang diberlakukan membuat tingkat efisiensinya sangat

¹⁰⁶ Christopher W. Hughes, *op.cit.*, hlm. 41

¹⁰⁷ Neil Renwick, *Japan's Alliance Politics and Defence Production* (New York: Saint Martin's Press, 1995), hlm. 78

rendah dalam hal biaya produksi, sehingga terkadang membuat harga produksi dalam domestik untuk pembuatan alutsista SDF membengkak. Hal tersebut dapat sedikit tertutupi berkat penggunaan ganda (*dual use*) teknologi, yang membuat teknologi yang sama dalam penggunaannya untuk militer juga dikembangkan untuk penggunaan sipil.

Perkembangan terkini yang terkait dengan industri pertahanan Jepang adalah dengan dilonggarkannya larangan ekspor untuk persenjataan dan teknologi militer oleh pemerintah Jepang pada tahun 2011 yang lalu. 27 Desember 2011, pemerintah Jepang mengumumkan secara resmi untuk melonggarkan larangan tersebut dengan memperbolehkan kontraktor pertahanan Jepang untuk mengambil bagian dalam pengembangan dan produksi bersama persenjataan dengan negara lain – bukan berarti Jepang bebas mengekspor ke semua negara di dunia, tetapi ekspor hanya terbatas pada sekutu strategis seperti AS – dan untuk mensuplai peralatan militer untuk misi kemanusiaan.¹⁰⁸

Logikanya, teknologi akan selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, oleh karenanya pemaparan dalam sub-bab ini bukan ditujukan untuk melihat apakah Jepang mengalami peningkatan dalam hal teknologinya, akan tetapi lebih melihat peningkatan ke arah mana dan untuk menunjang kemampuan apa teknologi itu digunakan.

Dari paparan di atas, faktor teknologi, khususnya IT, memegang peranan yang penting dalam perkembangan pertahanan Jepang. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan jaringan dan kemampuan C4ISR (penggunaan teknologi satelit, teknologi pesawat intai, UAV, dll), meningkatkan kecepatan dan keterhubungan antar angkatan, terutama dalam hal komando dan kontrol (teknologi yang dipasang dalam Tank tipe-10 dan helikopter serang, dll.), meningkatkan efektifitas dan efisiensi perang (peningkatan kemampuan dan modernisasi pesawat tempur, pengembangan misil, pembuatan destroyer multi-fungsi, dll.), memperluas ruang lingkup operasional (pengadaan pesawat pengisi bahan bakar, dll.), meningkatkan perlindungan sistem informasi penting,

¹⁰⁸ Tomasz Janowski, "Debt-riddled Japan relaxes decades-old arms exports ban" lihat <http://www.reuters.com/article/2011/12/27/us-japan-defence-idUSTRE7BQ06Q20111227> diakses pada 30 Mei 2012, pukul 21.00

memperluas interoperabilitas dengan pihak lain, khususnya AS (keikutsertaan BMD, pemilihan pesawat tempur generasi selanjutnya F-35, dll.), sampai mengurangi ketergantungan terhadap AS (pernelitian satelit infra-merah, dll.).

2.2.3. Penggunaan Kekuatan

Penggunaan kekuatan di sini lebih mengarah kepada bagaimana suatu negara menggunakan kekuatan dan sumber daya yang dipunyai, bukan apakah kita punya atau tidak. Penggunaan kekuatan, salah satunya dapat dilihat melalui doktrin pertahanan suatu negara, karena dalam doktrin tersebut akan dapat terlihat bagaimana negara ingin menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk kepentingan negara tersebut.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Jepang telah mengalami pergeseran dalam doktrin pertahanannya seperti yang tercantum dalam NDPG-nya, semenjak dikeluarkan pertama kali pada tahun 1976, yang diikuti dengan NDPG berikutnya, tahun 1995, 2004 dan yang terbaru tahun 2010. NDPG adalah “dokumen tingkat tertinggi” dari kebijakan pertahanan Jepang untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar, peranan, dan postur pertahanan SDF, berdasarkan persepsi dasar dari lingkungan keamanan.¹⁰⁹

NDPG pertama yang dikeluarkan tahun 1976, dikeluarkan dengan latar belakang *détente* pada tahun 70-an, sehingga pada saat itu Jepang melihat bahwa secara umum sangat kecil kemungkinan terjadinya konflik militer dalam skala penuh antara Barat dan Timur, melihat berbagai usaha yang dilakukan untuk menstabilkan hubungan internasional. Dan, di dalam kawasan, keseimbangan antara AS, China, dan juga kehadiran perjanjian keamanan antara AS-Jepang memainkan peranan penting dalam mencegah invasi ke Jepang. Berdasarkan hal tersebut, NDPG tahun 1976 memperkenalkan “*Basic Defense Force Concept*” yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan pertahanan minimal yang dapat mencegah dan menangkal invasi yang digambarkan sebagai “*limited and small-scale aggression*” ke Jepang secara independen melalui kepemilikan kekuatan pertahanan dalam skala yang wajar dan membangun sistem pertahanan yang dapat

¹⁰⁹ Tomotoka Shoji, “Japan’s Security Outlook: Security Chalange and the New National Defense Program Guidelines”, dalam *Security Outlook of the Asia-Pasific Countries and Its Implications for the Defense Sector*, NIDS Joint Research Series No. 6, 2011, hlm. 155

mengatasi berbagai bentuk invasi tersebut, bersama dengan perjanjian keamanan Jepang-AS.¹¹⁰

NDPG tahun 1995, dibuat dengan mempertimbangkan peningkatan ekspektasi terhadap peranan SDF atas dasar perubahan dalam hubungan internasional usai Perang Dingin, operasi penjaga perdamaian dan bencana gempa bumi besar yang terjadi di Jepang. Masih dengan menggunakan *Basic Defense Force* yang menitikberatkan pada pembangunan kapabilitas pertahanan dasar minimal yang diperlukan oleh sebuah negara yang merdeka. Akan tetapi sedikit berbeda dengan yang tercantum dalam NDGP sebelumnya, bagian “*limited and small-scale invasion*” dihilangkan dengan pertimbangan meluasnya peran dari kapabilitas pertahanan Jepang. Catatan tambahan dalam NDPG 1995 untuk merespon kondisi pasca runtuhnya Uni Soviet, adalah pentingnya terus dilakukannya berbagai usaha untuk menstabilkan hubungan internasional, dan peran penting perjanjian keamanan Jepang-AS, baik yang berhubungan dengan keamanan Jepang, begitu juga dengan keamanan dan stabilitas wilayah sekeliling Jepang (*surrounding region*).

NDPG tahun 2004 diformulasikan atas latar belakang munculnya berbagai ancaman baru, seperti meningkatnya jumlah proliferasi senjata pemusnah masal dan misil balistik, serta munculnya organisasi teroris. NDPG 2004 berisi prinsip dasar kebijakan pertahanan (dua tujuan dan tiga pendekatan), yaitu: 1) mencegah ancaman langsung mencapai Jepang, dan jika itu terjadi mengusir dan meminimalisir kerusakan yang disebabkan, dan 2) meningkatkan keamanan lingkungan internasional untuk mengurangi potensi ancaman mencapai Jepang. Dua tujuan tersebut diikuti dengan tiga pendekatan yaitu melalui usaha Jepang sendiri, kerja sama dengan partner aliansi, dan kerja sama dengan komunitas internasional. Selain itu, NDPG 2004 juga mencantumkan konsep baru pertahanan yang bergeser dari efek tangkal (*deterrence effects*) menjadi kemampuan untuk merespon (*response capability*). Konsep tersebut, sementara masih menjalankan bagian penting dalam *Basic Defense Force Concept*, diperlukan untuk membangun kemampuan yang dapat merespon secara efektif terhadap ancaman-

¹¹⁰ *Defense of Japan 2011*, hlm. 142-143

ancaman baru dan berbagai kontinjensi/keadaan darurat, serta dapat berpartisipasi dalam kerjasama perdamaian internasional secara aktif dan sukarela, sehingga dibutuhkan kapabilitas pertahanan yang multi-fungsi, fleksibel dan efektif.

Yang terakhir adalah NDPG terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2010. Perubahan penting yang terjadi adalah dengan digantikannya “*Basic Defense Force Concept*” menjadi “*Dynamic Defense Force*”. Dokumen tersebut menyatakan pentingnya membangun kekuatan yang dapat secara efektif merespon berbagai tantangan keamanan yang ada saat ini, dan menjelaskan bahwa kerangka operasional seperti kesiapan untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap kontinjensi menjadi sangat penting, mengingat waktu yang ada untuk peringatan dini akan menjadi semakin berkurang karena perkembangan teknologi militer yang semakin maju. Berdasarkan kondisi tersebut, NDPG menitikberatkan pentingnya mempertunjukkan kemauan nasional dan kemampuan pertahanan yang kuat melalui operasi militer yang rutin berupa kegiatan intelijen, pengawasan dan pengintaian di kondisi normal, bukan hanya sekedar membangun kekuatan pertahanan dalam level tertentu. Hal tersebut akan menjadi elemen penting untuk memastikan daya tangkal yang ampuh serta mendukung kestabilan wilayah sekitar Jepang. NDPG 2010 menekankan pembentukan kekuatan pertahanan Jepang yang memiliki kesiapan, mobilitas, fleksibilitas, dan berkesinambungan yang didukung oleh kemampuan teknologi militer dan intelijen yang maju.

Di dalam NDPG 2010 dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar keamanan yang akan diterapkan adalah: 1) pencegahan dan pengeliminasian ancaman potensial terhadap Jepang dan meminimalisir kerusakan yang terjadi, 2) penstabilan lebih jauh lingkungan keamanan wilayah kawasan Asia Pasifik, dan pencegahan munculnya ancaman melalui penegakan keamanan lingkungan global, dan 3) kontribusi terhadap perdamaian dunia, stabilitas, dan menciptakan keamanan masyarakat.¹¹¹

Dari pemaparan di atas, jelas terlihat terdapat pergeseran dan perkembangan penggunaan kekuatan (*force employment*) dalam pertahanan Jepang. Dimulai perkembangan postur SDF melalui konsep pertahanan “*Basic*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 153

Defense Force Concept”, yang menekankan pada pembangunan postur pertahanan pada level tertentu, yang lebih bersifat pasif untuk menciptakan daya tangkal, menjadi “*Dynamic Defense Force*” yang menuntut tindakan yang lebih aktif, yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer rutin berupa kegiatan intelijen, pengawasan dan pengintaian di kondisi normal.

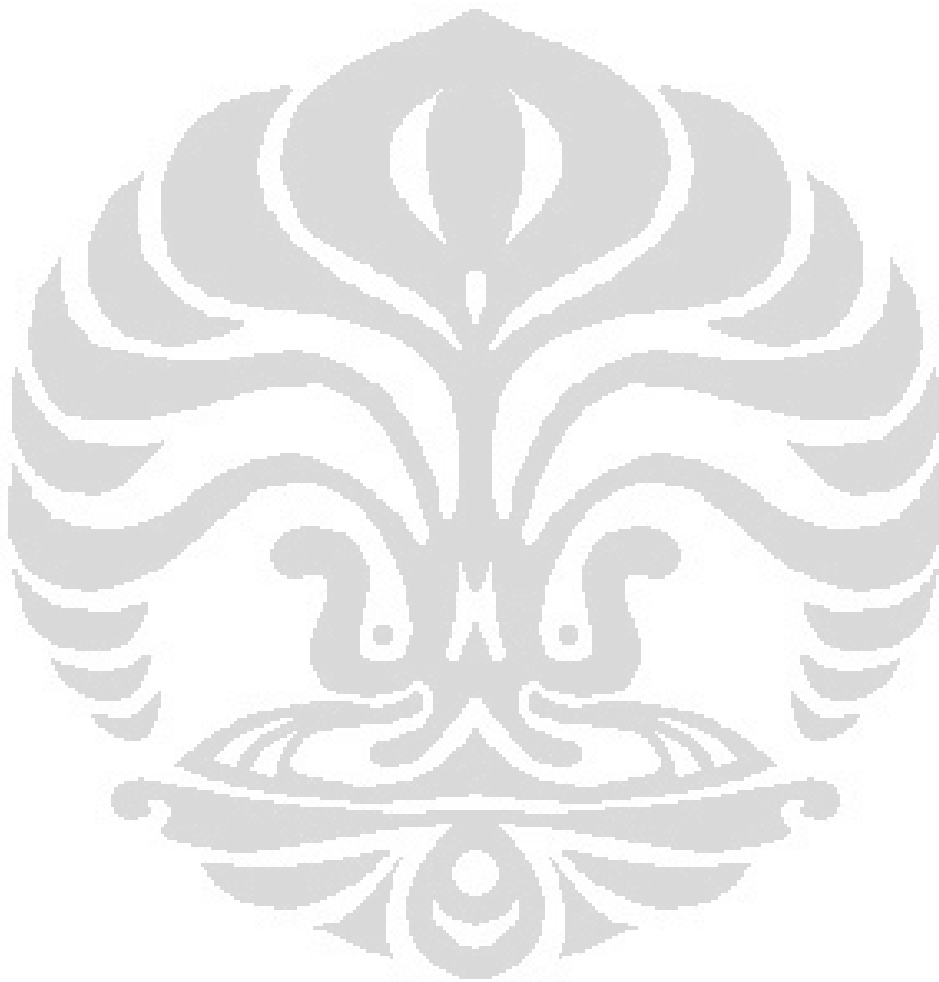
Pergeseran ancaman juga ikut memperluas misi SDF, dimana ancaman tidak lagi dilihat hanya berupa ancaman keamanan tradisional, akan tetapi juga telah memasukkan ancaman non-tradisional ke dalamnya, seperti bencana alam, teroris, kemanusiaan, dan lainnya. Hal tersebut juga turut memperluas misi SDF mencakup pengiriman misi bantuan kemanusiaan, bantuan bencana alam, PKO, dan operasi anti-bajak laut.

Perkembangan penting lainnya yang dapat dilihat dalam NDPG adalah perluasan tanggung jawab pertahanan yang semakin diungkapkan secara eksplisit oleh Jepang. Jika dalam NDPG pertama Jepang hanya menitik beratkan pada pertahanan dalam negerinya untuk menciptakan efek tangkal terhadap invasi dalam skala kecil, dalam NDPG selanjutnya Jepang sudah mulai memasukkan wilayah “*surrounding region*” walaupun tidak didefinisikan secara jelas, dan pada NDPG 2004, Jepang memasukkan “*international security environment*”, hingga NDPG terbaru yang secara eksplisit mengungkapkan “*Asia-Pacific region*” dan “*global security environment*”. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kepercayaan diri Jepang yang semakin meningkat seiring berkembangnya peran dan tanggung jawabnya dalam dunia internasional.

Salah satu hal yang tidak mengalami perubahan jika melihat NDPG adalah Jepang masih menganggap penting perjanjian keamanan Jepang-AS sebagai salah satu dasar dalam pertahanan keamanannya, walaupun pada dua NDPG terakhir Jepang juga menyebutkan pendekatan melalui penggunaan kekuatan sendiri dan dengan kerja sama dunia internasional. Di sisi lain, Jepang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam penggunaan kekuatannya.

Dari ketiga indikator yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Jepang mengalami peningkatan kapabilitas militernya, walaupun tidak dalam jumlah kuantitatifnya, akan tetapi lebih mengarah pada

modernisasi alutsista melalui peningkatan dan penggunaan teknologi baru serta perkembangan penggunaan kekuatannya. Peningkatan pertahanan Jepang mengarah kepada kekuatan yang berorientasi kepada teknologi ketimbang berorientasi kepada skala, yang diikuti dengan peningkatan peranan dan tanggung jawabnya di kawasan dan juga dunia internasional, ditambah dengan interoperabilitas dengan AS.



BAB 3

DILEMA ALIANSI YANG DIALAMI JEPANG DALAM ALIANSI KEAMANAN JEPANG – AS

3.1. Dilema Aliansi

Semenjak masa Thucydides, para pemikir Hubungan Internasional telah menyadari bahwa ketika dalam sebuah hubungan yang asimetris di antara negara-negara, negara kecil yang beraliansi dengan negara besar akan menghadapi sebuah dilema antara terjerat (*entrapment*) dan ditinggalkan (*abandonment*). Hal tersebut yang kemudian dibahas lebih jauh oleh Snyder dalam dilema keamanan aliansi (dalam hal ini mengacu pada fase kedua dilema keamanan aliansi yang telah dijelaskan pada Bab 1 dalam sub-bab kerangka teori, yang selanjutnya akan disebut dengan dilema aliansi).

Dilema aliansi terjadi ketika sebuah negara berada dalam hubungan aliansi yang asimetris, dimana negara tersebut berada dalam sebuah posisi yang mengharuskannya untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan baginya. Pilihan tersebut adalah memilih untuk bekerja sama (*cooperate*) atau membelot (*defect*). Bekerjasama berarti memberikan komitmen yang kuat dan dukungan penuh terhadap partner aliansi dalam konflik dengan musuh. Sedangkan membelot berarti menunjukkan komitmen yang lemah dan tidak memberikan dukungan dalam konflik dengan musuh. Keduanya sama-sama akan menempatkan sebuah negara dalam pilihan yang sulit, dimana jika negara memberikan komitmen yang terlalu kuat terhadap partner, negara akan lebih besar terkena resiko jeratan ke dalam konflik partner aliansinya (*entrapment*). Sedangkan jika memberikan komitmen yang samar dan lemah terhadap partner dalam aliansi maka akan terkena resiko ditinggalkan (*abandonment*).

Dalam Bab ini kita akan membahas mengenai faktor penentu pilihan dalam dilema aliansi tersebut, untuk mengetahui nantinya apakah negara memilih untuk bekerja sama ataukah untuk membelot, di tengah bayangan akan terjerat dalam konflik partner atau ditinggalkan oleh partner. Snyder mengatakan bahwa faktor penentu yang paling penting adalah ketergantungan (*dependence*) terhadap partner dalam aliansi tersebut. Dimana semakin tergantung suatu negara, dan/atau

semakin kurang tergantung partner, maka kemungkinan besar resiko ditinggalkan akan melebihi resiko terjerat, dan begitu pula sebaliknya.

Snyder kemudian membagi ketergantungan ini menjadi ketergantungan langsung, dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah kebutuhan negara terhadap bantuan partner, yang dapat dilihat dari 1) kebutuhan negara akan bantuan di dalam perang sebagai sebuah fungsi perpanjangan yang dikarenakan kapabilitas militernya jauh berada di bawah kapabilitas musuhnya, dengan kata lain perbandingan antara kapabilitas militer yang dimiliki negara dengan musuhnya, semakin besar jarak antara kekuatan keduanya, maka akan semakin besar ketergantungan negara terhadap bantuan partner dalam aliansi untuk membantunya jika terjadi konflik, dan sebaliknya; 2) kemampuan partner untuk memberikan bantuan, semakin besar kekuatan partner, maka semakin tergantung negara terhadapnya, sampai pada titik dimana kekuatan gabungannya dapat memberikan keamanan yang cukup; 3) tingkat tensi dan konflik negara dengan musuh, dimana semakin tinggi tensi dan konflik, maka semakin besar ketergantungan negara terhadap bantuannya, 4) ada atau tidaknya alternatif lainnya untuk beraliansi ulang, dimana jika semakin banyak pilihan beraliansi maka akan semakin kurang tergantung negara dengan partnernya saat ini, dan sebaliknya.¹¹²

Sedangkan ketergantungan tak langsung adalah tingkat kepentingan strategis (*strategic interest*) yang dimiliki masing-masing pihak dalam mempertahankan satu sama lain. Dalam ruang lingkup aliansi, Snyder menjelaskan bahwa kepentingan strategis di sini adalah kepentingan untuk menjaga sumber daya kekuatan partner dari tangan musuh. Berbeda dari ketergantungan langsung yang mengacu pada kebutuhan akan bantuan dari partner jika negara diserang, kepentingan strategis dalam yang mempengaruhi ketergantungan tidak langsung ini mengacu pada kebutuhan untuk memblokir peningkatan kekuatan musuh.¹¹³

¹¹² Glenn H. Snyder, *loc.cit.*, hlm. 471-472

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 472

3.2. Dilema Aliansi Dilihat Melalui Tingkat Ketergantungan Jepang

Dengan ditandatanganinya perjanjian keamanan antara AS-Jepang pasca-perang, perhatian kemudian berpaling kepada dilema aliansi yang kedua, mengenai seberapa jauh Jepang harus terikat dalam aliansi tersebut. Yang membawa Jepang kepada dua buah pilihan yaitu kerja sama untuk memperkuat aliansi (*cooperation*) atau pembangkangan (*defection*). Di dalam aliansi. Untuk mengikat diri terlalu kuat akan beresiko terjerat ke dalam konflik yang dilakukan oleh pemimpin aliansi (*entrapment*), sedangkan komitmen yang terlalu terbatas akan beresiko ditinggalkan (*abandonment*).¹¹⁴

Untuk mengetahui pilihan yang diambil oleh Jepang dalam aliansi yang dibangun dengan AS, sebelumnya akan dilihat berada di mana kah Jepang, dalam posisi ketakutan akan jeratan ataukah ketakutan akan ditinggalkan oleh AS, melalui tingkat ketergantungan yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.2.1. Perbandingan dengan Kekuatan Musuh

Kata “musuh” terdengar kurang pas jika kita membahas mengenai Jepang yang menerapkan konstitusi pasifis pasca perang, dimana di bawah pasal 9, mereka harus menanggalkan hak berperang atau memulai perang sebagai hak sebuah negara dan hanya diperbolehkan mempunyai kekuatan sebatas untuk pertahanan diri. Oleh karenanya, musuh di sini akan mengacu kepada negara yang dianggap Jepang sebagai negara yang mempunyai potensi ancaman terhadap keamanan Jepang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang telah menyebutkan dalam buku putih pertahanannya negara-negara yang dianggapnya memiliki ancaman terhadap keamanan negaranya, yaitu Korea Utara dan China. Korea Utara, dianggap mempunyai ancaman dalam jangka pendek dengan perkembangan misil balistik dan uji coba nuklirnya, sedangkan China memiliki ancaman dalam jangka panjang di tengah peningkatan postur pertahanannya, baik dilihat dari anggaran pertahanannya maupun modernisasi terhadap angkatan militer yang dimilikinya yang dianggap kurang transparan.

¹¹⁴ Neil Renwick, *op.cit.*, hlm. 8

Dalam hal jumlah personel angkatan perangnya, KPA (*Korean People's Army*) menduduki urutan keempat di dunia setelah China, AS dan India, dengan jumlah sekitar 1.020.000 personel aktif, dan sekitar 600.000 personel cadangan. Angkatan daratnya memiliki alutsista utama yang terdiri dari sekitar 3.500 unit MBT Tipe T-34, T-54, T-55, T-62, Tipe-59, *Chonma*, dan *Pokpoong*, sekitar 560 unit tank ringan PT-76 dan M-1985, serta sekitar 2.500 unit APC (*Armored Personnel Carrier*). Angkatan udaranya memiliki kurang lebih 620 unit pesawat yang memiliki kemampuan tempur yang terdiri dari sekitar 80 unit pesawat pengebom H-5, sebagian besar pesawat tempurnya merupakan pesawat tempur lama seperti MiG tipe-15/17/19/21, dan sebagian kecil pesawat tempur modern seperti MiG-23, MiG-29 dan Su-25. Sedangkan angkatan lautnya memiliki sekitar 70 unit kapal selam kecil, 3 unit kapal tempur permukaan utama yang terdiri dari 2 unit Frigates kelas *Najin* dan 1 unit kelas *Soho*, serta 383 unit kapal tempur pesisir dan patroli.¹¹⁵

Meskipun dalam hal jumlah, Korea Utara memiliki jumlah alutsista yang sangat besar, akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan kemampuan yang dimilikinya karena keusangan dari hampir sebagian besar peralatan tempur yang dimilikinya. Sekitar setengah dari jumlah persenjataan utama Korea Utara dirancang pada tahun 1960-an, dan setengahnya lagi bahkan lebih tua. Selain itu, dikarenakan kelangkaan suku cadang, bahan bakar, serta perawatan yang buruk, sebagian dari persenjataan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik.¹¹⁶ Paling tidak ada dua perubahan yang paling signifikan di dalam perkembangan kekuatan Korea Utara, yaitu perkembangan dalam kemampuan peperangan intelijen elektronik (*electronic intelligence warfare*) dan kekuatan pasukan khusus KPA.¹¹⁷

Penempatan kekuatan Korea Utara lebih diarahkan kepada Korea Selatan, dimana sekitar 70% dari kekuatan darat KPA, dan 50% kekuatan udara dan lautnya ditempatkan 100km di sekitar Zona Demiliterisasi (*DMZ/Demilitarized Zone*), zona netral yang berada di antara perbatasan Korea Utara dan Selatan yang

¹¹⁵ *Military Balance 2011*, hlm. 249-251

¹¹⁶ Lihat "The Conventional Military Balance on the Korean Peninsula", <http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/north-korean-dossier/north-koreas-weapons-programmes-a-net-asses/the-conventional-military-balance-on-the-kore/> Diakses pada tanggal 29 Mei 2010, pukul 07:45

¹¹⁷ *Military Balance 2011*, hlm. 206

telah ada semenjak tahun 1953.¹¹⁸ Ancaman militer terhadap Jepang lebih diarahkan pada kepemilikan misil balistik dan program nuklir yang diperparah dengan kecenderungan Korea Utara melakukan provokasi yang beresiko, seperti serangkaian uji coba peluncuran misil balistik yang diarahkan ke wilayah Jepang semenjak tahun 90-an.

Uji coba peluncuran misil balistik yang dilakukan Korea Utara belakangan ini semakin mempertegas kekhawatiran mengenai program misil Korea Utara dan kemampuannya untuk menghantarkan senjata pemusnah masal. Korea Utara telah memiliki sistem misil jarak pendek dan menengah yang dapat menghantarkan senjata konvensional, kimia, dan kemungkinan senjata biologis. Walaupun Korea Utara belum pernah mendemonstrasikan kemampuannya untuk menghantarkan senjata nuklir dengan misil balistiknya, namun diduga kuat mereka telah dapat mempersenjatai misil jarak menengah *Nodong*, yang dapat mencapai wilayah Jepang, dengan hulu ledak nuklir.¹¹⁹

Korea Utara memiliki dua sampai tiga jenis misil yang dapat mengenai Jepang. Misil kelas *Nodong* dapat menghantarkan hulu ledak konvensional ataupun WMD ke hampir seluruh wilayah Jepang, termasuk beberapa pangkalan wilayah AS di sana. Akan tetapi, mengingat tingkat ketepatannya, yang mempunyai CEP (*circular error probable*) 0.7-4 kilometer, yang berarti setengah dari *Nodong* yang ditembakkan akan jatuh di luar lingkaran dengan radius tersebut, maka *Nodong* lebih dilihat sebagai “senjata teror” terhadap pusat populasi ketimbang sistem senjata yang signifikan. Misil kelas *Paektusan-1* (juga dikenal dengan sebutan *Taepodong-1*), merupakan misil dengan dua tahapan, dengan *Nodong* sebagai tahap pertama dan jenis *scud* sebagai tahap keduanya. *Paektusan-1* dapat mengenai wilayah Jepang manapun, walaupun sistem ini memiliki tingkat keakuratan di bawah *Nodong*.¹²⁰ Korea Utara terus mengembangkan sistem persenjataan misil balistiknya. Berikut data mengenai jenis, jumlah, dan tingkat keakuratan misil yang dimiliki oleh Korea Utara:

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 205

¹¹⁹ Center for Nonproliferation Studies, “CNS Special Report on North Korean Ballistic Missile Capabilities”, Monterey Institute of International Studies, 2006, hlm. 1

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 2

Tabel 3.1. Kepemilikan Misil Balistik Korea Utara

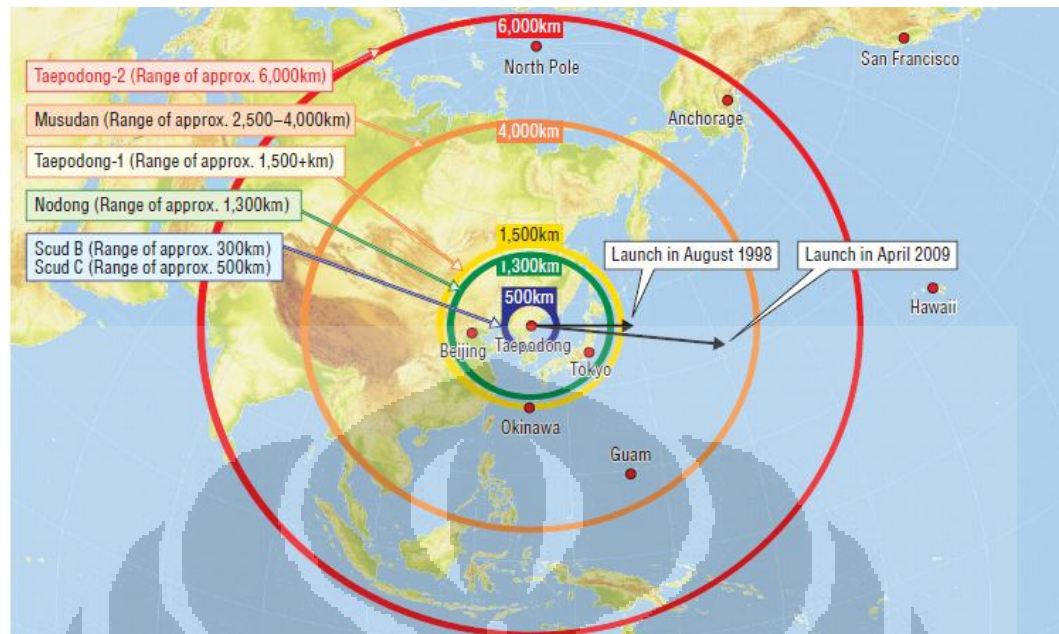
Misil	Jangkauan	Muatan	CEP	Jumlah		Jumlah per Peluncuran
				1999	2010	
FROG	35-70km	450kg	0.5-0.8km	100-450	?	4-10
240mm MRLs	60-70km	90kg	0.7+km	>10.000	>10.000	60-500?
SS-21a	70km	480kg	0.15km	Beberapa?	100+?	3-10?
HQ-2 mod	80km	130kg	<0.5km	100+?	<100?	3-10?
Scud B	320-340km	1000kg	0.5-1km	200-650	200-650	10-20
Scud C	500-550km	500-770kg	0.5-1km	180-550	300-700	10-20
ScudC mod	800km	300kg	0.5-1km?	Beberapa?	200-300	10-20
Nodong I	1000-1400km	770-1200kg	0.7-4km	70-95	70-95	3-10?
Nodong II	1500-2200km	700-1000kg	0.8-4km	30-40	200-300	3-10?
Taepodong I	2000km	1000kg	1-4km?	-	150-200	2-3?
Taepodong II	3500-6000km	700-1000kg	1-4km?	-	50-75	2-3?
ICBM	9000-10000km	1000kg?	1-4km?	-	25-50?	2-3?

Sumber: *Jane's Strategic Weapon System*, Issue 21, April 1996; *Jane's Strategic Weapon System*, Issue 28, Sept. 1998; CDISS laman internet, "National Briefings: North Korea", 1999; Office of the Secretary of Defense, *Proliferation: Threat and response*, April 1996, hlm. 8; Defense Intelligence Agency, *North Korea: The Foundations for Military Strength – Update 1995, 1996*, hlm. 21; Robert D. Walpole, National Intelligence Officer for Strategic and Nuclear Programs, "Non-Proliferation," Carnegie Endowment for International Peace; dan Joseph S. Bermudez Jr., "DPRK Ballistic Missile Characteristics," April 1999. Yang dikutip dari Bruce Bennett, *The Emerging Ballistic Missile Threat: Global and Regional Ramifications*, dalam *Emerging Threats, Force Structures, and The Role of Air Power in Korea*, Natalie W. Crawford., & Chung In Moon (ed.), RAND, 2000, hlm. 185.

Misil balistik Korea utara ukuran Scud atau yang lebih besar umumnya dianggap digunakan untuk membawa hulu ledak berkekuatan tinggi (HE/*High Explosive*) atau senjata kimia (CW/*Chemical Weapon*). Hulu ledak tersebut bisa berupa hulu ledak tunggal atau submunisi (berisi banyak hulu ledak yang membawa HE atau CW yang menyebar di area yang luas). Sedangkan kelas *Nodong* atau yang lebih besar diperkirakan mempunyai potensi untuk membawa hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir dengan berat sekitar 700-1000 kg yang dihantarkan menggunakan *Nodong* diperkirakan mempunyai kekuatan setara dengan kekuatan senjata nuklir generasi pertama, yaitu sekitar 10 sampai 20 kiloton, yang hampir sama jika dibandingkan dengan bom atom AS pada masa-masa awal.¹²¹

¹²¹ Bruce Bennett, "The Emerging Ballistic Missile Threat: Global and Regional Ramifications", dalam Natalie W. Crawford., & Chung In Moon (ed.), *Emerging Threats, Force Structures, and The Role of Air Power in Korea* (New York: RAND, 2000), hlm. 190-191

Gambar 3.1. Jangkauan Misil Balistik Korea Utara



Sumber: *Defense of Japan 2011*

Selain ancaman kepemilikan misil balistik yang semakin meningkat dari Korea Utara, ancaman serupa juga datang dari China, negara lain yang dianggap menjadi ancaman bagi Jepang. Hal tersebut pernah ditunjukkan China dengan memasang postur misilnya yang dihadapkan pada Taiwan yang memicu krisis Selat Taiwan pada tahun 1995-1996 yang sempat mempertegang kondisi keamanan di kawasan, yang membuat berbagai pihak meragukan komitmen China untuk tidak menggunakan kekuatannya dalam kerangka “*no first use*”.

China menerima IRBMs (*Intermediate Range Ballistic Missiles*) dari Uni Soviet pada akhir tahun 1950-an, dan pada pertengahan tahun 1960-an telah berhasil merekayasa terbalik teknologi tersebut dan mereka gunakan untuk membuat misil pertama mereka CSS-1. Lalu, diikuti dengan pembuatan misil yang hampir semuanya mempunyai fungsi sebagai senjata nuklir, termasuk ICBM (*Inter-Continental Ballistic Missile*) yang mulai beroperasi pada awal tahun 1980-an. China juga menempatkan hulu ledak jenis peledak berkekuatan tinggi,

submunisi, dan senjata kimia terutama pada misil dengan jangkauan yang lebih pendek.¹²²

Tabel 3.2. Misil Balistik China Dengan Muatan Nuklir

Misil	Jangkauan	Muatan	CEP	Jumlah		Misil Per Peluncuran
				1999	2010	
CSS-7 (DF-11/M-11)	280-300km	90Kt	0.6km	40-60	40-60	2-6
CSS-6 (DF-15/M-9)	600km	90Kt	0.3km	80-120	80-120	2-5
CSS-5 (DF-21)	1800-2500km	250Ht	0.7km	40-60	80-120	2-3
JL-1 (SLBM)	2150km	250Kt	0.7km	14-20	14-20	1+
CSS-2 (DF-3)	2650km	1-3Mt	2km	15-25	-	1-5
CSS-2 (DF-3A)	2800km	1-3+Mt	1km	25-35	-	1-5
CSS-3 (DF-4)	4750-5500+km	2Mt	1.5km	20-35	-	1-3
CSS-9 (DF-31)	8000km	250Kt	<0.5km?	-	-	1-3
JL-2 (SLBM)	8000km	250Kt	<0.5km?	-	32-48	1+
CSS-10 (DF-41)	12000km	250Kt	<0.5km?	-	60-120?	1-5
CSS-4 (DF-5)	11000-13000km	4-5Mt	0.5-0.8km	20-150	Some	1-5

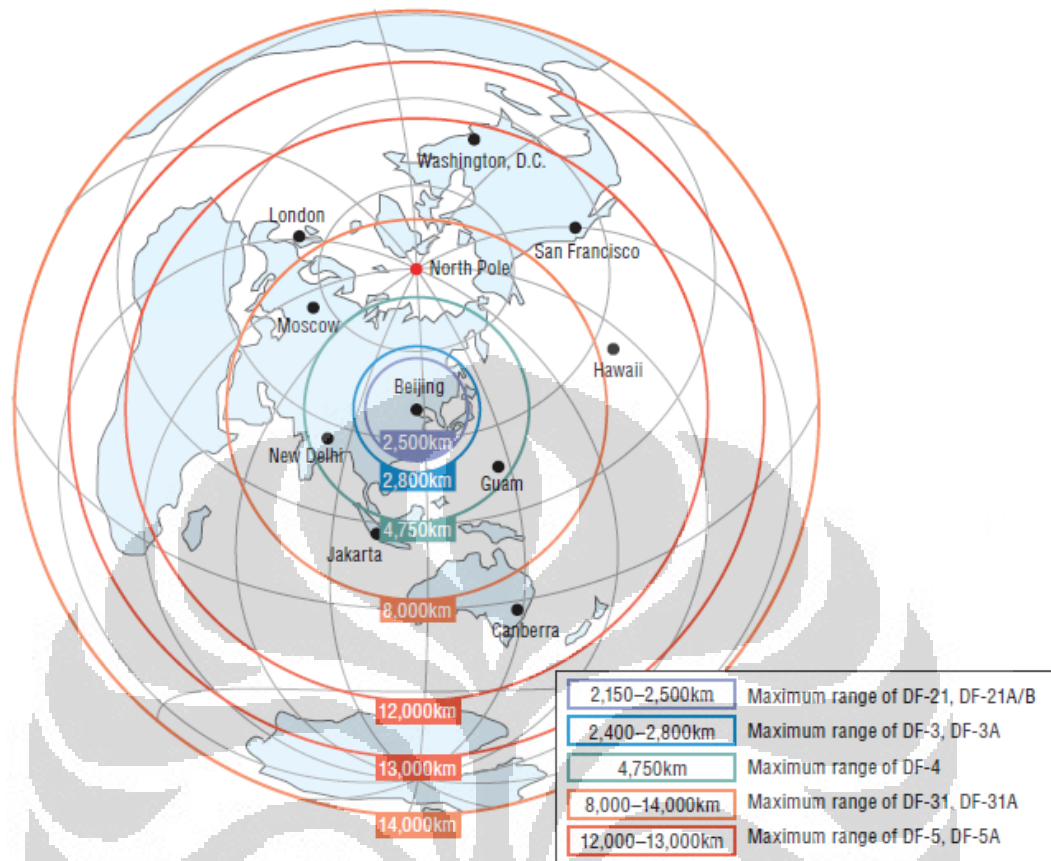
Sumber: "Foreword," *Jane's Strategic Weapon Systems*, Issue 21, April 1996; "CSS-2," "CSS-3," "CSS-4," "CSS-5," "CSS-6," "CSS-7," "CSS-X-9," and "CSS-X-10," *Jane's Strategic Weapon Systems*, Issue 28, Sept. 1998; CDISS Internet site, "National Briefings: China," 1999; and Office of the Secretary of Defense, *Proliferation: Threat and Response*, April 1996, p. 8. Dikutip dari Bruce Bennett, *The Emerging Ballistic Missile Threat: Global and Regional Ramifications*, dalam *Emerging Threats, Force Structures, and The Role of Air Power in Korea*, Natalie W. Crawford., & Chung In Moon (ed.), RAND, 2000, hlm. 194.

LetJen Patrick Hughes, Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS menyatakan bahwa dikarenakan jumlah kekuatan nuklir strategis China yang masih tergolong kecil dan tertinggal, prioritas utama militer China adalah untuk memperkuat dan memodernisasi daya tangkal nuklir strategisnya. Sementara kecepatan dan jangkauan modernisasi strategis China mengindikasikan bahwa penggunaannya akan lebih mengarah kepada daya tangkal ketimbang intensi untuk serangan pertama.¹²³

¹²² *Ibid.*, hlm. 193

¹²³ *Ibid.*, hlm. 194.

Gambar 3.2. Jangkauan Misil Balistik China



Sumber: *Defense of Japan 2011*

Perkembangan kepemilikan misil balistik oleh Korea Utara sama-sama memiliki potensi yang besar bagi keamanan Jepang. Ancaman misil balistik dari Korea Utara utamanya lebih mengarah kepada penggunaan hulu ledak CW, walaupun masih simpang siur, diduga mereka juga telah dapat menggunakan hulu ledak nuklir. Sedangkan ancaman misil balistik China lebih berat kepada persenjataan nuklir, karena memang sejak pertama kali, tujuan China mengembangkan misil balistik adalah untuk digunakan sebagai penghantar senjata nuklir.

Hal lain yang menjadi perhatian bagi Jepang adalah tren peningkatan anggaran pertahanan China, yang dianggapnya masih tidak dibarengi dengan transparansi yang memadai, seperti yang disebutkan dalam buku putih pertahanan Jepang.

China merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Pada tanggal 4 Maret 2011, China mengumumkan peningkatan sebanyak 12.7 persen dalam anggaran pertahanannya, sampai sekitar 91.5 milyar dolar AS. Peningkatan ini berlanjut lebih dari dua dekade dalam anggaran pertahanan China yang diumumkan setiap tahunnya. Berdasarkan data antara tahun 2000-2010, anggaran pertahanan China meningkat rata-rata 12.1 persen dalam term yang telah disesuaikan dengan inflasi selama periode tersebut.¹²⁴

Akan tetapi, China dianggap masih belum memberlakukan transparansi yang memadai dalam mengumumkan anggaran pertahanannya. China belum membeberkan informasi yang spesifik mengenai kepemilikan senjata, rencana pengadaan atau pengadaan yang telah lalu, organisasi dan lokasi unit-unit utama, catatan operasi dan latihan militer, atau rincian detail anggaran pertahanannya. Anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh China dianggap hanya sebagian dari keseluruhan jumlah pengeluaran militer China yang sesungguhnya. Di antaranya disebutkan bahwa anggaran pertahanan yang diumumkan oleh China tidak mengikutsertakan semua biaya pengadaan peralatan dan pengeluaran untuk R&D.¹²⁵

Peningkatan anggaran pertahanan tersebut diikuti dengan peningkatan dan modernisasi militer China. Tujuan modernisasi komprehensif, dan jangka panjang militer China adalah untuk meningkatkan kemampuan PLA dalam menjalankan operasi militer kawasan dengan intensitas tinggi, termasuk A2AD (*anti-access and area denial*), yaitu kemampuan yang dapat digunakan untuk menangkal atau membalas kekuatan musuh yang masuk ke, atau beroperasi di dalam wilayah yang telah ditentukan. Dengan masih memfokuskan peningkatan dalam jangka pendeknya untuk menghadapi situasi darurat di Selat Taiwan, China masih terus menempatkan berbagai sistem persenjataan canggihnya di wilayah militer (*military regions/MRs*) di seberang Taiwan.¹²⁶ Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun belakangan China telah mulai meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan misi-misi selain isu Taiwan.

¹²⁴ Office of the Secretary of Defense, "Military and Security Developments Involving the People's Republic of China", laporan tahun 2011, hlm. 41

¹²⁵ *Defense of Japan 2011*, hlm. 74-75

¹²⁶ Office of the Secretary of Defense, *loc.cit.*, hlm. 2

Dalam buku putih pertahanan Jepang disebutkan bahwa China melakukan modernisasi secara luas dan cepat kekuatan militernya, terutama dalam hal kekuatan misil dan nuklirnya, kekuatan angkatan laut dan udaranya, serta memperkuat kemampuannya untuk memperluas jangkauan proyeksi kekuatannya.

China telah memprioritaskan program pengembangan misil jelajah maupun balistik yang berbasis daratan. Mereka tengah mengembangkan dan menguji beberapa misil ofensif dari jenis dan varian terbaru, seperti pengembangan ASBM (*Anti-Ship Ballistic Missile*) berdasarkan misil balistik jarak menengah jenis CSS-5, yang dikenal sebagai DF-21D, yang memiliki jangkauan sampai 1500km dan dipersenjatai dengan hulu ledak yang dapat bermanuver, yang rencananya akan digunakan untuk memberikan PLA kemampuan untuk menyerang kapal berukuran besar, termasuk *aircraft carriers* di wilayah Pasifik sebelah barat. Selain itu, China juga membentuk unit-unit misil tambahan, meng-*up grade* sistem misil yang lama, dan mengembangkan metode untuk melawan pertahanan misil balistik.¹²⁷

China memiliki jumlah kekuatan darat terbesar di dunia dengan perkiraan jumlah pasukan sebesar 1.6 juta personel. Semenjak tahun 1985, China telah memodernisasi angkatan bersenjata dengan mengurangi jumlah personel serta merampingkan organisasi dan sistem guna meningkatkan efisiensi. Modernisasi unit angkatan darat diantaranya dengan memasukkan MBT generasi ketiga Tipe-99, generasi baru kendaraan penyerang amfibi, serta serangkaian sistem peluncuran roket ganda. Kekuatan darat China dilengkapi dengan sekitar 7050 unit MBT, 800 unit tank ringan, 2390 unit kendaraan tempur lapis baja, dan alutsista lainnya seperti artileri, helikopter, radar dan misil.¹²⁸

Dalam hal kekuatan udara, jika digabungkan, angkatan laut dan udara China memiliki total sekitar 2040 unit pesawat tempur, dan jumlah pesawat tempur generasi keempat yang dimiliki oleh China terus meningkat. China juga memproduksi secara masal pesawat tempur J-10, dan mengimpor serta memproduksi dengan lisensi pesawat tempur Su-27, serta mengimpor Su-30 yang

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3

¹²⁸ *Military Balance 2011*, hlm. 231

dilengkapi dengan kemampuan serang anti-darat dan anti-kapalnya. Selain itu China juga terus mengembangkan pesawat tempur generasi terbarunya J-20 secara domestik. China terus melakukan peningkatan terhadap kekuatan udaranya dengan mengimpor misil darat-ke-udara jarak jauh yang canggih dari Rusia, meningkatkan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, sistem kontrol dan peringatan dini, serta kemampuan mengumpulkan informasi intelijen dan fungsi peperangan elektronik.¹²⁹

Kekuatan laut China mengalami perkembangan semenjak tahun 1990-an. Saat ini, banyak kapal perang angkatan laut PLA telah dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih dan ASCM (*Anti-Ship Cruise Missile*) modern, dengan jangkauan mencapai 185 km. Kemampuan ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan platform angkatan laut PLA, terutama dalam area peperangan anti-darat (*ASuW/anti-surface warfare*), tetapi juga memungkinkan mereka untuk beroperasi di luar jangkauan pertahanan udara berbasis darat. Angkatan laut PLA memiliki sekitar 75 unit kapal tempur utama, lebih dari 60 unit kapal selam, sekitar 55 unit kapal amfibi ukuran sedang dan besar, dan kira-kira 85 unit kapal perang kecil yang dilengkapi dengan misil.¹³⁰

Seperti yang terungkap dalam buku putih pertahanannya, Jepang menaruh perhatiannya terhadap perkembangan pertahanan China antara lain adalah aktivitas maritim yang semakin meluas, dengan meningkatnya operasi yang diduga sebagai pengumpulan informasi dan latihan yang merupakan bagian dari operasi rutin yang dijalankan di perairan sekitar Jepang, termasuk perairan Laut China Timur, Samudera Pasifik serta Laut China Selatan. Selain di wilayah perairan sekitar Jepang, aktivitas China yang semakin meningkat juga dirasakan Jepang di kawasan udara di sekitar dan wilayahnya.

¹²⁹ *Military Balance 2011*, hlm. 80

¹³⁰ Office of the Secretary of Defense, *loc.cit.*, hlm. 4

Tabel 3.3. Perbandingan Jumlah Kekuatan Jepang, Korea Utara, dan China

	Jepang	Korea Utara	China
Populasi	126,995,441	23,990,703	1,354,146,443
Anggaran Pertahanan	52.8 milyar USD	4.38 milyar USD	76.4 milyar USD
Personel AD	151,641	1,020,000	1,600,000
MBT	850	3,500	7,050
Helikopter Serang	185	-	6-10
Artileri	1,880	21,000	12,462
Kapal Selam	18	70	71
Kapal Tempur Permukaan Utama	49	3	78
Aircraft Carrier	1 (untuk Helikopter)*	-	-
Cruiser	2	-	-
Destroyer	30	-	13
Frigates	16	3	65
Coastal and patrol combatants	6	383	211
Pesawat dengan kemampuan tempur	374(AU)+95(AL)	620	1,687(AU)+311(AL)
Fighter	202	458	986(AU)+108(AL)
Fighter Ground Attack	159	48	313(AU)+84(AL)
Bomber	-	80	82(AU)+50(AL)

Sumber: Diolah dari *Military Balance 2011*

*) Jepang mengategorikan unit ini sebagai Destroyer pembawa helikopter

Tabel di atas menunjukkan gambaran kasar kekuatan dari masing-masing negara, Jepang, Korea Utara, dan China, dengan jumlah alutsista utama masing-masing matra. Dalam hal jumlah kekuatan, Jepang berada di bawah Korea Utara maupun China. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alutsista yang dimiliki oleh Korea Utara hampir sebagian besar merupakan peralatan lama, sehingga dalam hal teknologi Jepang lebih unggul, selain itu sebagian besar kekuatan Korea Utara ditempatkan di DMZ yang lebih ditujukan kepada Korea Selatan. Ancaman utama muncul dari pengembangan misil balistik dan kemungkinannya dapat menghantarkan senjata nuklir, yang dipadukan dengan tindakan provokatif yang sudah sering kali dilakukan.

Jika dibandingkan dengan China, jumlah kekuatan Jepang berada di bawahnya. Ditambah dengan tren peningkatan anggaran pertahanannya yang tampaknya masih akan terus mengalami peningkatan, yang akan diiringi dengan modernisasi angkatan perangnya, membuat Jepang menempatkan China sebagai potensi ancaman dalam jangka panjang. Selain peningkatan terhadap kekuatan udara dan lautnya, peningkatan terhadap perkembangan misil balistik dan senjata nuklir juga menjadi perhatian bagi Jepang.

3.2.2. Kekuatan Partner

Aliansi Jepang dengan AS dimulai dengan ditandatanganinya *Mutual Security Assistance Pact*, pada tahun 1952, yang kemudian digantikan dengan *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960 dimana Jepang memberikan hak kepada AS untuk mendirikan pangkalan militer di wilayahnya sebagai timbal balik atas perlindungan keamanan setelah kekalahannya pada Perang Dunia II. Dua pihak yang tadinya menjadi musuh dalam Perang Dunia II, kemudian membentuk aliansi, yang sudah bertahan lebih dari setengah abad hingga sekarang ini. Semenjak saat itu Jepang bergantung pada perlindungan keamanan dan daya tangkal nuklir dari AS.

AS keluar sebagai pemenang Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, menempatkannya sebagai hegemoni dalam unipolaritas sistem internasional. Aaron L. Friedberg dan Richard K. Betts melihat bahwa Asia Timur merupakan sistem dengan karakteristik struktur multipolar. Bets berargumentasi bahwa unipolaritas global, dimana AS sebagai *superpower* tunggal setelah Perang Dingin, berdampingan dengan multipolaritas regional, yang ditandai dengan kemunculan China, Jepang, dan Korea.¹³¹ Robert S. Ross menambahkan pengkategorian negara-negara dalam kawasan tersebut, dimana

¹³¹ Aaron Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia", *International Security*, Vol. 18, No. 3 (Winter 1993/4), hlm. 6; Richard K. Betts, "Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States after the Cold War", *International Security*, Vol. 18, No. 3 (Winter 1993/4), hlm. 41

Jepang dan Korea Selatan sebagai *great power*, sementara China sebagai *main land great power*, dan AS sebagai *maritime great power*.¹³²

AS merupakan negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar di dunia, yang memiliki angkatan perang yang dilengkapi dengan alutsista berteknologi canggih. Sebagai kekuatan utama dunia, perbedaan jumlah kekuatan yang dimiliki oleh Jepang dan AS terlihat jelas, seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Perbandingan Jumlah Kekuatan Jepang dan AS

	Jepang	AS
Populasi	126,995,441	317,641,087
Anggaran Pertahanan	52.8 milyar USD	722.1 milyar USD
Personel AD	151,641	639,063
MBT	850	5,795(AD) + 447 (Marinir)
Helikopter Serang	185	1,239 (AD) + 147 (Marinir) + 18 (Marinir Cadangan)
Artileri	1,880	6,445(AD)+1,926 (Marinir)
Kapal Selam	18	71
Kapal Tempur Permukaan Utama	49	114
Aircraft Carrier	1 (untuk Helikopter)*	11
Cruiser	2	22
Destroyer	30	59
Frigates	16	22
Coastal and patrol combatants	6	28(AL)+160(CG)
Pesawat dengan kemampuan tempur	374(AU)+95(AL)	947(AL) + 68(AL Cad.) + 370 (Marinir) + 27 (Marinir Cad.) + 1,808 (AU) + 522+130 (AU cad.)
Fighter	202	32(AL Cad.)+12 (Marinir Cad.) + 468 (AU) + 108 (AU Cad.)
Fighter Ground Attack	159	800(AL) + 24(AL Cad.) + 370 (Marinir) + 15 (Marinir Cad.) + 978 (AU) + 318+69 (AU Cad.)
Bomber	-	146 (AU) + 9 (AU Cad.)

Sumber: Diolah dari *Military Balance 2011*

¹³² Robert S. Ross, "Bipolarity and Balancing in East Asia", dalam T.V. Paul, James J. Wirtz, & Michael Fortmann, *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century* (California: Stanford University Press, 2004), hlm. 268

Dalam hal perlindungan nuklir yang diberikan AS, *Nuclear Posture Review* (NPR) yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 2010, menyebutkan bahwa AS akan meneruskan komitmennya, selama senjata nuklir ada, AS akan memiliki persenjataan yang efektif aman dan terkendali, baik untuk menangkal musuh potensial, dan juga untuk meyakinkan sekutu AS dan partner keamanan lainnya bahwa mereka dapat memegang komitmen keamanan AS.¹³³

Kekuatan nuklir AS menyediakan “payung nuklir” kepada sekutu-sekutunya, yang dalam sejarahnya berperan sebagai jaminan utama dalam keamanan mereka. Dalam beberapa kasus, persenjataan nuklir AS yang kuat telah terbukti efektif tidak hanya dalam menangkal serangan yang ditujukan kepada AS dan sekutunya oleh musuh yang menggunakan senjata pemusnah masal, tetapi juga mencegah sekutu dalam memiliki persenjataan nuklir mereka sendiri.¹³⁴

Pada saat ini kekuatan misil balistik berbasis-darat AS terdiri dari 450 minuteman III ICBMs, yang tiap misilnya dipersenjatai dengan satu sampai tiga hulu ledak nuklir. *Air Force* tengah memodernisasi misil-misil *Minuteman*, mengganti dan meng-*upgrade* mesin peluncur, sistem pengendali, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan angkatan kapal selam pembawa misil balistik terdiri dari 14 unit kapal selam *Trident*, yang masing-masing membawa 24 misil *Trident II* (D-5), yang membawa total sekitar 1,200 hulu ledak nuklir. Angkatan pesawat pembom berat terdiri dari 19 unit pesawat pengebom B-2 dan 94 unit B-52. Jumlah pesawat dalam angkatan tersebut akan dikurangi hingga 60 unit pesawat. Sekitar setengah dari unit B-52 akan dilengkapi untuk membawa senjata nuklir.¹³⁵

Keunggulan lain yang dimiliki oleh AS sebagai kekuatan utama dunia adalah strategi militernya yang didasari atas konsep kehadiran pasukan (*forward presence*) dan proyeksi kekuatan (*power projection*). Kehadiran pasukan AS yang ditempatkan dan dikirim di luar wilayahnya, digunakan AS untuk memberikan komitmen terhadap jaminan keamanan terhadap sekutu dan juga berfungsi sebagai

¹³³ *Military Balance 2011*, hlm. 44-45

¹³⁴ The New Deterrent Working Group, “U.S. Nuclear deterrence in the 21st Century: Getting It Right”, Washington, 2009, hlm. 11

¹³⁵ Amy F. Woolf, “U.S. Strategic Nuclear Force: Background, Developments, and Issues”, Congressional Research Service, 2012

daya tangkal di barisan pertama untuk mencegah serangan ke AS. Hal tersebut dilengkapi dengan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatannya di berbagai belahan dunia. Proyeksi kekuatan di sini adalah kemampuan AS untuk mengerahkan semua elemen yang diperlukan dari kekuatan nasional (militer, ekonomi, diplomasi, dan informasi) ke tempat dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keamanan. AS memiliki kemampuan untuk mengerahkan secara cepat dan dalam jumlah yang besar ke berbagai tempat di belahan dunia, yang membuatnya lebih unggul dari negara lain di dunia.¹³⁶

AS menjaga kehadirannya di kawasan Asia Timur dengan menempatkan pasukannya di negara-negara di kawasan tersebut seperti Korea Selatan dan Jepang, di bawah USPACOM (United States Pacific Command). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian keamanan yang ditandatangani oleh Jepang dan AS pada tahun 1960 memberikan hak kepada AS untuk membangun pangkalan dan menempatkan pasukannya di wilayah Jepang sebagai ganti atas jaminan perlindungan keamanan yang diberikan oleh AS.

Pasukan AS yang ditempatkan di wilayah Jepang berjumlah sekitar 35,598 personel, yang terdiri dari Angkatan Darat yang berjumlah 2,677 personel; Angkatan Laut yang terdiri dari 3,539 personel, yang dilengkapi dengan 1 unit *aircraft carrier* bertenaga nuklir, 2 unit *cruiser* dengan misil kendali, 8 unit *destroyer* dengan misil kendali, 1 unit kapal amfibi komando, 2 unit kapal ranjau (*mine countermeasure*), 1 unit kapal serang amfibi, dan 2 unit kapal dengan dek pendaratan; USAF (*United States Air Force*) yang terdiri dari 12,380 personel, yang dilengkapi dengan 18 unit F-16 *Fighting Falcon*, 8 unit HH-60G *Pave Hawk*, 2 unit E-3B *Sentry*, 24 unit F-15C *Eagle*/F-15D *Eagle*, 10 unit C-130E *Hercules*, dan 2 unit C-21J; USMC (*United States Marine Corps*) yang terdiri dari 17,002 personel, yang dilengkapi dengan 12 unit F/A-18D *Hornet*, 12 unit KC-130J *Hercules*, 12 unit CH-46E *Sea Knight*, 12 unit MV-22B *Osprey*, dan 10 unit CH-53E *Sea Stallion*.¹³⁷

¹³⁶ Michael J. Corley, "The Future of Power Projection", *Strategy Research Project*, U.S. Army War College, 2002, hlm. 1-2

¹³⁷ *Military Balance 2011*, hlm. 248

Dari pemaparan di atas, jumlah kekuatan Jepang jauh berada di bawah AS, baik dalam hal kekuatan persenjataan konvensional maupun persenjataan nuklir. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jepang tidak dapat memiliki persenjataan ofensif seperti *aircraft carrier* serang, pesawat pengebom strategis, maupun ICBM, karena pembatasan yang diberikan oleh konstitusi pasca perang Jepang, dan sikap pasifis serta trauma akan efek yang dihasilkan oleh senjata nuklir, membuat Jepang mengeluarkan prinsip tiga non-nuklirnya. Dan kemampuan AS dalam hal kehadiran pasukan dan proyeksi kekuatannya menjadi perhitungan penting melihat kondisi geografis Jepang sebagai negara kepulauan yang dipisahkan oleh tembok lautan.

3.2.3. Tingkat Konflik

Jepang berada di dalam kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang cenderung tidak stabil dan memiliki potensi konflik yang tinggi antar negara di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari karakter kawasan yang diwarnai oleh dinamika pergeseran perimbangan kekuatan dalam kawasan, heterogenitas politik dan budaya, perebutan wilayah yang tersebar di dalam kawasan yang mengkombinasikan isu-isu sumber daya dengan nasionalisme post-kolonial, dan lainnya.¹³⁸

Dalam Buku Putih pertahanannya, Jepang menaruh perhatian pada kondisi di sekitar Jepang dan juga kawasan. Peningkatan kapabilitas militer dalam skala besar, termasuk kekuatan nuklir, masih berkonsentrasi di wilayah sekitar Jepang, dan banyak negara tengah memodernisasi kapabilitas militer mereka dan mengintensifkan aktivitas militer maupun organisasi terkait. Terlebih lagi, adanya isu wilayah dan maritim, dan juga masalah yang berkaitan dengan Semenanjung Korea dan Selat Taiwan, menjadikan situasi dan kondisi keamanan di wilayah tak terprediksi dan tak tentu.

Korea Utara telah melanjutkan untuk mengembangkan, menggunakan, dan melakukan proliferasi terhadap senjata pemusnah masal dan misil balistik, serta mengembangkan kekuatan pasukan khususnya dalam skala besar. Korea Utara juga telah melakukan tindakan provokatif berulang kali di Semenanjung Korea

¹³⁸ Thomas J. Christensen, *loc.cit.*, hlm. 49

dan juga ke wilayah Jepang. Secara khusus Jepang menyebutkan dalam buku putih pertahanannya bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, ketika dipertimbangkan dalam keterkaitannya dengan peningkatan kemampuan misil balistiknya sebagai alat penghantar WMD, tidak dapat ditolerir karena menimbulkan ancaman yang serius bagi keamanan Jepang dan dapat dianggap berbahaya terhadap keamanan dan kedamaian Asia Timur dan masyarakat internasional.

Terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, usaha pembicaraan melalui *Six-Party Talk* yang digelar sejak tahun 2003 untuk menemukan jalan damai terhadap masalah tersebut belum tampak memberikan hasil. Pada tahun 2006, Korea Utara meluncurkan uji coba tujuh misil balistiknya dan mengumumkan bahwa mereka telah melakukan uji coba nuklir. Pada tahun 2009, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah berhasil dalam pengembangan senjata nuklirnya. Di tahun yang sama Korea Utara melakukan uji coba peluncuran misil balistik *Taepodong II* yang sempat melalui wilayah Jepang sebelum akhirnya jatuh di wilayah Samudera Pasifik.

Selain permasalahan uji coba senjata nuklir dan misil balistik, situasi keamanan di Semenanjung Korea sempat memanas ketika pada tahun 2010, ketika terjadi peristiwa tenggelamnya kapal *corvete* milik Korea Selatan di perairan dekat perbatasan sebelah ujung utara yang ditetapkan oleh Korea Selatan (perbatasan *de facto* dengan Korea Utara), serta serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan, yang diarahkan ke pulau Yeonpyeong.¹³⁹

Selain permasalahan Semenanjung Korea, China juga menjadi perhatian utama dalam perkembangan situasi keamanan di kawasan. China dinilai terus tumbuh sebagai kekuatan besar yang turut memainkan peranan penting di kawasan maupun di dunia. Di sisi lain, China terus melanjutkan peningkatan anggaran militer, dan juga modernisasi kemampuan militernya – yang berpusat pada kemampuan misil dan nuklirnya, serta kekuatan laut dan udaranya – dalam laju yang cepat. Selain berusaha untuk memperkuat kemampuan proyeksi

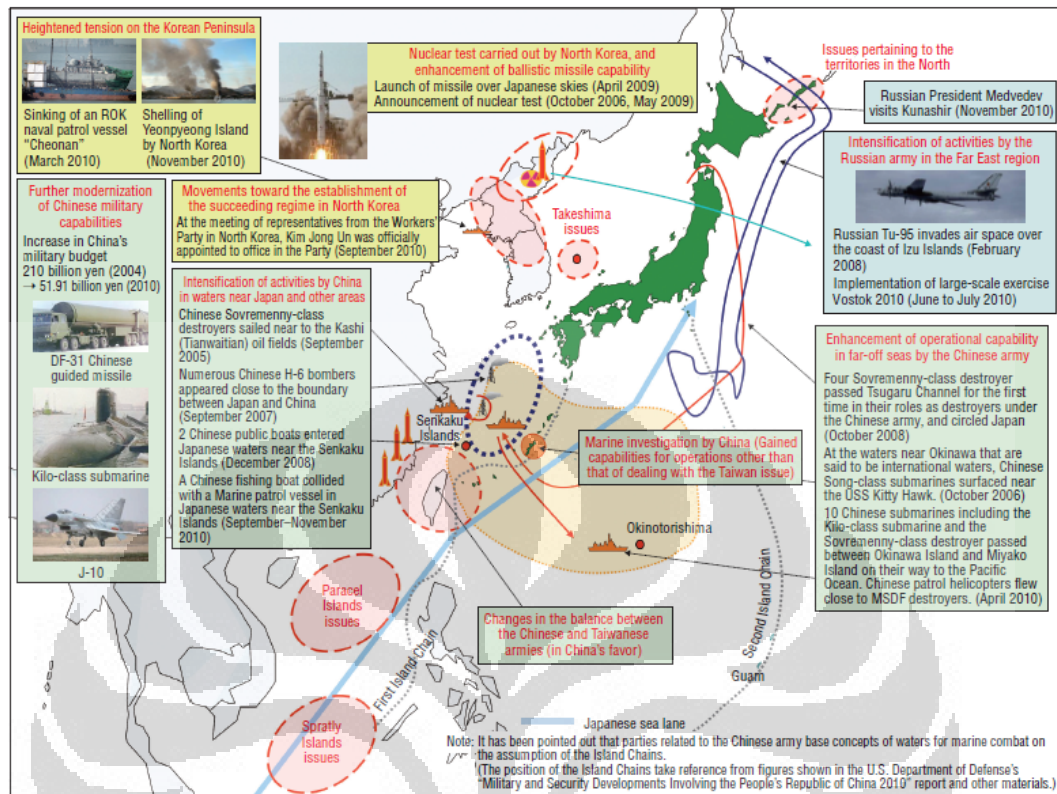
¹³⁹ Scott Snyder, & See-Won Byun, "Cheonan and YeonPyeong: The Northeast Asian Response to North Korea's Provocations", lihat <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/201104SnyderandByun.pdf> diakses pada 28 Mei 2012, pukul 23.15

kekuatannya, China juga memperluas dan mengintensifkan aktifitasnya di wilayah perairan sekitarnya. Tren tersebut, yang disertai dengan ketidaktransparanan China terhadap kegiatan militer dan keamanannya, menjadi perhatian di dalam kawasan maupun di dalam komunitas internasional.

Aktifitas China di sekitar wilayah Jepang tercatat dalam buku putih pertahanan Jepang, diantaranya pada bulan Oktober 2008, 4 kapal laut China, termasuk destroyer kelas *Sovremenny* berlayar melewati Selat Tsugaru mengarah ke selatan ke Samudera Pasifik untuk mengelilingi Jepang. Pada bulan November 2008, tercatat 4 kapal laut, termasuk destroyer kelas *Luzhou* berlayar di antara pulau Okinawa dan pulau Miyako mengarah ke Samudera Pasifik. Pada bulan Juni 2009, 5 kapal laut termasuk destroyer kelas *Luzhou*, juga melalui rute yang sama menuju perairan timur laut pulau Okinotori. Pada bulan Maret 2010, 6 kapal laut termasuk destroyer kelas *Luzhou* melewati rute yang sama pada saat pelayaran November 2008. Pada bulan April 2010, 10 kapal laut, termasuk kapal selam kelas *Kilo* dan destroyer kelas *Sovremenny*, melewati selat antara pulau Okinawa dan pulau Miyako mengarah ke perairan barat pulau Okinotori. Pada saat itu, helikopter shipborne China terbang dengan jarak sangat dekat dengan destroyer Jepang. Pada bulan Juli 2010, 2 kapal laut termasuk destroyer kelas *Luzhou* melewati rute di antara pulau Okinawa dan Miyako mengarah ke Samudera Pasifik. Pada bulan Juni 2011, 11 kapal laut termasuk destroyer kelas *Sovremenny* dan frigate kelas *Jiangkai II* melewati rute di antara Okinawa dan Miyako mengarah ke Samudera Pasifik. Selain mengadakan latihan menembak, mereka juga mengadakan latihan penerbangan helikopter airborne dan UAV. Selain itu, pada bulan September 2010, kapal nelayan China berpapasan dengan kapal patroli JCG di wilayah territorial Jepang dekat kepulauan Senkaku, yang sempat membuat hubungan China dan Jepang memanas.¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Defense of Japan 2011*, hlm. 82

Gambar 3.3. Aktivitas Terkait Keamanan Di Wilayah Sekitar Jepang



Sumber: *Defense of Japan 2011*, hlm. 146

Selain permasalahan tersebut, Jepang juga memiliki masalah perebutan wilayah sebelah utara dengan Rusia yang sempat memanas belakangan ini dengan kunjungan Presiden Medvedev ke Kunashir pada tahun 2010, dan meningkatnya aktivitas militer Rusia di dekat wilayah tersebut, seperti pesawat Rusia Tu-95 yang memasuki wilayah udara Jepang melalui selat Izu, pada bulan Februari 2008, serta latihan militer dalam skala besar Vostok tahun 2010 yang lalu.

Wilayah di sekeliling Jepang diwarnai dengan benih-benih konflik yang sewaktu-waktu dapat meningkat dan memanas yang dapat berujung pada ketidakstabilan kawasan, maupun berpotensi mengancam keamanan Jepang sendiri.

3.4. Pilihan untuk Re-Aliansi

Pilihan aliansi ulang Jepang saat ini dapat dikatakan sedikit, paling tidak berdasarkan atas argumen dengan mengemukakan logika, bahwa jika Jepang ingin

melakukan aliansi ulang, maka Jepang harus, paling tidak, menemukan calon negara baru yang lebih atau hampir sama dengan partnernya saat ini; atau memiliki kekuatan yang dapat menutupi pertahanan Jepang yang berpusat pada pertahanan diri, yang dapat menjamin keamanan Jepang dari ancaman terhadap keamanan Jepang. Artinya Jepang harus dapat menemukan negara yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang kuat atas dasar alasan kondisi geografis Jepang yang berupa negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, negara yang memiliki kemampuan ofensif yang kuat, karena Jepang tidak cukup memiliki kekuatan untuk menyerang balik musuh jika diserang, dan negara yang paling tidak memiliki nuklir untuk daya tangkal, mengingat ancaman utama yang timbul di kawasan adalah meningkatnya ancaman terhadap senjata nuklir.

Untuk mencari negara yang dapat menandingi kekuatan militer AS saat ini tampaknya sulit. Dari pilihan tersebut di atas paling tidak kita bisa mengecilkan beberapa kandidat yang mungkin dapat menggantikan AS sebagai partner Jepang saat ini, yaitu Rusia, sebagai mantan kekuatan penantang AS pada masa Perang Dingin, atau China, sebagai kekuatan dunia yang tengah meningkat, yang diperkirakan akan menjadi pesaing bagi AS dalam perebutan hegemoni dunia di masa yang akan datang.

Dari segi kekuatan, kedua negara tersebut merupakan salah satu kekuatan besar dunia, walaupun pada saat ini Rusia tengah menurun. Keduanya memiliki senjata nuklir, dan kekuatan ofensif untuk menyerang balik. Hubungan ekonomi di kawasan, khususnya hubungan ekonomi bilateral dengan masing-masing negara mengalami peningkatan dan ketergantungan di antaranya, bahkan saat ini sudah melebihi AS. Akan tetapi permasalahannya adalah faktor sejarah, dan faktor perebutan wilayah yang masih cukup kuat mewarnai hubungan antar negara tersebut.

Rusia dan Jepang belum menandatangani perjanjian perdamaian semenjak masa perang, dan latar belakang rivalitas sejarah yang mewarnai hubungan kedua negara, mulai dari tahun 1905 ketika Jepang berhasil menaklukkan Rusia, sampai kedua pihak menjadi musuh dalam Perang Pasifik. Permasalahan lainnya adalah perebutan kepulauan Kuril yang masih berlangsung hingga saat ini, dimana aksi provokasi dan saling klaim dilakukan oleh kedua negara. Begitu pula dengan

China, masalah sejarah juga masih mewarnai hubungannya dengan Jepang. Seperti permasalahan kedua belah pihak dalam melihat sejarah, sampai permasalahan kunjungan pejabat atau politisi Jepang terhadap kuil Yasukuni yang dapat membuat hubungan keduanya memanas. Ditambah permasalahan territorial, yaitu perebutan kepulauan Senkaku atau Diaoyu, yang masih berlangsung hingga kini.

Pilihan dalam aliansi akan semakin mengecil, mengingat beberapa hal di antaranya adalah, hubungan antara Jepang-AS di bawah aliansi telah terjalin lebih dari setengah abad, dan selama itu Jepang telah menikmati perlindungan keamanan yang diberikan oleh AS, meskipun terdapat pasang surut dalam hubungan tersebut. AS sebagai kekuatan yang mendominasi dunia setelah berakhirnya Perang Dingin, dapat memberikan perlindungan atas kekurangan pertahanan Jepang, baik dalam hal membalas serangan jika diserang atau memberikan daya tangkal nuklir kepada Jepang, dengan jangkauan kekuatan yang melebihi batas kondisi geografis. Selain itu, hubungan Jepang dengan negara-negara di kawasan masih kerap diwarnai dengan isu-isu perebutan territorial yang sensitif, ditambah peninggalan luka lama masa lalu yang pernah diperbuat Jepang. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan terhadap platform atau sistem persenjataan Jepang terhadap AS yang telah dibangun semenjak pasca perang, yang akan membuat Jepang sulit untuk lepas dari AS dalam waktu yang singkat tanpa memikirkan perubahan platform persenjataan yang telah dibangun selama ini.

3.2.5. Kepentingan Strategis

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketergantungan tidak langsung berbeda dengan ketergantungan langsung yang menitikberatkan pada kebutuhan negara terhadap bantuan yang diberikan ketika berada dalam sebuah konflik. Ketergantungan tidak langsung yang digambarkan melalui kepentingan strategis masing-masing negara, dimana menurut Snyder ketergantungan tidak langsung ini mengacu pada kebutuhan untuk memblok peningkatan kekuatan musuh.

Kepentingan strategis Jepang di kawasan Asia Timur yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mengurangi hadirnya ancaman militer langsung dan menciptakan lingkungan internasional yang mendukung strategi regionalnya. Secara umum, Jepang khawatir bahwa kebangkitan China dapat menjadi tantangan bagi ambisi perkembangannya. Jepang memandang bahwa kebangkitan China, isu nuklir Korea, dan situasi di Selat Taiwan menjadi ancaman utama bagi keamanannya.¹⁴¹

Tujuan strategi AS pasca Perang Dingin adalah untuk mencegah munculnya kekuatan besar baru. Strategi ini, pertama kali dikemukakan pada tahun 1992 dalam draf awal *Defense Planning Guidance* untuk tahun 1994-1999. Di sana dinyatakan bahwa strategi utama AS selanjutnya adalah untuk menjaga keunggulan AS dengan mencegah munculnya kekuatan besar baru.¹⁴² Senada dengan strategi tersebut, kepentingan strategis AS jangka panjang di kawasan Asia Timur dipandang memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mengawasi peran Jepang dan juga mencegah resiko yang dapat dihasilkan dengan kebangkitan China sebagai kekuatan kawasan maupun global.¹⁴³

AS digambarkan sebagai negara *superpower* yang keluar sebagai pemenang dalam Perang Dingin. Dalam menghadapi tantangan potensial yang muncul dari China baik secara global maupun kawasan, AS berniat untuk mempertahankan status hegemoninya, terutama di Asia Timur, ketimbang berbagi tempat dengan China ataupun Jepang, atau mundur dari kawasan Asia Pasifik dan hanya menjadi penyeimbang saja. Mengingat hal tersebut, pertimbangan strategis dan kebijakan luar negeri AS di Asia Timur adalah dengan memasukkan Jepang, Korea, dan Taiwan untuk membentuk, minimal, tameng pertahanan, dan/atau, secara maksimal, sebagai busur ofensif untuk menghadapi China.¹⁴⁴

Keduanya memiliki saling ketergantungan untuk mencapai kepentingan strategis mereka, dimana Jepang tergantung pada kehadiran AS sebagai

¹⁴¹ Li Xing, & Zhang Shengjun, "One Mountain with Two Tigers – China and The United States in East Asian Regionalism", *Perspectives on Federalism*, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 125

¹⁴² Christopher Layne, "China's Challenge to US Hegemony", *Current History* (January 2008), hlm. 15

¹⁴³ Li Xing, & Zhang Shengjun, *loc.cit.*, hlm. 115

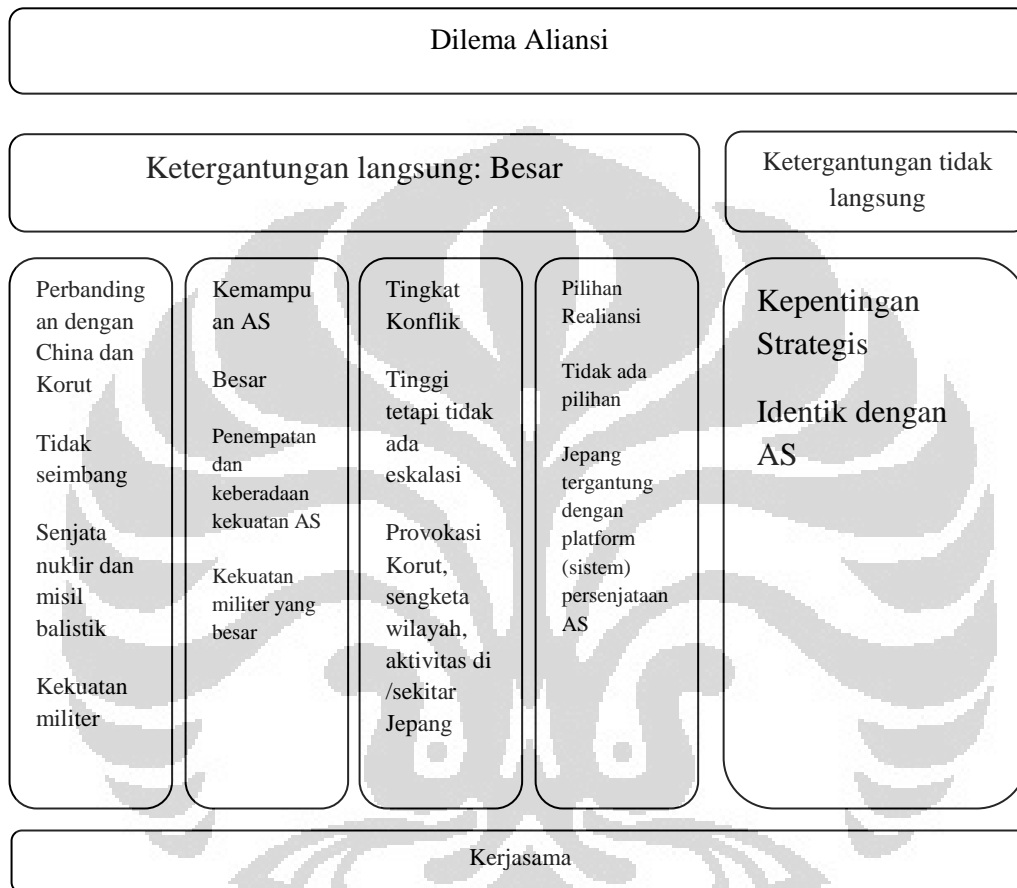
¹⁴⁴ Cheng-Feng Shih, "American Military Posture in East Asia: with a Special Focus on Taiwan", *Taiwan International Studies Quarterly*, Vol. 1, No. 2 (Summer 2005), hlm. 88-87

penyeimbang kekuatan di kawasan Asia Timur untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan, dan sebaliknya AS membutuhkan tempat untuk menempatkan kekuatannya di kawasan tersebut, dan bantuan dari Jepang jika sewaktu-waktu krisis terjadi, walaupun Jepang memiliki kepentingan yang lebih langsung ketimbang AS dalam mencegah kebangkitan China jika melihat faktor geografis.

Dari pembahasan indikator-indikator di atas untuk mengukur tingkat ketergantungan Jepang terhadap partnernya, yaitu AS dalam aliansi Jepang-AS, dapat dilihat bahwa, jumlah kekuatan Jepang yang berada di bawah negara-negara yang memiliki potensi ancaman terhadap negaranya, ditambah kekurangan Jepang dalam hal kekuatan untuk membalas serangan jika diserang dan menangkal kekuatan senjata pemusnah masal (tidak mempunyai cukup senjata ofensif untuk fungsi tersebut, dan senjata nuklir untuk daya tangkal terhadap serangan senjata pemusnah masal yang mungkin ditujukan ke Jepang) membuat Jepang tergantung kepada AS jika diserang. Selanjutnya perbedaan kekuatan antara AS dengan Jepang yang berbeda jauh, terutama dalam hal kepemilikan persenjataan yang telah disebutkan sebelumnya, membuat ketergantungan Jepang terhadap AS semakin besar. Kondisi yang tak tentu dan tak dapat diprediksi di wilayah sekitar Jepang seperti yang tertuang dalam buku putih pertahanannya, membuat Jepang juga tergantung terhadap AS jika sewaktu-waktu konflik pecah di kawasan tersebut. Dan yang terakhir sedikitnya pilihan untuk membentuk aliansi lain juga membuat Jepang tergantung terhadap partnernya saat ini, yaitu AS. Dapat dikatakan dari keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Jepang terhadap AS besar. Sedangkan dari ketergantungan tidak langsung dapat dilihat bahwa kedua pihak saling membutuhkan dalam pencapaian kepentingan strategis mereka, sehingga Jepang juga memiliki semacam posisi tawar terhadap AS, karena Jepang juga memiliki posisi yang penting di mata AS, walaupun jika melihat tingkat kepentingannya, Jepang akan lebih memiliki ketergantungan yang lebih besar, karena potensi ancaman berada langsung di hadapan Jepang.

Jika indikator-indikator tersebut digambarkan dalam bagan yang sederhana, maka kecenderungan Jepang dalam aliansi adalah kerjasama, seperti yang dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3.5. Dilema Aliansi: Kerjasama



BAB 4

ANALISA HUBUNGAN ANTARA PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DENGAN DILEMA ALIANSI

Ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS sebagai partner dalam aliansi, membuat Jepang lebih melihat bahwa resiko ditinggalkan jauh lebih besar melebihi resiko terjatuh dalam konflik AS. Dari pemaparan bab sebelumnya, kecenderungan Jepang dalam aliansi akan lebih mengarah pada pendekatan kerja sama (*cooperate*) ketimbang pembelotan (*defect*).

4.1. Kecenderungan Pilihan Kerjasama Dalam Aliansi

Terdapat beberapa hal penting yang dapat diambil dari pembahasan bab sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pilihan yang dilakukan oleh Jepang dalam hubungan aliansinya dengan AS.

Kondisi keamanan kawasan Asia Timur saat ini salah satunya diwarnai oleh perkembangan misil balistik, yang diperparah dengan kemungkinannya digunakan untuk menghantarkan senjata pemusnah massal. Negara-negara yang mengembangkan persenjataan tersebut diantaranya adalah Korea Utara dan China, negara yang dianggap Jepang memiliki potensi ancaman bagi negaranya seperti yang dikemukakan dalam buku putih pertahanannya semenjak tahun 2004.

Ancaman terhadap misil balistik semakin nyata dirasakan oleh Jepang ketika Korea Utara meluncurkan uji coba misil balistik *Taepodong*-nya pada tahun 1998, yang sempat melewati wilayah Jepang dan jatuh di wilayah perairan Samudera Pasifik. Sikap provokatif serta kemungkinan Korea Utara telah dapat menciptakan senjata nuklir yang dapat dihantarkan dengan misil balistiknya menambah daftar kecemasan Jepang terhadap ancaman misil balistik. Hal yang sama juga datang dari China. Walaupun kebangkitan China dielukan sebagai “kebangkitan damai” akan tetapi melihat langkah yang diambil terhadap Taiwan, meragukan bahwa China tidak akan menggunakannya di bawah kebijakan “*no first use*” karena China telah secara lantang mengatakan bahwa ia tidak akan mentolerir kemerdekaan Taiwan. Hal tersebut tercermin dalam “diplomasi misil” yang China gunakan ketika Krisis Selat Taiwan terjadi pada tahun 1995-1996. Tidak hanya akan merusak kestabilan kawasan, tetapi kekhawatiran Jepang

terseret dalam krisis semacam itu di kawasan juga cukup besar melihat posisinya dalam aliansi dengan AS dan juga tempat pangkalan militer AS.

Dari segi misil balistik, baik dalam hal kemampuan atau pun jumlah, Jepang kalah telak dari kedua negara tersebut. Konstitusi pasca perang Jepang melarang kepemilikan persenjataan semacam itu yang dapat berpotensi digunakan untuk menyerang dan menghancurkan negara lain. Oleh karenanya kecil kemungkinan Jepang mengakuisisi persenjataan ofensif semacam misil *Tomahawk* yang dapat memukul negara lain, seperti situs nuklir dan misil Korea Utara.

Pilihan Jepang akhirnya jatuh kepada pengembangan sistem pertahanan misil balistik (BMD) yang ditawarkan oleh AS. Keikutsertaan Jepang dalam sistem BMD merupakan komitmen jangka panjang dalam aliansi, karena kerja sama tersebut meliputi penelitian dan pengembangan, pengintegrasian, hingga operasional sistem tersebut secara bersama.

Paling tidak dampak kerja sama tersebut terhadap aliansi adalah meningkatnya bagian Jepang untuk melindungi kekuatan AS dalam kontijensi kawasan di masa yang akan datang, menciptakan koordinasi dan integrasi yang lebih kuat dalam menciptakan interoperabilitas di antara kedua belah pihak, serta mendekatkan industri pertahanan Jepang dan AS dengan pengembangan dan produksi bersama sistem anti-misil tersebut.¹⁴⁵

Dalam hal perkembangan kekuatan militer, Jepang lebih menaruh perhatian terhadap China dalam jangka panjang. Secara kasar, jumlah kekuatan militer China lebih banyak dari pada Jepang. Peningkatan anggaran militer China yang mencapai pertumbuhan dua *digit* semenjak tahun 1990, dengan pengecualian tahun 2003 (pertumbuhan 9.6%) dan 2010 (pertumbuhan 7.5%), membuat anggaran pertahanan China telah tumbuh sampai lima kali lipat semenjak akhir 1990-an, begitu pula dengan GDP-nya.¹⁴⁶ Tren ini memperlihatkan bahwa China akan mampu mengembangkan postur pertahanannya lebih jauh lagi dari pada yang ada saat ini.

¹⁴⁵ G. John Ikenberry, & Takashi Inoguchi, *Reinventing the Alliance: US-Japan Security partnership in an Era of Change* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 187-212

¹⁴⁶ Andrew S. Erickson, "The U.S. Security Outlook in the Asia Pacific Region", dalam The National Institute for Defense Studies, *Security Outlook of the Asia-Pacific Countries and Its Implications for the Defense Sector*, NIDS Joint Research Series No. 6, 2011, hlm. 100

Perkembangan pertahanan China berfokus pada pengembangan kekuatan misil dan nuklirnya, kekuatan angkatan laut dan udaranya, serta kemampuannya untuk memperluas jangkauan proyeksi kekuatannya. Di tengah perbedaan kekuatan tersebut, dan kekurangan Jepang dalam hal kekuatan pemukul balik jika diserang, pilihan logis yang dimiliki oleh Jepang dalam konteks aliansi yang telah dibangun dengan AS adalah dengan bekerja sama untuk menghadapi ancaman tersebut.

Untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan Jepang, pilihan strategi kerja sama tersebut didukung oleh poin-poin penting lainnya yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, diantaranya, kekuatan AS sebagai negara yang mendominasi kekuatan militer dunia saat ini, ditambah dengan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatannya di berbagai wilayah di dunia dan kehadiran pasukannya di berbagai pangkalan militernya, terutama di wilayah Asia-Pasifik termasuk Jepang yang dapat memberikan pertolongan dalam waktu secepatnya jika terjadi penyerangan terhadap Jepang, dan kepemilikan senjata ofensif untuk memukul balik lawan dalam kondisi tersebut serta kepemilikan senjata nuklir.

Sulitnya untuk mencari pilihan negara lain untuk menggantikan aliansi yang ada dengan partnernya sekarang, yaitu AS, dilihat dari kelebihan yang dimilikinya termasuk kekuatan militer, daya tangkal nuklir, kehadiran pasukannya, sampai dengan pertimbangan hubungan aliansi yang telah lama terjalin dengannya hingga setengah abad ini, membuat pilihan kerja sama lebih menjanjikan ketimbang pilihan untuk membelot dalam aliansi. Ditambah dengan kesamaan nilai-nilai dasar yang dibagi bersama yang coba disebar di dalam komunitas internasional melalui aliansi, berupa demokrasi, penghormatan atas hukum dan HAM, serta ekonomi kapitalis.¹⁴⁷

Kemungkinan lain jika Jepang memilih strategi pembelotan dalam aliansi selain menemukan negara lain untuk melakukan aliansi ulang, adalah memperkuat dirinya sendiri untuk lebih independen atas dasar kemungkinan ditinggalkan oleh partnernya. Pilihan tersebut membawa Jepang untuk mengisi *gap* dalam

¹⁴⁷ *Defense of Japan*, hlm. 263

pertahanannya yang selama ini diisi oleh AS sebagai partnernya, yaitu kekuatan ofensif untuk memukul balik lawan jika diserang, serta paling tidak senjata nuklir untuk memberikan daya tangkal yang selama ini diberikan oleh AS.

Konstitusi Jepang pasca perang, khususnya pasal 9 merupakan penghalang bagi Jepang untuk memiliki kekuatan ofensif semacam *aircraft carrier* serang, ICBM, sampai pesawat pengebom strategis yang dapat digunakan untuk menyerang negara lain, sehingga Jepang hanya dibatasi memiliki kekuatan untuk tujuan defensif. Wacana mengenai Jepang untuk menjadi negara “normal” pun dikemukakan untuk menghadapi pembatasan konstitusional yang diberlakukan terhadap Jepang sehingga membatasi ruang gerak Jepang dalam mengembangkan kekuatan militernya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah, negara normal yang dipopulerkan oleh Ichiro Ozawa dengan latar belakang kondisi keamanan pasca Perang Dingin, khususnya menanggapi peristiwa Perang Teluk, lebih ditujukan untuk memperluas peran dan tanggung jawab Jepang dalam dunia internasional di tengah pembatasan konstitusional, khususnya dalam usaha Jepang untuk ikut serta dalam kegiatan PKO.¹⁴⁸ Bukan wacana negara normal yang memiliki artian bahwa Jepang berhak untuk menentukan kebijakan pertahanan dan mengembangkan postur militernya tanpa harus dibatasi oleh konstitusi seperti halnya hak yang dimiliki oleh negara normal lainnya, terlebih lagi untuk independen dan terlepas dari aliansi. Meskipun Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militernya (yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab selanjutnya) tetapi perkembangannya tidak menuju pada akuisisi senjata-senjata ofensif yang telah disebutkan sebelumnya, dan wacana amandemen konstitusi pasca perang Jepang yang muncul dalam dekade belakangan belum terwujud hingga saat ini.

Begitu juga halnya dengan kemungkinan pengembangan senjata nuklir oleh Jepang. Permasalahan mengenai senjata nuklir menjadi sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan secara politik dan publik (*nuclear taboo*). Hal tersebut berkenaan dengan trauma rakyat Jepang akan dampak yang dapat ditimbulkan oleh senjata nuklir, yang dirasakan melalui peristiwa pengeboman Hiroshima dan

¹⁴⁸ Yoshihide Soeya, *loc.cit.*, hlm. 3

Nagasaki pada akhir Perang Dunia II, yang kemudian memunculkan “alergi nuklir”.

Walaupun demikian wacana mengenai pengembangan senjata nuklir sempat muncul kembali. Pada tahun 2002, pejabat pemerintahan Jepang, yaitu Abe Shinzo (*Deputy Chief Cabinet Secretary*) dan Fukuda Yasuo, memicu sebuah kontroversi dengan melemparkan pernyataan mengenai kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir. Selain itu pada tahun 2006, para pejabat tinggi Partai Liberal (LDP) yang berkuasa seperti Suzuki Muneo, juga membuka perdebatan mengenai kemungkinan tersebut di dalam Kongres Nasional Jepang.¹⁴⁹ Perdebatan terbuka secara publik mengenai kemungkinan diperlukannya atau tidak kepemilikan atas senjata nuklir oleh Jepang, atau bahkan diperlukannya atau tidak perdebatan itu sendiri, merupakan sebuah perubahan yang sangat besar mengingat tabu nuklir dalam masyarakat Jepang.

Perdebatan ini sebenarnya merupakan perdebatan yang telah lama ada dan muncul kembali setelah didorong oleh ancaman misil balistik Korea Utara dan kemungkinannya dapat menghantarkan senjata nuklir. Sebuah dokumen rahasia Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 1969 mengenai studi terhadap kemungkinan pengembangan senjata nuklir, yang kemudian dibocorkan oleh salah satu pihak yang terlibat di dalamnya kepada Mainichi pada tahun 1994, menyatakan pentingnya opsi mengenai kepemilikan senjata nuklir. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian isi yang dikemukakan dalam studi tersebut.¹⁵⁰

“For the time being, we will maintain the policy of not possessing nuclear weapons. However, regardless of joining NPT or not, we will keep the economic and technical potential for the production of nuclear weapons, while seeing to it that Japan will not be interfered with in this regard.”

¹⁴⁹ Mike M. Mochizuki, “Japan Tests The Nuclear Taboo”, *Nonproliferation Review*, Vol.14, No.2 (July, 2007), hlm. 305

¹⁵⁰ Selig S. Harrison, “Japan and Nuclear Weapon”, dalam *Japan’s Nuclear Future: The Plutonium Debate and East Asian Security*, Washington: Endowment, 1996, hlm. 9

Selain itu, dokumen lain yang menyatakan mengenai kemungkinan kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang adalah Buku Putih Pertahanan Jepang yang dikeluarkan pada tahun 1970.¹⁵¹

“There are nihilistic feelings about nuclear weapons prevailing among the people... Japan should not acquire weapon which pose a threat to other countries, such as intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and strategic bombers. As for defensive nuclear weapons, it would be possible in a legal sense to possess small-yield, tactical, purely defensive nuclear weapons without violating the Constitution. In view of the danger on inviting adverse foreign reactions and large-scale war, we will follow the policy of not acquiring nuclear weapons at present.”

Kedua dokumen tersebut paling tidak mengindikasikan bahwa Jepang dapat memiliki senjata nuklir suatu saat dengan potensi ekonomi maupun teknis yang dimilikinya serta kemungkinan interpretasi terhadap konstitusi yang memandang nuklir sebagai senjata defensif. Resiko yang diakibatkan atas kepemilikan senjata nuklir tampaknya masih lebih besar dibandingkan manfaat yang ditimbulkannya, sehingga membuat Jepang untuk memilih tidak memiliki senjata nuklir, dan tetap berada di bawah perlindungan “payung nuklir” AS.

Dalam kerangka strategis, Jepang mengesampingkan kepemilikan senjata nuklir karena sebuah negara kepulauan dengan populasi yang padat akan sangat rawan dengan serangan nuklir *pre-emptive*. Dan yang tidak kalah penting, kepemilikan senjata nuklir dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal bagi ekonomi, yang dapat menutup akses ke pasar asing serta kesempatan investasi.¹⁵²

Penolakan terhadap senjata nuklir lebih jauh juga dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang pasca perang. Diantaranya adalah penerapan *Atomic Energy Basic Law* pada tahun 1955, yang membatasi Jepang dalam menggunakan nuklir untuk kepentingan damai; Tiga Prinsip Non-Nuklir (*hikaku sangensoku*) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Eisaku Sato, yang kemudian diterapkan dalam kebijakan pemerintah Jepang, yaitu

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 5

untuk tidak memiliki, tidak membuat, dan tidak memperkenalkan senjata nuklir ke dalam Jepang; serta penandatanganan dan ratifikasi *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).¹⁵³ Kemungkinan Jepang untuk memiliki senjata nuklir dalam waktu dekat ini tampaknya tidak menjadi pilihan Jepang, terlebih setelah insiden bocornya reaktor nuklir Fukushima pada bencana gempa bumi yang menimpa Jepang tahun 2011 lalu yang pasti membuat trauma publik Jepang terhadap nuklir, walaupun hal tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelitian yang lebih lanjut.

Pilihan Jepang dalam hal ini adalah dengan bekerja sama dengan AS di bawah perlindungan payung nuklirnya. Pilihan ini dapat dilihat dari pengenduran kebijakan tiga prinsip non-nuklir Jepang yang masih diberlakukan hingga saat ini, khususnya dalam poin larangan pengenalan senjata nuklir ke wilayah Jepang. Jepang mengendurkan larangan tersebut terhadap senjata nuklir yang dibawa oleh AS ke dalam wilayah Jepang yang digunakan untuk memperkuat daya tangkal yang dimilikinya, dengan penekanan bahwa hal tersebut dilakukan di bawah sepengetahuan dan konsultasi dengan pemerintahan Jepang.

Walaupun hal tersebut masih menjadi perdebatan, akan tetapi “pelanggaran” terhadap poin larangan pengenalan senjata nuklir ke wilayah Jepang, sudah terjadi semenjak Perang Dingin dengan adanya perjanjian rahasia pada akhir tahun 1960-an yang bocor ke publik pada tahun 2009 dan dibenarkan oleh tim peneliti yang dibentuk Kementerian Luar Negeri untuk melihat kasus tersebut pada tahun 2010 yang lalu. Perjanjian tersebut diantaranya menyebutkan diperbolehkannya kapal perang AS untuk membawa senjata nuklir ke pelabuhan Jepang, diizinkan militer AS untuk menggunakan pangkalan di Jepang tanpa konsultasi sebelumnya jika terjadi krisis militer di Semenanjung Korea, dan perjanjian antara PM Eisaku Sato dan Presiden Nixon untuk memperbolehkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Okinawa jika terjadi krisis militer di kawasan.¹⁵⁴

¹⁵³ Mike M. Mochizuki, *loc.cit.*, hlm. 305

¹⁵⁴ Eric Johnston, “Slowly secret US Nuke Deals Come to Light”, *The Japan Times*, 20 November 2009, lihat <http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20091120f3.html> ; “Japan Confirms Secret Pact on US Nuclear Transit”, *BBC News*, 9 Maret 2010, lihat <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8557346.stm>

Poin penting lainnya adalah mengenai intensitas konflik yang terjadi di kawasan sekitar Jepang akan mempengaruhi keamanan Jepang sendiri dan kecenderungan pilihannya dalam aliansi. Sebenarnya meningkatnya intensitas konflik dan pilihan strategi Jepang dalam aliansi untuk menuju pada penguatan aliansi telah berlangsung sejak dulu.

Penguatan aliansi setelah ditandatanganinya *Treaty of Mutual Cooperation and Security Between Japan and the United States of America* pada tahun 1960 terjadi ketika dikeluarkannya perjanjian *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* pada tahun 1978. Perjanjian tersebut didorong oleh kondisi keamanan yang ada pada saat itu. Setelah berakhirnya Perang Vietnam dan dikeluarkannya *Nixon Doctrine* pada tahun 1969, AS mulai mengurangi jumlah pasukannya di Asia. Selama kunjungan PM Eisaku Sato ke Washington pada bulan November 1969, Presiden Richard Nixon mendorongnya untuk meningkatkan pembagian beban yang ditanggung oleh AS di Asia. Pada tahun bulan Desember 1970, diumumkan bahwa jumlah pasukan AS di Jepang akan dikurangi sebanyak 12,000 personel.¹⁵⁵ Selain itu kebijakan AS mengenai pengurangan pasukan di wilayah Asia lebih jauh lagi diumumkan oleh Pemerintahan Presiden Carter pada tahun 1977. Jumlah kekuatan AS di Asia turun dari 616,600 pada tahun 1970 menjadi 99,400 di tahun 1979. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan AS yang berada di Okinawa berkurang dari 82,200 menjadi 46,200 dalam periode yang sama.¹⁵⁶ Hal tersebut ditambah dengan peningkatan militer yang dilakukan oleh Uni Soviet di wilayah Timur Jauh.

Perkembangan aliansi selanjutnya terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin, dengan dikeluarkannya *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* pada tahun 1997. Penguatan aliansi dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut didasari atas latar belakang kondisi keamanan pasca Perang Dingin. Kejadian Perang Teluk pada awal 90-an serta krisis nuklir Korea Utara, yang menunjukkan bahwa Jepang tidak mampu memberi dukungan kepada partnernya di saat krisis,

¹⁵⁵ Michael J. Green, & Koji Murata, "The 1978 Guidelines for the U.S.-Japan Defense Cooperation: Process and the Historical Impact", diakses dari <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/japan/GreenMurataWP.htm> pada 28 Mei 2012, pukul 19.00

¹⁵⁶ Neil Renwick, *op.cit.*, hlm. 60

serta krisis selat Taiwan pada tahun 1995-1996, mendorong Jepang dan AS untuk kembali memperkuat aliansi.

Ancaman yang semakin meningkat dengan perkembangan misil balistik di kawasan Asia Timur mendorong Jepang memutuskan untuk ikut serta dalam kerja sama sistem pertahanan misil dengan AS, melalui BMD. Selain itu, kondisi keamanan pasca 9/11 memberikan momentum kepada Jepang dalam kontribusinya di dalam aliansi. Jepang mendukung kebijakan AS dengan mengirimkan pasukannya ke Afghanistan dan Irak, di bawah undang-undang baru yang diberlakukan menanggapi perkembangan keamanan pada saat itu. Di balik permukaannya, implikasi dari dukungan Jepang terhadap perang di Afghanistan dan dukungan terhadap perang AS terhadap Irak sangat berbeda. Perang di Afghanistan adalah kasus keamanan internasional yang didukung oleh mayoritas komunitas internasional, sementara perang terhadap Irak tidak. Kasus dukungan Jepang terhadap Irak, menunjukkan bahwa jika terjadi *gap* antara kebijakan AS dengan komunitas internasional, maka Jepang pada akhirnya akan mengikuti kebijakan AS.

Bentuk kerja sama yang tertuang dalam *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* antara lain adalah kerja sama di bawah kondisi normal, seperti tukar informasi dan konsultasi kebijakan; dialog keamanan dan pertahanan; UNPKO dan operasi kemanusiaan internasional; perencanaan kebijakan pertahanan dan kerjasama mutual; meningkatkan latihan bilateral; dan membentuk mekanisme koordinasi bilateral. Selanjutnya adalah kerjasama dalam merespon serangan terhadap Jepang, yang membagi peran dan tugas masing-masing pihak, dimana SDF akan menjalankan operasi defensif, sedangkan pasukan AS akan menjalankan operasi pendukung dan pelangkap SDF sebagai kekuatan ofensif. Dan yang terakhir adalah kerjasama di wilayah sekitar Jepang.

Kerjasama tersebut tidak hanya meliputi diskusi politik bilateral, tetapi juga meliputi operasi militer, seperti kerjasama dalam studi mengenai rencana operasi bersama untuk merespon serangan bersenjata terhadap Jepang, rencana kerjasama mutual untuk menghadapi situasi di sekitar Jepang dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut kedua belah pihak tidak hanya melakukan latihan pos

komando konvensional dan latihan lapangan antar unit masing-masing, tetapi juga melakukan latihan gabungan dan berusaha untuk meningkatkan interoperabilitas.

Oleh karenanya, SDF melakukan berbagai latihan gabungan dengan pasukan AS, semenjak pertama kali secara resmi tertuang dalam *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* tahun 1978. Latihan gabungan lapangan yang digelar pada Desember 2010, merupakan latihan yang kesepuluh kali semenjak tahun 1985 (dan ke-18 kalinya untuk latihan pos komando), yang dilakukan dalam skala besar dan mendatangkan pengamat dari Korea Selatan. Sebagai bagian dari latihan gabungan Jepang-AS lainnya, latihan pos komando gabungan angkatan darat regional Jepang-AS, latihan khusus anti-kapal selam, latihan tempur gabungan pesawat tempur Jepang-AS, dan latihan gabungan lainnya pun diadakan, dan usaha untuk meningkatkan interoperabilitas kedua belah pihak terus dilakukan.¹⁵⁷

Jepang juga berpartisipasi dalam latihan gabungan trilateral atau pun multilateral dengan AS dan negara lain. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dengan AS di bermacam situasi dan lapangan. Pasukan AS yang ditempatkan di Jepang juga berpartisipasi dalam latihan keadaan darurat yang diorganisir oleh pemerintah lokal untuk memperdalam kerjasama dengan institusi terkait dan pemerintah lokal. Lebih jauh lagi, setelah peristiwa bencana gempa bumi besar, pasukan AS mengadakan operasi bantuan bencana di bawah kode Operasi Tomodachi dan bekerjasama dengan SDF, mempraktekkan kemampuan yang telah didapat melalui latihan gabungan Jepang-AS.¹⁵⁸

Dalam hal kerjasama di tingkat internasional, Jepang telah mengirimkan bantuan untuk misi pengisian bahan bakar di Samudera Hindia, sampai kerjasama dengan AS melalui pengiriman pasukannya ke Irak. Selain itu kerjasama juga dilakukan dalam operasi bantuan bencana internasional maupun PKO, seperti halnya misi di Haiti, dimana Jepang menggunakan pangkalan AS di California dan Miami, serta berkoordinasi dengan AS dalam menggunakan Bandara Udara Internasional Haiti untuk menjalankan misi udara untuk pengiriman personel dan barang-barang. Sedangkan dalam operasi anti-bajak laut di Teluk Aden, Jepang

¹⁵⁷ *Defense of Japan 2011*, hlm. 278

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 287

bekerja sama dalam tukar informasi dengan negara lain seperti AS, UE dan organisasi lainnya.¹⁵⁹

Adanya titik temu dalam kepentingan strategis kedua negara membuat aliansi layak untuk dipertahankan bagi kedua belah pihak. Kedua negara sama-sama membutuhkan satu sama lain untuk mengejar kepentingan strategis masing-masing, walaupun mungkin tingkat kepentingannya berbeda antara keduanya. Jepang memiliki kepentingan untuk memblok ancaman yang lebih besar karena ancaman yang datang – khususnya ketika Snyder membicarakan bahwa kepentingan strategis berbicara tentang kepentingan masing-masing negara untuk memblok kekuatan musuh, akan mempunyai dampak yang lebih langsung terhadap Jepang mengingat wilayahnya yang berada pada satu kawasan dengan negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap Jepang, sehingga Jepang lebih membutuhkan bantuan dari AS sebagai partnernya dalam menciptakan kondisi kawasan yang stabil dan jaminan keamanan Jepang.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa Jepang memilih untuk melakukan strategi kerjasama menanggapi posisinya dalam aliansi. Ketika ketergantungan terhadap partner besar yang menyebabkan resiko ditinggalkan lebih besar dari pada resiko untuk terjatuh dalam konflik partner, sebuah pilihan logis bagi Jepang untuk meningkatkan kerjasama dengan AS.

4.2. Pilihan Kerjasama Dalam Aliansi Terkait Dengan Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

Kerangka perjanjian aliansi keamanan Jepang-AS ditandatangani di bawah *Treaty of Mutual Cooperation and Security Between Japan and the United States of America* pada tahun 1960, di mana AS akan memberikan jaminan keamanan terhadap Jepang, dan mendapatkan tempat untuk membangun pangkalan militernya di wilayah Jepang. Kewajiban AS untuk membela Jepang yang tertuang dalam perjanjian tersebut berarti bahwa pihak yang akan berencana melancarkan serangan bersenjata terhadap Jepang, tidak hanya akan berhadapan dengan SDF, tetapi juga kekuatan militer AS.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 287

Perkembangan dalam aliansi terjadi ketika dikeluarkannya perjanjian *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* pada tahun 1978, yang mencakup pembagian tanggung jawab yang lebih jauh di antara kedua belah pihak, dimana kerja sama akan dilakukan dalam hal strategi, intelijen, dan operasi sokongan jika terjadi serangan terhadap Jepang. Di dalamnya juga disebutkan mengenai wilayah operasi masing-masing kekuatan militer, dimana SDF akan melakukan operasi defensif di dalam wilayah Jepang dan wilayah perairan sekitarnya (laut dan udara), dan pasukan AS akan mendukung operasi SDF dan juga melakukan operasi di wilayah-wilayah di luar kemampuan SDF. Perjanjian tersebut memberikan kewenangan publik pertama bagi JSDF dan pasukan AS untuk melakukan latihan bersama.

Selama akhir tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an, atas dorongan dari AS agar Jepang mengambil porsi yang lebih besar dalam pembagian beban keamanan, serta dalam menghadapi peningkatan militer yang dilakukan oleh Uni Soviet di wilayah Timur Jauh, Jepang meningkatkan kapabilitasnya dan meningkatkan kerja sama dengan AS. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan pemerintahan Jepang pada saat itu untuk menanggapi dorongan ini, yaitu peningkatan anggaran pertahanan yang sempat menembus angka 1% dari jumlah GDP oleh PM Nakasone, dan juga perluasan tanggung jawab SDF terhadap keamanan perairan sekitar Jepang yang mencakup 1.000 nautical mil dari batas laut ke arah selatan dan tenggara. Secara garis besar, pembagian peran dan misi dalam aliansi masih berkuat dalam kerangka AS akan memegang operasi ofensif, dan Jepang bertanggung jawab terhadap semua operasi defensif di dalam wilayah Jepang dan wilayah perairan Jepang. Meskipun dominasi kebijakan pertahanan Jepang masih didominasi oleh kebijakan pasifis, yang lebih dikenal dengan *Yoshida doctrine*, dimana Jepang menyerahkan sebagian besar masalah keamanannya di tangan AS, sehingga Jepang dapat berkonsentrasi pada pembangunan perekonomiannya.

Akan tetapi, dengan berakhirnya Perang Dingin perubahan besar dalam hubungan aliansi Jepang-AS pun tak dapat terelakkan. Selama Perang Dingin, karakteristik geografis Jepang, yang membuatnya dijadikan sebagai benteng pembendung kekuatan Uni Soviet untuk masuk ke wilayah Pasifik, berkontribusi

besar bagi pertahanan AS, dan blok Barat secara keseluruhan. Hal tersebut membuat Jepang dapat berdiri di bawah aliansi yang tidak seimbang, dimana Jepang dapat menyerahkan sebagian besar masalah keamanannya kepada AS, dan perjanjian keamanan Jepang-AS diperkuat hanya dalam kerangka pertahanan Jepang.

Tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin, perubahan di dalam lingkungan keamanan pun terjadi. Ancaman baru muncul dari munculnya berbagai konflik di berbagai wilayah sampai pada proliferasi senjata nuklir dan pengembangan misil balistik. Walaupun Jepang tetap berkontribusi sebagai tuan rumah yang memberikan tempat pasukan AS, tetapi hal tersebut tidaklah cukup. Aliansi akan goyah jika muncul situasi yang dapat mempengaruhi keamanan Jepang di wilayah sekitar Jepang, tetapi Jepang hanya duduk diam dan menyerahkannya pada AS, dan tidak memberikan dukungan dan bantuan kepada AS. Situasi keamanan yang baru menuntut Jepang untuk bertindak lebih aktif dan meninggalkan sikap pasifis isolasionisnya.

Posisi Jepang dalam aliansi tidak lagi bisa “*take it for granted*” terhadap jaminan keamanan yang diberikan oleh AS. Hubungan di dalam aliansi harus diarahkan pada hubungan yang lebih setara, dimana Jepang harus mengambil bagian yang lebih besar dibandingkan ketika Perang Dingin dan melaksanakan kewajibannya dalam aliansi tersebut agar tidak ditinggalkan oleh partnernya dalam aliansi. Disebutkan dalam dilema aliansi bahwa komitmen yang lemah dan tidak/sedikit memberikan bantuan terhadap partnernya dalam aliansi, serta ketergantungan yang tinggi terhadap partner, akan membuat Jepang beresiko ditinggalkan dibandingkan terjerat dalam konflik musuh.

Hal tersebut yang terjadi pada Jepang pasca Perang Dingin, dimana Jepang tidak dapat merespon panggilan AS maupun dunia internasional dalam Perang Teluk dan juga Krisis Semenanjung Korea pada awal tahun 1990-an. Jepang dan AS kemudian mengeluarkan revisi *Guidelines for Japan-US Defence Cooperation* pada tahun 1997, yang mengakomodir perluasan peran Jepang, terutama dalam kaitannya menanggapi situasi di sekitar Jepang (*situation in Japan surrounding area*).

Peningkatan kapabilitas militer Jepang pun tidak terlepas dari usaha Jepang untuk mengurangi ketergantungannya terhadap AS agar dapat lebih setara sehingga dapat menjalankan kewajibannya dalam aliansi. Walaupun masih pada kerangka dasar yang sama dimana Jepang tetap memegang peran dan misi defensif dalam rangka pengamanan wilayahnya dan perairan Jepang, dan AS memegang operasi dukungan dan pelengkap kekuarangan yang dimiliki oleh SDF, yaitu misi ofensif.

Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang masih berada dalam ruang lingkup aliansi, bukan untuk keluar dan lepas dari aliansi. Untuk melihat hal tersebut kita dapat melihat arah peperangan dan senjata yang terlahir pada masa ini melalui RMA. Kita memasuki peperangan generasi ke-5, dimana revolusi militer mengarah pada penggunaan senjata nuklir dan sistem penghantar balistik misil. Dengan ciri persenjataan yang dihasilkan dari RMA ini adalah daya hantam dan kemampuanintai yang presisi, daya siluman, komputerisasi dan kontrol dan komando melalui jaringan computer, dan meningkatnya kemampuan munisi konvensional.¹⁶⁰

Arah perkembangan teknologi persenjataan dan doktrin pertahanan yang coba dikembangkan oleh Jepang mengarah pemanfaatan IT seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan jaringan dan kemampuan C4ISR (penggunaan teknologi satelit, teknologi pesawatintai, UAV, dll), meningkatkan kecepatan dan keterhubungan antar angkatan, terutama dalam hal komando dan kontrol (teknologi yang dipasang dalam Tank tipe-10 dan helikopter serang, dll.), meningkatkan efektifitas dan efisiensi perang (peningkatan kemampuan dan modernisasi pesawat tempur, pengembangan misil, pembuatan destroyer multi-fungsi, dll.), memperluas ruang lingkup operasional (pengadaan pesawat pengisi bahan bakar, dll.), meningkatkan perlindungan sistem informasi penting, memperluas interoperabilitas dengan pihak lain, khususnya AS (keikutsertaan BMD, pemilihan pesawat tempur generasi selanjutnya F-35, dll.), sampai mengurangi ketergantungan terhadap AS (pernelitian satelit infra-merah, dll.).

¹⁶⁰ Williamson Murray, & Macgregor Knox, *The Dynamics of Military Revolution 1300-2050* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 13

Contoh-contoh unit senjata yang dipaparkan dalam bab 2 merupakan contoh perkembangan alutsista Jepang yang menerapkan teknologi yang berbasis integrasi sistem, seperti yang ada pada MBT Tipe-10, Helikopter Serang AH-60D *Apache*, serta misil untuk pertahanan udara Chu-SAM. Sedangkan pemilihan pesawat tempur Jepang generasi selanjutnya yang jatuh pada pesawat tempur F-35 Lightning II, lebih dikarenakan alasan aliansi dengan AS yaitu interoperabilitas sistem senjata di masa mendatang.¹⁶¹ Sedangkan pengadaan kapal destroyer pembawa helikopter merupakan respon untuk meningkatkan fungsi utama MSDF – selain menjaga wilayah perairan sekitar Jepang, yaitu misi ASW. Di saat masa krisis atau terjadi penyerangan ke wilayah Jepang, MSDF bertugas melancarkan operasi ASW untuk memberikan jalan dan ruang bagi unit tempur *aircraft carrier* AS sehingga mereka dapat berfokus menjalankan operasi ofensif. Hal tersebut diperkuat dengan bukti pengkonversian helikopter ASW untuk dapat dioperasikan di dek kapal. Rancangan dek datar yang menyerupai *aircraft carrier* ditujukan untuk membawa helikopter tersebut dalam jumlah yang lebih banyak, untuk menghasilkan keefektifan dalam menjalankan misi ASW. Kecurigaan terhadap penggunaan kapal tersebut sebagai *aircraft carrier* mungkin belum terbukti karena Jepang belum melakukan pengadaan pesawat tempur VTOL semacam F-35B yang masih dalam pengembangan hingga saat ini, sedangkan Jepang memilih F-35A yang merupakan varian dengan pendaratan dan lepas landas sistem konvensional.¹⁶²

Kata kunci yang menjadi sangat penting untuk melihat jawabannya adalah pengembangan C4ISR. Jepang akan mengintegrasikan dan meningkatkan interoperabilitas dengan kekuatan yang dimiliki AS. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan Jepang dalam BMD, sistem pengintai melalui satelit, sistem kontrol dan komando yang ditempa melalui latihan militer gabungan Jepang-AS, ditambah dengan transfer sistem pertahanan AS (produksi bersama pesawat

¹⁶¹ Untuk lebih jelas, dapat dilihat melalui wawancara dengan Christopher Huges, Profesor politik internasional dan studi Jepang di Universitas Warwick dalam “Japan Officially Selects F-35” di <http://the-diplomat.com/flashpoints-blog/2011/12/20/japan-offically-selects-f-35/> diakses pada 1 Juni 2012, pukul 19.00

¹⁶² Yoji Koda, “A New Carrier Race?: Strategy, Force Planning, and JS Hyuga”, *Naval War College Review*, Vol. 64, No. 3 (Summer, 2011)

tempur F-15, penjualan kapal perang yang dilengkapi Aegis, transfer pesawat peringatan dini 767 AWACS) yang telah dilakukan melalui program bantuan keamanan semenjak 1950-an, bertujuan untuk memperkuat partner dan juga meningkatkan interoperabilitas melalui penggunaan sistem pertahanan AS.¹⁶³

Interoperabilitas dan itegrasi sistem akan menyebabkan sistem keamanan yang dimiliki Jepang mau tidak mau akan berhubungan erat pada AS, dan bukan hal yang mudah untuk lepas dari sistem yang telah diintegrasikan selama ini, sehingga pilihan Jepang untuk memperkuat kapabilitas militer di luar konteks aliansi Jepang-AS kemungkinannya sangat kecil. Ditambah Jepang tidak menunjukkan akuisisi ke arah persenjataan ofensif seperti ICBM atau pesawat bomber strategis, dan juga kecil kemungkinan Jepang melakukan proliferasi senjata nuklir.

¹⁶³ Gregg A. Rubinstein, "Armaments Cooperation in U.S.-Japan Security Relations", dalam *United States –Japan Strategic Dialogue: Beyond the Defense Guidelines, Policy Recommendations for the New Millennium*, Pacific Forum CSIS, Vol. 1, No. 1, 2001, hlm. 91

BAB 5

KESIMPULAN

Peningkatan kapabilitas militer Jepang yang lebih mengarah pada modernisasi kekuatan militernya disebabkan oleh dilema aliansi yang muncul dalam hubungannya dengan AS. Jepang berada dalam posisi yang dihadapkan pada dua pilihan sulit yaitu memilih untuk bekerja sama (*cooperate*) atau membelot (*defect*). Bekerjasama berarti memberikan komitmen yang kuat dan dukungan penuh terhadap partner aliansi dalam konflik dengan musuh. Sedangkan membelot berarti menunjukkan komitmen yang lemah dan tidak memberikan dukungan dalam konflik dengan musuh. Keduanya sama-sama akan menempatkan sebuah negara dalam pilihan yang sulit, dimana jika negara memberikan komitmen yang terlalu kuat terhadap partner, negara akan lebih besar terkena resiko jeratan ke dalam konflik partner aliansinya (*entrapment*). Sedangkan jika memberikan komitmen yang samar dan lemah terhadap partner dalam aliansi maka akan terkena resiko ditinggalkan (*abandonment*).

Tingkat ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS dalam aliansi tersebut membuat Jepang berada dalam posisi bahwa resiko untuk ditinggalkan melebihi resiko terjerat dalam konflik partner. Interoperabilitas dan integrasi sistem akan menyebabkan sistem keamanan yang dimiliki Jepang mau tidak mau akan berhubungan erat pada AS, dan bukan hal yang mudah untuk lepas dari sistem yang telah diintegrasikan selama ini, sehingga pilihan Jepang untuk memperkuat kapabilitas militer di luar konteks aliansi Jepang-AS kemungkinannya sangat kecil. Ditambah Jepang tidak menunjukkan akuisisi ke arah persenjataan ofensif seperti ICBM atau pesawat bomber strategis, dan juga kecil kemungkinan Jepang melakukan proliferasi senjata nuklir. Ketergantungan Jepang yang besar terhadap AS membuat Jepang memilih untuk bekerjasama dalam ruang lingkup aliansinya tersebut.

Peningkatan kapabilitas militer Jepang pun tidak terlepas dari usaha Jepang untuk mengurangi ketergantungannya terhadap AS agar dapat lebih setara sehingga dapat menjalankan kewajibannya dalam aliansi. Hal tersebut dirasakan makin nyata setelah Perang Dingin berakhir, dimana Jepang tidak lagi mempunyai

“kemewahan” untuk menikmati perlindungan keamanan dari AS tanpa berbuat banyak.

Perbedaan yang tampak pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin adalah kepentingan strategis AS. Kepentingan strategis AS pada masa Perang Dingin lebih besar terhadap keamanan Jepang, dimana Jepang dipandang sangat penting untuk memblok kekuatan dan pengaruh Uni Soviet ke wilayah Pasifik. Hal tersebut berbeda ketika Perang Dingin berakhir dan AS menjadi pemenangnya. Kepentingan strategis AS di wilayah tersebut masih tetap besar, akan tetapi tidak sebesar ketika Perang Dingin berlangsung. Meningkatnya ancaman baru, terutama proliferasi senjata nuklir dan misil balistik, membuat kepentingan strategis Jepang di kawasan tersebut menjadi semakin besar, ditambah ancaman tersebut berada lebih dekat dan berpengaruh langsung terhadap keamanan wilayahnya. Perbedaan tersebutlah yang membuat Jepang masih dapat bersikap lebih pasif ketika Perang Dingin, dan lebih diterima oleh partner aliansinya, yaitu AS, walaupun Jepang juga harus meningkatkan kekuatannya atas dorongan AS. Akan tetapi hal tersebut bergeser setelah berakhirnya Perang Dingin, yang membuat Jepang harus lebih aktif, yang mendorong pada peningkatan kekuatan kapabilitas militernya.

Satu hal penting yang harus diperhatikan, bahwa konstitusi pasca perang tidak berlaku absolut. Interpertasi dan perluasan terhadap konstitusi pun dilakukan Jepang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin konstitusi tersebut membatasi ruang gerak Jepang dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan pertahanannya, akan tetapi sebuah hal yang positif, di satu sisi konstitusi tersebut dapat berfungsi sebagai pengerem agar Jepang tidak jatuh terlalu jauh terjat dalam perangkap (*entrapment*) aliansi jika partner berada dalam suatu konflik, dan di sisi lain konstitusi tersebut dapat memberikan penjaminan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang tidak keluar dari koridor pertahanan bersifat defensif, untuk menghadapi ketakutan dari pihak-pihak yang cemas bahwa Jepang dapat kembali pada masa lalunya yang kelam dan agresif dalam hal militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arthur Alexander. (1993). *Of Tanks and Toyota: An Assessment of Japan's Defense Industry*. New York: RAND.
- Ashley J.T., & Janice Bially. (2000). *Measuring National Power in the Postindustrial Age*. New York: Rand.
- Biddle, Stephen. (2004). *Military Power: Explaining Victory and Defeat In Modern Battle*. New Jersey: Princeton University Press.
- Crawford, Natalie W., & Chung In Moon. (Ed.). (2000). *Emerging Threats, Force Structures, and The Role of Air Power in Korea*. New York: RAND.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 2nd edition, New York: Oxford University Press.
- Selig S. Harrison. (1996). *Japan's Nuclear Future: The Plutonium Debate and East Asian Security*. Washington: Endowment.
- Henshall, Kenneth G. Henshall. (2004). *A History of Japan: From Stone Age to Super Power*, 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Holsti, Ole R. (1995). "Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and It's Challenges", dalam Charles W. Kengley (ed.), *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges*. New York: Saint Martin's Press.
- Hook, Glenn., Julie Gilson., Christopher W. Hughes, & Hugo Dobson. (2001). *Japan's International Relations: Politics, Economics and Security*. London: Routledge.
- Hughes, Christopher W. (2009). *Japan's Remilitarisation*. New York: Routledge.
- Ikenberry, G. John., & Takashi Inoguchi. (2003). *Reinventing the Alliance: US-Japan Security partnership in an Era of Change*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kingston, Jeffrey. (2001). *Japan in Transformation 1953-2000*. Edinburg Gate: Pearson Education Limited.

- Kingston, Jeffrey. (2011). *Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change Since the 1980s*. West Sussex: Willey-Blackwell.
- Levin, Norman D. (1988). *Japan's Changing Defense Posture*. Santa Monica, CA: RAND.
- Murray, Williamson., & Macgregor Knox. (2001). *The Dynamics of Military Revolution 1300-2050*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nautilus Institute. (2009). *About Face: Japan's Remilitarisation*. Melbourne: Richard Tanter.
- Paul, T.V., James J. Wirtz, & Michael Fortmann. (2004). *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century*, California: Stanford University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renwick, Neil. (1995). *Japan's Alliance Politics and Defence Production*. New York: Saint Martin's Press.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- The Australian National University, Strategic and Defence Centre. (2003). *Security Trends In The Asia-Pacific Region: An Emerging Complex Arms Race*. Canberra: Desmond Ball.
- The International Institute for Strategic Studies. (2002-2011). *Military Balance 2002-2011*. London: Taylor&Francis.
- Viotti, P.R., & Mark V. Kauppi. (2010). *International Relations Theory 4th edition*. New York: Pearson Education, Inc.

Tesis dan Disertasi

- Amril, Oslan. (2006). *Pasukan Bela Diri (Self Defense Force) Dan Masalah Pertahanan Jepang: Analisis Kebijakan Pertahanan Jepang*. Tesis Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia.
- Juwana, Hikmahanto. (1997). *The Right of State to Establish and Build Up Military Defence Capability: Japan As A Case Study*. Disertasi, University of Nottingham.

- Kaori Urayama. (2008). *Missile Defense, U.S.-Japan Alliance and Sino-Japan Relations, 1983-2007*. Disertasi, Boston University.
- Pohan, Mochamad Raga Saputra. (2010). *Dinamika Persenjataan Di Asia Timur Antara China dan Jepang*. Tesis program Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

Artikel dalam Jurnal

- Betts, Richard K. "Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States after the Cold War". *International Security*, Vol. 18, No. 3, 1993.
- Calder, Kent. "Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State". *World Politics*, Vol. 40, 1988.
- Cheng-Feng Shih. "American Military Posture in East Asia: with a Special Focus on Taiwan". *Taiwan International Studies Quarterly*, Vol. 1, No. 2, 2005.
- Christensen, Thomas J. "China, The U.S.-Japan Alliance, and The Security Dilemma in East Asia". *International Security*, Vol. 23, No. 4, 1999.
- Friedberg, Aaron. "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia". *International Security*, Vol. 18, No. 3, 1993.
- Halloran, Richard. "Japan's Military Force: Return of The Samurai". *Parameters*, No. 25, Winter, 1995.
- Hughes, Christopher, W. "Japan's Military Modernisation: A Quite Japan-China Arms Race and Global Power Projection". *Asia-Pasific Review*, Vol. 16, No.1, 2009.
- Jervis, Robert. "Cooperation under the Security Dilemma". *World Politics*, Vol. 30, No. 2, 1978.
- Keiko Hirata. "Japan as a Reactive State?: Analyzing the Case of japan-Vietnam relations". *Japanese Studies*, Vol. 18, No. 2, 1998.
- Ke Wang. Japan "Defense" Policy. *Standford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 8, No. 1, 2008.
- Layne, Christopher. "China's Challenge to US Hegemony", *Current History* (January 2008).

- Laurance, Henry. "Japan's Proactive Foreign Policy and The Rise of The BRICS". *Asian Perspective*, Vol. 31, No. 4, 2007.
- Li Xing, & Zhang Shengjun. "One Mountain with Two Tigers – China and The United States in East Asian Regionalism". *Perspectives on Federalism*, Vol. 2, No. 3, 2010.
- Masashi Nishihara. "Japan's Gradual Defense Build Up and Korean Security". *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 1, No. 1, 1989.
- Mathur, Arpitha. "Japan's Changing Role in the US-Japan Security Alliance". *Strategic Analysis*, Vol. 28 No. 4, 2004.
- Mike M. Mochizuki. "Japan Tests The Nuclear Taboo". *Nonproliferation Review*, Vol.14, No. 2, 2007.
- Roy, Denny. "Stirring Samurai, Disaproving Dragon: Japan's Growing Security Activity and Sino-Japan Relations". *Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2, 2004.
- Samuels, Richard J. "New Fighting Power!"Japan's Growing Maritime Capabilities and East Asian Security". *International Security*, Vol. 32, No. 3, 2007.
- Snyder, Glen H. "The Security Dilemma in Alliance Politics". *World Politics*, Vol. 36, No.4, 1984.
- Tang Siew Man. "Japan's Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japan's Strategic Focus in the 21st Century". *Akademika*, Vol. 70, 2007.
- Tomohisa Sakanaka. "Military Threats and Japan's Defense capability". *Asian Survey*, Vol. 20, No. 7, 1980.
- Congressional Research Service. "Japan's Nuclear Future: Policy Debate, Prospects, and U.S. Interests". Washington, DC: Emma C.A., & Mary Beth Nikitin. 2009.
- Congressional Research Service. "The U.S.-Japan Alliance". Washington, DC: Emma Chanlett Avery. 2011.
- Congressional Research Service. "U.S. Strategic Nuclear Force: Background, Developments, and Issues". Washington DC: Amy F. Woolf. 2012.

Corley, Michael J. "The Future of Power Projection". *Strategy Reaserch Project*, U.S. Army War College. 2002.

Miller, John H. "Changing Japanese Attitudes Toward Security", dalam Satu P. Limaye & Yasuhiro Matsuda (Ed.). *Domestic Determinants and Security Policy-Making in East Asia*. National Institute for Defense Studies and the Asia-Pacific Center for Security Studies. 2000.

Tomotoka Shoji. "Japan's Security Outlook: Security Chalange and the New National Defense Program Guidelines", dalam *Security Outlook of the Asia-Pasific Countries and Its Implications for the Defense Sector*. NIDS Joint Research Series No. 6, 2011.

The New Deterrent Working Group. "U.S. Nuclear deterrence in the 21st Century: Getting It Right", Washington. 2009.

Yoshihide Soeya. "Redifining Japan's Security Profile: International Security, Human Security, and an East Asian Community". Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional IIPS, Tokyo, Jepang. 2004.

Sumber Internet

"22DDH Class", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/22ddh.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.55

"Advance Technology Demonstrator (ATD-X) Shinshin", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/atd-x.htm> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 21.00

"AH-X/AH-64D Apache Longbow", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ah-64d.htm> diakses pada 21 Mei 2012, pukul 19.00

"Analysis: Japan's F-35 choice a case of capability over industry", <http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?id=1065932120> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.55

"Chu-SAM (Type-03) (Japan), Defensive Weapons", <http://articles.janes.com/articles/Janes-Strategic-Weapon-Systems/Chu-SAM-Type-03-Japan.html>

"DDH-161Hyuga/16DDH 13,500 ton Class", <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.10

- “Defense Policy”, http://fpcj.jp/old/e/mres/publication/ff/pdf_07/05_defense.pdf diakses pada 16 Mei 2012, pukul 19.05
- “Establishment of Facility for counter-piracy mission in Djibouti”, <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no23/topics01.html> diakses pada 13 Mei 2012, pukul 21.10
- “F-X Support Fighter”, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/f-x.htm> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.00
- “Japanese Aircraft Carrier”, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/ddh-x-aircraft-carrier.htm> diakses pada 24 Mei 2012, pukul 10.00
- “Japan’s Next Fighter: F-35 Wins The F-X Competition”, <http://www.defenseindustrydaily.com/f22-raptors-to-japan-01909/> diakses pada 23 Mei 2012, pukul 19.30
- “Japan’s BMD”, http://www.mod.go.jp/e/d_act/bmd/bmd.pdf diakses pada 14 Mei 2012, pukul 08.00
- “Japan’s About-Face”, <http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/japans-about-face/data-global-military-expenditures/1220/> diakses 21 Januari 2012, pukul 19.45
- “Legislation on the Response in the case of an armed attack and other such emergency and Japan’s Foreign policy”, <http://www.mofa.go.jp/policy/security/legislation.html> diakses pada 12 Februari 2012, pukul 20.55
- “Ministry of Defense”, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jda.htm> diakses pada 2 januari 2012, pukul 13.30
- “Outline of the Basic Plan regarding Responses Measures Based on the Anti-Terrorism Special Measure Law” http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/terro0109/policy/plan_o.html diakses pada 12 Februari 2012, pukul 20.10
- “The Conventional Military Balance on the Korean Peninsula”, <http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/north-korean-dossier/north-koreas-weapons-programmes-a-net-asses/the-conventional-military-balance-on-the-kore/> Diakses pada tanggal 29 Mei 2010, pukul 07:45

“Type 10 MBT-X Prototype (TK-X)”, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/mbt-x.htm> diakses pada 20 Mei 2012, pukul 16.15

“Type 90 Tank”, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/type-90.htm> diakses pada 20 Mei 2012, pukul 16.00

Dokumen Lembaga

Defense of Japan 2011, http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2011.html diakses pada 2 Januari 2012, pukul 08.15

“Defense Program and Budget of Japan, Overview FY 2012”, http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/240301.pdf diakses pada 17 Mei 2012, pukul 15.20

Office of the Secretary of Defense. (2011). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*. Lihat http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2011_cmpr_final.pdf

Anthony A. Cordesman., & Robert Hammond. (2011). *The Military Balance In Asia 1990-2011: A Quantitative Analysis*. Center for Strategic & International Studies, 2011, In www.csis.org/burke/reports

De Koning., Philippe B., & Lipsy, Phillip Y. (2011). *Resilience or Retrenchment?: Japanese Security in the Era of Fiscal Austerity*. Lihat <http://ssrn.com/abstract=1893284> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1893284>

Eric Johnston, “Slowly secret US Nuke Deals Come to Light”, *The Japan Times*, 20 November 2009, lihat <http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20091120f3.html> ; “Japan Confirms Secret Pact on US Nuclear Transit”, *BBC News*, 9 Maret 2010, lihat <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8557346.stm>

Michael J. Green, & Koji Murata, “The 1978 Guidelines for the U.S.-Japan Defense Cooperation: Process and the Historical Impact”, diakses dari <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/japan/GreenMurataWP.htm> pada 28 Mei 2012, pukul 19.00

Tomasz Janowski, “Debt-riddled Japan relaxes decades-old arms exports ban” lihat <http://www.reuters.com/article/2011/12/27/us-japan-defenceidUSTRE7BQ06Q20111227> diakses pada 30 Mei 2012, pukul 21.00

Scott Snyder, & See-Won Byun, “Cheonan and YeonPyeong: The Northeast Asian Response to North Korea’s Provocations”, lihat <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/201104SnyderandByun.pdf> diakses pada 28 Mei 2012, pukul 23.15

